



**USAHA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT DALAM MENGATASI KRISIS
EKONOMI DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 1933-1939**

SKRIPSI

Oleh
Naimatul Ainiyah
NIM 110210302037

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**USAHA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT DALAM MENGATASI KRISIS
EKONOMI DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 1933-1939**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Naimatul Ainiyah
NIM 110210302037

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015

PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Siti Romlah dan Ayahanda Lukman yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi;
3. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas;
4. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Jember.

MOTO

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (terjemahan Surat *Al-Baqarah*: 153)^{*)}



^{*)}Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Naimatul Ainiah

NIM : 110210302037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Usaha Franklin Delano Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939” adalah benar-benar asli karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Juli 2015

Yang menyatakan

Naimatul Ainiah
NIM 110210302037

SKRIPSI

**USAHA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT DALAM MENGATASI KRISIS
EKONOMI DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 1933-1939**

Oleh

**Naimatul Ainiyah
NIM 110210302037**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Marjono, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sugiyanto, M.Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Usaha Franklin Delano Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 3 Juli 2015

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Marjono, M. Hum
NIP.19600422 198802 1 001

Drs. Sugiyanto, M.Hum
NIP.19570220 198503 1 003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP. 19580823 198702 1 001

Dr. Sumardi, M.Hum
NIP. 19600518 198902 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP 19540501 198303 1 005

RINGKASAN

Franklin Delano Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939; Naimatul Ainiyah, 110210302037; 2015; xv+121 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Krisis ekonomi terjadi di Amerika Serikat sejak tahun 1929. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Presiden Hoover tidak dapat mengatasi krisis hingga menjelang tahun 1932. Rakyat Amerika Serikat yang putus asa, memberikan dukungannya terhadap Franklin D. Roosevelt melalui program *New Deal*. Kebijakan-kebijakan Franklin D. Roosevelt memberikan perubahan bagi pemerintahan Amerika Serikat yang ikut secara langsung mengatasi krisis, karena dampak yang begitu besar dari krisis harus segera ditangani. Perluasan campur tangan pemerintah melalui usaha Franklin D. Roosevelt membawa perubahan sosial, ekonomi, dan politik rakyat Amerika Serikat. Adanya campur tangan dalam kebijakan pemerintah memperlihatkan gambaran positif Amerika Serikat menuju pemulihan, perbaikan untuk keluar dari krisis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) bagaimanakah kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat menjelang terpilihnya Franklin Delano Roosevelt sebagai presiden tahun 1933?, (2) bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Franklin Delano Roosevelt mengatasi krisis di Amerika Serikat tahun 1933-1939?, (3) bagaimanakah pengaruh kebijakan yang diterapkan Franklin Delano Roosevelt terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik tahun 1933-1939?. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah: (1) untuk mengkaji kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat menjelang terpilihnya Franklin Delano Roosevelt sebagai presiden tahun 1933, (2) untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Franklin Delano Roosevelt mengatasi krisis di Amerika Serikat tahun 1933-1939, (3) untuk mengkaji pengaruh kebijakan yang diterapkan Franklin Delano Roosevelt kondisi sosial, ekonomi, dan politik tahun 1933-1939.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Terdapat empat tahap yang harus dilalui dalam metode sejarah yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi politik milik Duverger dan teori kepemimpinan Marx Weber.

Hasil dari penelitian ini ialah, kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelum Franklin D. Roosevelt tidak dapat menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi. Terpilihnya Franklin D. Roosevelt sebagai presiden telah memberikan perubahan orientasi kebijakan dari pemerintah yang secara langsung mengatasi permasalahan krisis dalam program *New Deal*. Program tersebut mencakup perbaikan dalam berbagai bidang yakni sosial, ekonomi, dan politik. Usaha Franklin D. Roosevelt dalam program *New Deal* telah membawa Amerika Serikat keluar dari krisis.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, (1) pada tahun 1929 Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut diakibatkan oleh kehancuran perekonomian nasional yang berpengaruh terhadap rakyat. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis hanya terfokus untuk menyelamatkan perekonomian perindustrian serta sektor keuangan, bukannya memberikan bantuannya terhadap rakyat. Harapan baru muncul ketika Franklin D. Roosevelt terpilih sebagai presiden, yang menawarkan gagasan baru dalam program *New Deal* untuk keluar dari krisis, (2) Pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt menyerang secara langsung terhadap dampak krisis ke dalam tiga aspek luas: (1) bantuan langsung untuk kaum miskin, (2) pemulihan untuk ekonomi, dan (3) perbaikan ekonomi untuk menghindari krisis di masa mendatang. *New Deal* telah menciptakan stabilitator ekonomi seperti asuransi pemerintah pusat untuk deposit bank, bantuan bagi pengangguran, dan kontrol lebih besar atas uang dan perbankan dalam perekonomian nasional, (3) Pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt dalam program *New Deal* memberikan dampak bagi kehidupan rakyat Amerika Serikat untuk keluar dari krisis, berupa perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Saran dalam penelitian ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah, bagi generasi muda, dan bagi guru sejarah.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Usaha Franklin Delano Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd selaku Dekan FKIP Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.pd selaku ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
5. Drs. Marjono, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I, Drs. Sugiyanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Penguji I, dan Dr. Sumardi, M.Hum selaku Dosen Penguji II, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Kayan Swastika, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Drs. Sumarno, M.Pd, selaku Ketua Komisi Pembimbing;
8. Ayah dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi semangat;
9. Pakdhe Drs. H. Moh. Nasuhi dan Budhe Sri Anggraini serta keluarga besarku H. Userin, Hj. Uut Faujiah, H. Tamrin , adik sepupuku Rinzia Oktavia, Dek Ari, Mbak Ulfa, Mbak Dhita, Mas Dika yang selalu memberi dukungan dan doanya;
10. Sahabat-sahabatku di Program Studi Pendidikan Sejarah Siti Ma'unah, Teguh Prasetyo, Dwiki Olivia Silvi, Wardatul Munawwaroh, Priyanti, Rahayu

Fitrianingsih, Happy Khoirunnisa', Deni Adi Wijaya, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dorongan semangat dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;

11. Teman-teman seperjuangan Ainul Masruroh, Amalia Puspita, dan Ainur Rofik yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini serta teman-teman kos Namira terimakasih kalian selalu memberikan dorongan agar tidak mudah putus asa;
12. Ahmad Bukhori Muslim yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 3 Juli 2015

Penulis

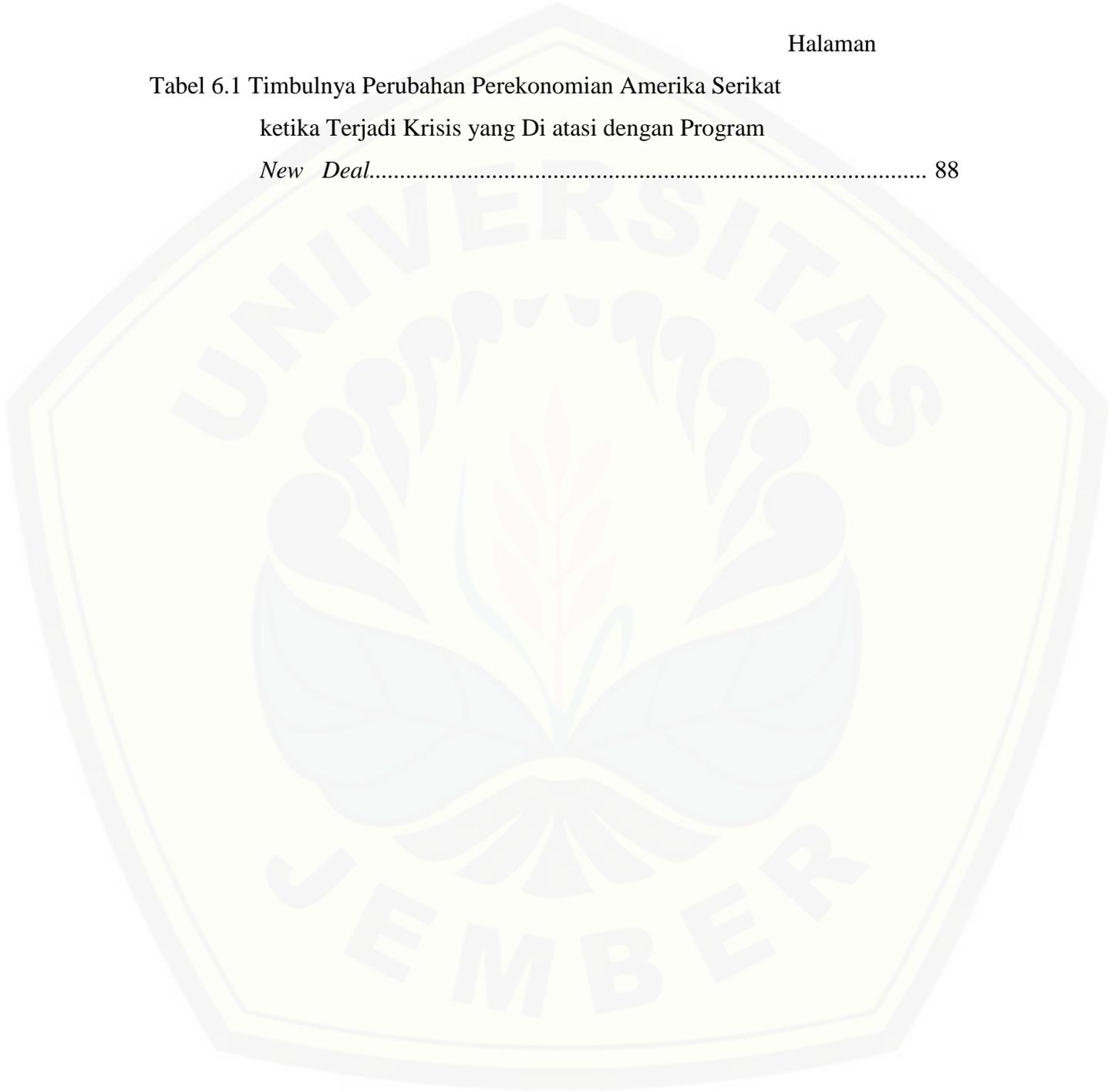
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	6
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB 3 METODE PENELITIAN	20
BAB 4 KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK AMERIKA SERIKAT MENJELANG TERPILIHNYA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT SEBAGAI PRESIDEN TAHUN 1933	27
4.1 Kondisi Sosial	28

4.2 Kondisi Ekonomi	32
4.3 Kondisi Politik	38
BAB 5 PELAKSANAAN KEBIJAKAN FRANKLIN DELANO ROOSEVELT MENGATASI KRISIS EKONOMI DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 1933-1939	47
5.1 Kebijakan di Bidang Sosial.....	47
5.1.1 Kebijakan Bagi Para Pekerja	48
5.1.2 Kebijakan Bagi Kaum Miskin	53
5.1.3 Kebijakan Bagi Kelas Menengah	63
5.1.4 Kebijakan Bagi Perlindungan Krisis di Masa Mendatang	65
5.2 Kebijakan di Bidang Ekonomi	67
5.2.1 Kebijakan Dalam Sektor Pertanian	68
5.2.2 Kebijakan Dalam Sektor Industri	71
5.2.3 Kebijakan Dalam Sektor Keuangan (Perbankan)	74
BAB 6 PENGARUH KEBIJAKAN FRANKLIN DELANO ROOSEVELT TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK TAHUN 1933-1939.....	78
6.1 Di Bidang Sosial	78
6.2 Di Bidang Ekonomi.....	84
6.3 Di Bidang Politik	88
BAB 7 PENUTUP.....	93
7.1 Kesimpulan.....	93
7.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 6.1 Timbulnya Perubahan Perekonomian Amerika Serikat ketika Terjadi Krisis yang Di atasi dengan Program <i>New Deal</i>	88



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. MATRIK PENELITIAN	99
B. GAMBAR FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, ELANOR ROOSEVELT, PROTES RAKYAT, DAMPAK KRISIS, PROGRAM NEW DEAL, PERLAWANAN TERHADAP NEW DEAL, PETA, DATA STATISTIK PROGRAM NEW DEAL, DAN KABINET FRANKLIN DELANO ROOSEVELT.....	101
B.1a Franklin Delano Roosevelt	101
B. 1a Elanor Roosevelt	102
B. 2a Protes Rakyat	103
B. 3a Dampak Krisis	106
B. 4a Program New Deal	108
B. 5a Perlawanan Terhadap New Deal	111
B. 6a Peta	113
B. 7a Data Statistik Program New Deal	115
B. 8a Kabinet Franklin Delano Roosevelt	121

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian Amerika Serikat pada tahun 1929-1933 mengalami keterpurukan. Hal itu dikarenakan negara mengalami krisis ekonomi. Jatuhnya pasar saham di New York pada tahun 1929 merupakan permulaan dari krisis. Perekonomian Amerika Serikat yang lebih bergantung pada kegiatan industri, mengakibatkan distribusi kekayaan tidak merata sehingga rakyat tidak mampu membeli barang hasil produksi. Kegiatan perindustrian mengalami penurunan permintaan dan mulai memecat para pekerja.

Kondisi serupa juga menimpa petani akibat harga panen terlalu rendah membuat petani menderita kerugian. Selain faktor dalam negeri yang menjadi penyebab krisis. Hal lain yang turut menyumbang atas datangnya krisis adalah posisi Amerika dalam perdagangan internasional yakni, permintaan Eropa atas barang-barang Amerika mulai menurun akibat kebijakan *Smoot-Hawley Tariff* oleh Presiden Hoover. Selain itu struktur Hutang Internasional yang tidak stabil ketika perang dunia berakhir, membuat semua negara-negara Eropa yang telah bersekutu dengan Amerika Serikat berhutang uang dalam jumlah besar pada bank Amerika sehingga perekonomian Amerika Serikat menjadi kacau. Hal tersebut menyebabkan kehidupan rakyat di bawah garis kemiskinan (Brinkley, 2007: 623-627). Pada masa krisis kegiatan bisnis mengalami stagnasi, karena investasi dalam pabrik-pabrik industri dan infrastruktur terhenti (Carman *et al*, 1967: 582). Akibatnya terjadi peningkatan pengangguran. Kurang dari tiga tahun, kurva pendapatan nasional turun drastis. Pada akhirnya perekonomian Amerika menjadi macet dan berpengaruh dalam berbagai bidang.

Pada masa pemerintahan Presiden Hoover, tahun 1931 tekanan ekonomi telah berubah menjadi krisis sosial. Krisis merupakan pengalaman yang buruk bagi rakyat Amerika, dalam menghadapi pengangguran, bahaya kelaparan, kehilangan tanah dan

properti lainnya. Kondisi demikian dapat mengancam struktur politik dan sosial negara. Rakyat Amerika Serikat menjadi sangat khawatir pada dampak krisis, namun hanya sedikit usaha yang dilakukan Presiden Hoover (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 465). Alasannya, Hoover berpegang teguh terhadap politik liberal yang menjunjung tinggi kemandirian dalam kegiatan perekonomian. Bantuan dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah federal pada rakyat hanya akan menghancurkan dasar-dasar negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Amerika Serikat. Padahal krisis ekonomi merupakan masalah negara bukan hanya individu, sehingga tindakan pemerintah federal sangat diperlukan. Usaha Hoover dengan menggunakan pengeluaran pemerintah dengan program-program pekerjaan umum, serta mendesak negara bagian untuk mendanai pembangunan umum. Ternyata tidak cukup dalam menghadapi masalah. Pada waktu kondisi ekonomi semakin memburuk, Hoover menjadi lebih enggan untuk menaikkan pengeluaran dana pemerintah.

Pada tahun 1932 di tengah-tengah krisis, Hoover justru mengusulkan kenaikan pajak untuk membantu pemerintah menghindari defisit. Padahal krisis ekonomi harus segera diatasi dengan memperbesar pengeluaran pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian, sehingga dapat meningkatkan daya beli rakyat (Brinkley, 2007: 686). Akibat sikap Hoover yang demikian menyebabkan krisis menjadi lebih hebat dan berlangsung lama (Mackie, 1964: 135). Oleh sebab itu, Hoover gagal mengatasi krisis yang melanda Amerika Serikat.

Pada saat krisis ekonomi semakin parah, Franklin Delano Roosevelt tahun 1933 terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-32. Pada penulisan selanjutnya penulis secara konsisten akan menggunakan sebutan Franklin D. Roosevelt. Awal pemerintahannya, sebuah krisis berkembang dimulai dengan runtuhnya sistem perbankan secara tiba-tiba (Brinkley, 2007: 670-671). Kepercayaan publik kepada bank berkurang, para penabung menarik uangnya, sehingga mengakibatkan satu persatu bank gulung tikar. Franklin D. Roosevelt dalam pidato pelantikannya memberikan rasa percaya diri dan optimisme bagi rakyat Amerika Serikat. Berbagai faktor yang melatarbelakangi krisis menjadi program yang akan

dijalankan Franklin D. Roosevelt. Visi dan misinya mengajak rakyat Amerika Serikat untuk berjuang bersama dalam mengatasi krisis. Langkah Franklin D. Roosevelt dalam mengatasi krisis dengan menerapkan *New Deal* (Janji Baru) (United State Information Science, 2004: 290). *New Deal* merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan undang-undang pembaharuan di Amerika Serikat. *New Deal* dimaksudkan untuk menanggulangi krisis ekonomi dengan mengadakan perubahan-perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Presiden yang terpilih biasanya tidak ikut campur secara langsung dalam mengatasi masalah yang dihadapi rakyat. Namun keadaan krisis harus segera diatasi, sehingga program-program bantuan pemerintah sangat diperlukan. Hal ini menunjukkan Franklin D. Roosevelt sebagai pemimpin yang lebih tanggap dari pada Hoover. Oleh sebab itu Franklin D. Roosevelt memberikan rancangan kebijakan pembaharuan melalui program *New Deal*, sehingga mendapat simpati rakyat.

New Deal berisi serangkaian kebijakan yaitu, reformasi hukum pekerja, ganti rugi, pemeriksaan pabrik yang efektif, asuransi pengangguran, peraturan delapan jam per hari untuk pekerja pemerintah, jaminan sosial, dan peraturan perbankan (Wish, 1961: 439). *New Deal* memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan tarap hidup dan pemulihan ekonomi yang terhenti sejak tahun 1929. Franklin D. Roosevelt kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota kongres sebagai perwakilan rakyat untuk membicarakan program *New Deal*. Pertemuan tersebut menghasilkan 15 butir hukum yang meliputi undang-undang jaminan sosial, perbaikan ekonomi pertanian, industri serta setor keuangan Amerika Serikat (Clark *et al*, 1982: 230). Pada hakikatnya undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbaiki pertanian, industri, dan stabilitas keuangan. Undang-undang ini melegalkan pemerintah federal untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Hal itu memperluas kekuatan pemerintah pusat diatas kehidupan individu penduduk Amerika Serikat. Walaupun kebijakan Franklin D. Roosevelt lebih memihak pada golongan menengah ke bawah, akan tetapi pelaksanaannya mendapat pertentangan dari, Huey P. Long senator dari Louisiana, Pendeta Charles Coughlin, dan Dr. Francis Townsend.

Franklin D. Roosevelt mendapat kritik juga dari golongan swasta (para pebisnis) yang dipelopori oleh Hoover. Penyelenggaraan *New Deal* sebagai kebijakan pemerintah untuk menghadapi krisis dianggap Hoover bertentangan dengan konstitusi bangsa Amerika Serikat. *New Deal* tidak memberikan manfaat jangka panjang karena menganggap Franklin D. Roosevelt tidak tegas dalam menetapkan tanggung jawab dasar pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian pada waktu terjadi krisis (Wish, 1961: 440). Upaya pemulihan serta perbaikan Franklin D. Roosevelt mengatasi krisis oleh pihak penentang *New Deal* dianggap sebagai upaya revolusi. Para pengusaha menuding bahwa *New Deal* telah membelokkan negara ke arah sosialisme (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 456). Hal ini dapat dilihat, dalam bidang politik perubahan ditandai dengan semakin besarnya peran Pemerintah Federal dalam mengatur kehidupan sehari-hari warga negara.

Desentralisasi pemerintahan yang merupakan ciri paling mencolok dalam politik Amerika Serikat, pada pemerintahan Franklin D. Roosevelt berganti menjadi pemerintahan yang lebih sentralistis. Perluasan fungsi pemerintah dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik dipandang Hoover sebagai hal yang akan membahayakan nilai-nilai Amerika Serikat yang paling mendasar, yaitu kebebasan rakyat Amerika Serikat (Cincotta, 1994: 264). Pada bidang politik dan budaya, krisis telah membangkitkan aliran radikalisme dan protes dari rakyat. Penentang *New Deal* sering menuduhnya sebagai sosialisme dan bahkan komunisme (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 1981: 14-18). Pengaruh kuat dari pemerintahan Franklin D. Roosevelt mencakup stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, usahanya dengan memperbesar pengeluaran dan memotong pajak, peraturan dan pengendalian bagi perusahaan swasta untuk menstabilkan harga barang-barang, pelayanan langsung dengan bertanggung jawab atas pertahanan nasional, membantu pekerja mengembangkan keahlian, dan bantuan langsung kepada badan usaha maupun individu.

Usaha Franklin D. Roosevelt sebagai presiden Amerika Serikat dalam mengatasi krisis akan tetap menjadi perdebatan. Hoover sebagai presiden sebelumnya

telah gagal mengatasi krisis, pandangan politiknya yang seharusnya dapat membawa rakyat ke arah kesejahteraan justru kekacauan yang ditimbulkan (Brinkley, 2007: 678). Karakter rakyat Amerika Serikat, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, siapapun yang menunjukkan talenta serta kerja keras dapat menjadi sukses. Kenyataannya krisis ekonomi berhasil meruntuhkan “etika sukses” individu Amerika. Rakyat menyalahkan penguasa perusahaan, bankir internasional, dan kaum royalis ekonomi atas penderitaannya. Kebijakan program-program sosial Franklin D. Roosevelt yang dianggap telah menghilangkan kemampuan individu justru menjadi solusi dalam mengatasi krisis. Oleh karena itu rakyat Amerika Serikat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Rakyat Amerika berharap bahwa sebuah revolusi terjadi untuk perbaikan hidup. Banyak ahli, sejarawan, politikus, dan rakyat menilai bahwa Franklin D. Roosevelt telah berhasil membawa Amerika Serikat dalam kehidupan yang lebih baik. *New Deal* mendapat dukungan sebagian besar rakyat dalam mengatasi krisis (Rujito, 2010: 3). Pemerintahannya telah membangun serangkaian program sosial yang selamanya mengubah hubungan pemerintah pusat dengan rakyat. Pandangan ekonomi sosialis yang digagas Franklin D. Roosevelt justru dapat menegakkan makna sesungguhnya dari demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa ketentuan-ketentuan *New Deal* dalam program Franklin D. Roosevelt atas dasar konsensus dengan rakyat Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan Franklin D. Roosevelt memang bertentangan dengan politik liberal yang dianut oleh Amerika Serikat karena mengarah kepada sosialisme. Tanpa ragu Franklin D. Roosevelt menerapkan kebijakan yang berbanding terbalik dengan ideologi Amerika Serikat yakni dengan kuatnya campur tangan pemerintah dalam berbagai bidang mengatasi situasi genting akibat krisis. Pada masa diktator dan kaum militer berkuasa di Jerman, Italia, Jepang, dan Rusia, *New Deal* justru telah memperkuat demokrasi di Amerika Serikat. Franklin D. Roosevelt bertindak sebagai seorang perantara demokratis dengan merangkul kelompok-kelompok yang sebelumnya ditolak pada masa pemerintahan Hoover seperti serikat buruh, organisasi pertanian, etnis minoritas, dan wanita.

Selama tahun 1930-an Amerika Serikat menemukan jalan tengah menghindari komunisme dan fasisme. Walaupun kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan politik Amerika Serikat, akan tetapi dapat terealisasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kebijakan Franklin D. Roosevelt mendapat dukungan dari rakyat dan disyahkan oleh undang-undang.

Franklin D. Roosevelt telah menata kembali kehidupan rakyat Amerika Serikat sesuai jati diri bangsa. *New Deal* mengatasi krisis dalam tiga aspek luas: pemulihan ekonomi, bantuan untuk kaum miskin, dan perbaikan untuk menghindari depresi di masa mendatang. Bagi republik muda dan negara-negara berkembang sedang mencari sistem untuk meniru, namun Amerika Serikat telah memberikan contoh demokrasi yang baik melalui gaya kepemimpinan Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt selalu mengambil solusi jalan tengah dalam mengadakan perbaikan keuangan negara tanpa menggoncangkan struktur perekonomian Amerika Serikat. Kondisi di atas sangat menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji usaha Franklin D. Roosevelt melalui program *New Deal* untuk keluar dari krisis.

Berdasarkan pendapat di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut, sebagai mahasiswa pendidikan sejarah sekaligus calon guru kegiatan penelitian sangat penting guna pematapan profesi. Profesionalisme guru sangat penting terutama dalam penguasaan materi. Terdapat banyak cara untuk memperdalam penguasaan materi pada guru sejarah, di antaranya dengan mempelajari sejarah dunia pada umumnya, dan khususnya sejarah Amerika Serikat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah judul penelitian yaitu “Usaha Franklin Delano Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939”

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul bertujuan menghindari kemungkinan terjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian

Usaha Franklin Delano Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939. Penulis perlu memberikan batasan-batasan yang relevan, sehingga membantu memahaminya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud (KBBI,1996:1112). Krisis adalah keadaan yang berbahaya, genting dalam tatanan ekonomi (KBBI,1996:531). Usaha Franklin D. Roosevelt dalam hal ini adalah segala upaya Franklin D. Roosevelt dengan mengerahkan tenaga dan pikiran melalui suatu badan pemerintahan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Gagasannya dalam mengatasi krisis dengan program *New Deal*. Program tersebut diupayakan secara cepat disahkan Franklin D. Roosevelt melalui kongres dalam undang-undang karena keadaan genting akibat krisis harus segera ditangani. Dengan demikian, program yang digagasnya dapat dijalankan.

Franklin D. Roosevelt yang dimaksud dalam penelitian ini adalah presiden Amerika Serikat yang terpilih pada tahun 1933. Adapun penggunaan nama seperti Franklin Delano Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, maupun F. D. Roosevelt adalah merujuk pada orang yang sama. Pada penulisan nama berikutnya penulis menggunakan Franklin D. Roosevelt, sedangkan untuk kata Franklin Delano Roosevelt dan Franklin D. Roosevelt penulis gunakan sesuai dengan buku yang dikutip. Kondisi Amerika Serikat di awal pemerintahannya terjadi krisis yang mengguncang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Amerika. Franklin D. Roosevelt memberikan motivasi kepada rakyat untuk mengakhiri pengangguran, membantu petani, dan meningkatkan perekonomian pemerintah pusat dengan mendukung program barunya yaitu *New Deal*. Franklin D. Roosevelt merupakan seorang pemimpin kharismatik, dengan cepat mampu menarik simpati rakyat untuk mendukung programnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maksud yang terkandung dalam judul “Usaha Franklin Delano Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939”, adalah upaya Franklin D. Roosevelt untuk mengatasi krisis di Amerika Serikat. Pelaksanaannya melalui program *New Deal* yang meliputi

perbaikan sektor pertanian, sektor industri, sektor keuangan, pengentasan pengangguran, dan bantuan langsung, pada tahun 1933-1939. Krisis yang ditangani dengan bantuan pemerintah pusat telah berhasil menyelesaikan masalah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Amerika Serikat.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup dalam penelitian bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang akan dibahas, maka dalam pembahasan ini menggunakan ruang lingkup pembatasan spasial (tempat), temporal (waktu), dan materi. Penulis membatasi ruang lingkup materi ini pada kajian Sejarah Amerika Serikat mengenai usaha yang dilakukan Franklin D. Roosevelt dalam mengatasi krisis ekonomi.

Lingkup spasial (tempat) penelitian ini difokuskan di wilayah Amerika Serikat. Lingkup temporal (waktu), dalam penelitian ini yakni tahun 1933-1939. Penetapan tahun 1933 sebagai awal penelitian karena pada tahun tersebut merupakan tahun terpilihnya Franklin D. Roosevelt sebagai Presiden Amerika Serikat ke- 32. Pembahasan juga menyinggung kurun waktu sebelumnya, terutama sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan periode selanjutnya. Pada tahun 1933-1936 orientasi kebijakan Franklin D. Roosevelt adalah perbaikan ekonomi, selanjutnya pemulihan dalam berbagai bidang mencakup stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, peraturan pengendalian bagi perusahaan swasta, pelayanan langsung, dan jaminan sosial. Pada tahun 1938 keberhasilan *New Deal* membawa perekonomian membaik. Pada tahun berikutnya kesibukan industri Amerika Serikat semakin meningkat khususnya kebutuhan alat-alat perang sehingga orientasinya beralih pada kebijakan pengembangan industri. Tahun 1939 sebagai batas akhir penelitian karena perekonomian berangsur-angsur stabil setelah melewati masa-masa krisis. Keberhasilan Franklin D. Roosevelt dalam mengatasi krisis ekonomi dengan berbagai kebijakan memperbaiki pertanian, industri, stabilitas keuangan dan pemberian bantuan langsung telah membawa Amerika Serikat keluar dari keterpurukan akibat

krisis. Lingkup tematikal, penyusunan penelitian ini bertema tentang Sejarah Amerika Serikat. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: (1) kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat menjelang terpilihnya Franklin Delano Roosevelt tahun 1933, (2) pelaksanaan kebijakan Franklin Delano Roosevelt mengatasi krisis ekonomi tahun 1933-1939, (3) pengaruh kebijakan yang diterapkan Franklin Delano Roosevelt terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik tahun 1933-1939. Penulis berharap dengan adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan ini akan mempermudah pembaca dan para akademisi sejarah dalam memahami isi dan tujuan dalam penelitian, agar tidak ada salah penafsiran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) bagaimanakah kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat menjelang terpilihnya Franklin Delano Roosevelt sebagai presiden tahun 1933?
- 2) bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Franklin Delano Roosevelt mengatasi krisis di Amerika Serikat tahun 1933-1939?
- 3) bagaimanakah pengaruh kebijakan yang diterapkan Franklin Delano Roosevelt terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik tahun 1933-1939?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) untuk mengkaji kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat menjelang terpilihnya Franklin Delano Roosevelt sebagai presiden tahun 1933;
- 2) untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Franklin Delano Roosevelt mengatasi krisis di Amerika Serikat tahun 1933-1939;
- 3) untuk mengkaji pengaruh kebijakan yang diterapkan Franklin Delano Roosevelt kondisi sosial, ekonomi, dan politik tahun 1933-1939.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah, hendaknya selalu mempelajari berbagai kajian sejarah kewilayahan seperti Sejarah Amerika, diantaranya tentang usaha Franklin Delano Roosevelt dalam mengatasi krisis ekonomi di Amerika Serikat tahun 1933-1939 yang dapat menunjang profesionalismenya sebagai calon guru sejarah;
- 2) bagi generasi muda, hendaknya dapat mengambil sisi positif dari sikap Bangsa Amerika Serikat. Sebab di bawah kepemimpinan Franklin D. Roosevelt berhasil melampaui krisis ekonomi akut. Franklin D. Roosevelt berhasil membalikkan cara pandang bernegara rakyat Amerika Serikat dari semangat individualisme menuju solidaritas sosial, serta komitmen kapitalisme tanpa peran negara sebagai regulator, menjadi tatanan pasar berkeadilan dengan peran aktif dari negara untuk mendistribusikan kesejahteraan sosial. Sisi positif yang dapat diambil adalah sikap terbuka terhadap cara pandang, prespektif sebagai pedoman untuk bisa menjadi negara yang maju, serta mampu menghadapi berbagai persoalan;
- 3) bagi guru sejarah, hendaknya dapat memperkaya materi kesejarahan khususnya Sejarah Amerika, yaitu usaha Franklin Delano Roosevelt dalam mengatasi krisis ekonomi di Amerika Serikat tahun 1933-1939, sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar;
- 4) bagi almamater FKIP Universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sejarah dan bermanfaat untuk sumber belajar.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan dan mengkaji beberapa sumber yang diperoleh peneliti, baik berupa karya yang diterbitkan yaitu dalam bentuk buku-buku, jurnal dan artikel, maupun karya yang tidak diterbitkan seperti laporan penelitian, skripsi, thesis, dan disertasi. Selain itu, akan diuraikan mengenai pendekatan dan teori-teori yang digunakan peneliti dari berbagai pendapat ahli dan penelitian terdahulu.

Kajian mengenai kondisi Amerika pada tahun 1929 diuraikan oleh oleh Carman, Harold, dan Wishy (1967: 581-607) dalam bukunya yang menceritakan tentang perekonomian Amerika pada masa pemerintahan Presiden Hoover tahun 1929. Kajian mengenai kondisi Amerika menjelang terpilihnya Franklin D. Roosevelt sebagai presiden diuraikan pada bab 16. Pada saat krisis aktivitas bisnis terus menurun dan berpengaruh pada menurunnya pendapatan nasional. Pemerintahan Hoover membiarkan keadaan tersebut dan beranggapan bahwa intervensi pemerintah tidak diperlukan untuk mencegah dampak depresi. Hoover sendiri kewalahan dalam upaya memulihkan stabilitas perekonomian. Masalah mengenai krisis kemudian mendapat tanggapan presiden baru. Franklin D. Roosevelt seorang politikus, yang tidak terbelenggu oleh pandangan politik liberal Amerika yang dapat menghalanginya dalam mengatasi krisis.

Buku ini berisi informasi mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kondisi awal Amerika pada masa krisis berlangsung. Penulis menilai bahwa buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber, terutama untuk memahami permasalahan akibat krisis yang tidak mampu ditangani Hoover lalu mendapat tanggapan Franklin D. Roosevelt dengan program *New Deal* sebagai solusi mengatasi krisis. Informasi mengenai program *New Deal* dan pelaksanaannya hanya diulas secara umum. Sebab, buku ini hanya memfokuskan kajiannya kepada hal tersebut. Berdasarkan uraian yang masih bersifat umum tersebut, penulis ingin mengkaji lebih

lanjut mengenai proses terbentuknya serta pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt dalam mengatasi krisis.

Uraian serupa ditemukan penulis dalam tulisan Davison, Heyrman, Lytle, dan Stoff (1944: 723-755) mengenai garis besar kondisi Amerika pada tahun 1929. Krisis yang terjadi di Amerika tidak mampu di atasi Hoover dengan programnya, meskipun presiden melakukan upaya terbaiknya, programnya telah gagal. Hal yang juga menimbulkan malapetaka, presiden yang sangat tidak efektif dalam perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Di bawah tekanan dari kongres, Presiden Hoover akhirnya melakukan tindakan yang paling berani untuk menyelamatkan bank. Meskipun tindakannya mengatasi kegagalan bank sukses, Presiden Hoover mendapat kritikan karena hanya menyelamatkan bank dan bukan masyarakat.

Terpilihnya Franklin D. Roosevelt sebagai presiden memberikan harapan baru bagi rakyat Amerika Serikat. Kebijakan yang diterapkan Franklin D. Roosevelt selama krisis dengan program *New Deal* ini telah memberikan hasil yang besar bagi bangsa Amerika Serikat. Franklin D. Roosevelt telah membawa rakyat Amerika Serikat keluar dari bencana depresi, akan tetapi kebijakannya juga mendapat pertentangan dari pihak terutama lawannya serta perusahaan swasta. Buku ini memberikan gambaran kepada penulis pada saat krisis serta program baru yang dijalankan Franklin D. Roosevelt yang sangat berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Fokus kajian dalam buku ini adalah pelaksanaan program Franklin D. Roosevelt dalam mengatasi krisis. Data yang luas pada buku ini sangat penting untuk di jadikan referensi penulisan karya ilmiah ini.

Harvey Wish (1961: 425-463), menjelaskan kemenangan Franklin D. Roosevelt dalam pemilu tahun 1933, serta berbagai kebijakan yang diusungnya untuk pemulihan. Franklin D. Roosevelt merupakan seorang yang memiliki kepercayaan diri, fleksibilitas, dan kemauan yang jujur untuk mencoba kebijakan baru untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat. Gaya kepemimpinan Franklin D. Roosevelt telah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Franklin D. Roosevelt mengadopsi pandangan teori ekonomi menurut John Maynard Keynes.

Teori ekonomi yang berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan. Dampak dari depresi ialah menurunnya daya beli rakyat. Kristalisasi *New Deal* diwujudkan pemerintah sebagai lembaga yang akan menyeimbangkan pertanian dengan industri, tenaga kerja dengan modal, dan konsumsi dengan produksi. Program tersebut kemudian dikenal sebagai keseimbangan yang diusulkan oleh Profesor ML Wilson dari Montana State College Pertanian dan Seni Mechanic di Bozeman. Kajian sangat penting untuk menjelaskan, pemikiran dari Franklin D. Roosevelt dalam menyikapi kondisi terpuruk Amerika dengan berbagai kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan terdahulu upayanya melalui kongres.

Pengalaman politik sebelum Franklin D. Roosevelt menjadi presiden telah memberikan banyak pelajaran pada saat menjadi presiden. Kepemimpinan kharismatik yang dimiliki, serta kecakapannya dalam mengatasi permasalahan memberikan ketenangan bagi rakyat Amerika. Buku ini juga menjelaskan mengenai meningkatnya peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam negeri. Kekuasaan Presiden di kongres ditingkatkan, namun rakyat tetap bersimpati dan memberikan dukungannya dengan program baru pemerintah. Subsidi *New Deal* dan reformasi atas nama Petani, telah mengalihkan jutaan rakyat, buruh, pengangguran, dan Negro untuk mendukung program *New Deal*. Oleh sebab itu, buku ini dijadikan sebagai salah satu sumber dalam penelitian ini yang berusaha penulis kembangkan dengan mengkaji pengaruh kebijakan Franklin D. Roosevelt pada program *New Deal*. Dengan demikian, penulis dapat menganalisis keberhasilan Franklin D. Roosevelt mengatasi krisis, telah berhasil ataukah mengalami kegagalan.

Upaya yang dilakukan oleh Franklin D. Roosevelt dalam kongres terutama berkaitan dengan disetujuinya undang-undang untuk melancarkan program pemulihan dijelaskan dalam buku karangan Harlow (1961: 712-729). Buku ini menjelaskan mengenai tujuan kebijakan Franklin D. Roosevelt serta pelaksanaan undang-undang tersebut. Kebangkitan industri akan memberikan lebih banyak pekerjaan untuk

mengatasi pengangguran serta pemulihan industri nasional. Selain perencanaan untuk membangkitkan kembali perindustrian, komite lain juga mengupayakan perbaikan pada bidang pertanian. Perbaikan sistem perbankan serta jaminan sosial untuk kesejahteraan rakyat juga menjadi prioritasnya. Franklin D. Roosevelt menekankan prinsip kekuasaan pada tingkat teratas dan wewenang nasional untuk menjamin hak-hak warga negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Berdasarkan informasi tersebut penulis menemukan keterkaitan pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt dengan tujuan yang ingin dicapai yakni upaya pemulihan serta perbaikan ekonomi Amerika selama krisis dan harapan jangka panjang tentang kesejahteraan rakyat.

Franklin D. Roosevelt merubah perhatian kepada program-program level menengah dan ke bawah piramida ekonomi. Hal ini dijelaskan dalam buku tulisan Clark, McKinzie, dan Wilson (1982: 229-257). Buku ini menyatakan program yang digagas ialah untuk mengupayakan keadaan kerja yang pantas, akses harga makanan dan kebutuhan energi listrik, kesempatan untuk hidup di apartement yang layak atau untuk membeli sebuah rumah, beberapa jenis bantuan untuk pengangguran, dan subsidi keuangan untuk pensiunan. Franklin D. Roosevelt membangun perbaikan sosial di tahun 1934 dan 1935.

Program ini diwujudkan dengan membentuk lembaga bantuan yang dibangun sejak 1933 dan 1935. Program tersebut diantaranya ialah *The Federal Emergency Relief Administration* (FERA) dan *Civil Works Agency* (CWA) yang telah membantu berjuta-juta penduduk Amerika yang menderita cacat serius. Pada bulan Mei 1935, Perwakilan rakyat Amerika juga menyetujui rencana presiden untuk bantuan, *Works Progress Administration* (WPA). Penetapan kebijakan pemerintah ini menciptakan FERA, CWA, dan WPA sebagai bentuk komitmen pemerintahan federal kepada rakyat Amerika. Fokus kajian buku ini menekankan kebijakan Franklin D. Roosevelt yang lebih mengarah pada rakyat golongan menengah kebawah menjadi informasi penting dalam buku ini.

Rakyat Amerika sudah tidak lagi menghiraukan betapa konservatifnya Franklin D. Roosevelt selama kebijakan *New Deal* berlangsung. Perundang-undangan yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah adalah kebijakan yang dijanjikan selama kampanye ini dipegang teguh hingga menjabat sebagai presiden. Pada hakekatnya *New Deal* ini membantu terciptanya stabilitas di dalam ekonomi yang kemudian mendorong pengusaha bangkit dalam perindustrian yang membawanya pada tatanan kesejahteraan. Alasan pihak swasta membenci kebijakan Franklin D. Roosevelt ini karena cenderung pada kebijakan yang mengarah pada kepentingan sosial, yang dapat mempengaruhi pendapatan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa adanya kebijakan *New Deal* mungkin kapitalisme Industri telah tewas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perekonomian Amerika lebih digambarkan sebagai suatu perekonomian “campuran” yakni antara pemerintah dan perusahaan swasta memegang perananan peranan penting.

Buku karangan Norton, Katzman, Escott, Chudacoff, Paterson, Tuttle, dan Brophy menjelaskan, perekonomian pada masa krisis juga memberikan kontribusi terhadap perubahan perekonomian Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan jangka panjang yang berkesinambungan. Unsur dasar yang sangat berpengaruh dalam perekonomian Amerika Serikat pada masa mendatang melalui gagasan Franklin D. Roosevelt yang mengilhami pendapat dari golongan oposisi baik golongan kanan maupun kiri. Hal tersebut memperluas peranan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan akhir yakni menempatkan kembali masyarakat untuk bekerja dan kehidupan dalam yang sejahtera. Pemerintah juga memberikan pelayanan serta bantuan langsung pada masyarakat. Terutama pada program reformasi Franklin D. Roosevelt yang menerapkan jaminan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Buku ini memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan Franklin D. Roosevelt, sehingga berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat.

Kesimpulan dari tinjauan pustaka di atas berupa gambaran secara umum kondisi Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Franklin D. Roosevelt. Kajian

mengenai *Usaha Franklin Delano Roosevelt Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939* belum banyak dipaparkan secara detail. Oleh karena itu masih terdapat celah yang belum dikaji secara mendalam oleh penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini akan dibahas antara lain; (1) penelitian ini akan menganalisis dampak krisis ekonomi tahun 1929 terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik menjelang terpilihnya Franklin D. Roosevelt sebagai presiden, (2) penelitian ini menganalisis keterkaitan faktor penyebab krisis terhadap perekonomian Amerika Serikat yang berpengaruh pada berbagai bidang, (3) penelitian ini menyoroti kebijakan pemerintah terkait dengan usaha-usaha Franklin D. Roosevelt dalam pelaksanaan kebijakannya mengatasi krisis, (4) penelitian ini juga melihat hasil yang dicapai Franklin D. Roosevelt terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik tahun 1933-1939. Merujuk pada kajian literatur di atas maka tema kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini sudah ada, namun belum memaparkan secara detail permasalahan terkait Usaha Franklin D. Roosevelt mengatasi krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 1933-1939. Oleh sebab itu, dari kajian-kajian yang telah ada penelitian ini berguna, untuk menambah wawasan dan menghindari duplikasi.

Gambaran suatu peristiwa sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan yakni dari segi mana memandangnya, dimensi apa yang diperhatikan sampai dengan unsur-unsur apa yang perlu diungkapkan (Abdurrahman, 2007: 23). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologi politik sebagai alat bantu yang akan mempermudah penafisiran. Menurut konsep yang lebih modern sosiologi politik merupakan ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando dalam semua lapisan masyarakat. Sosiologi politik mengkhususkan kajian di bidang ilmu tentang negara. Obyek pendekatan sosiologi politik adalah menganalisa kekuasaan di dalam masyarakat secara menyeluruh yang mencakup konflik antara individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Tafsiran kedua mengenai sosiologi politik ialah untuk menegakkan ketertiban sosial, yakni kekuasaan untuk melindungi kepentingan umum dari tekanan kelompok-kelompok kepentingan khusus (Duverger, 2014: 18-29). Dengan demikian,

pendekatan ini bertujuan untuk melihat permasalahan yang akan dikaji merujuk pada tafsiran kedua. Keterkaitan kekuasaan Franklin D. Roosevelt dalam menjalankan kebijakan politiknya di Amerika Serikat dalam program *New Deal* untuk menciptakan keadilan sosial serta pengaruhnya terhadap masyarakat Amerika Serikat selama program tersebut berlangsung. Secara garis besar dapat diidentifikasi pola pemikiran Franklin D. Roosevelt dan praktek pembangunan yang dikembangkan ialah politik sebagai panglima, yakni dengan memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan yang lebih menekankan pada peranan negara, yang diwakili oleh birokratnya, sebagai aktor utama pembangunan (Mas'ood, 1997: 30-31). Negara yang didukung oleh mekanisme kekuasaan politik, dipandang mampu melakukan intervensi dalam pembangunan ekonomi demi mengatasi krisis. Hal ini dilakukan dengan cara mengaitkan masalah-masalah yang dihadapi Franklin D. Roosevelt pada masa krisis melalui kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi situasi kacau akibat krisis. Dampak krisis menimbulkan kekacauan dalam berbagai bidang. Bidang sosial meningkatnya angka pengangguran, bidang ekonomi menurunnya stabilitas perekonomian, sehingga harus segera ditangani. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah dengan menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan atas ketertiban dan konsensus serta partisipasi rakyat dalam program pemerintah. Pemerintahan Franklin D. Roosevelt sebagai aktor otonom, tidak sekedar mencerminkan kepentingan kelas tertentu. Walaupun para pengusaha tidak menyukai kebijakan pemerintah, akan tetapi pemerintah mampu berjalan terus mengejar kepentingan jangka panjangnya yakni untuk kesejahteraan rakyat.

Selain menggunakan pendekatan sosiologi politik untuk menganalisis permasalahan, penulis juga menggunakan teori kepemimpinan. Jenis kepemimpinan ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli sosiologi Jerman, Max Weber. Weber (dalam Soekanto, 1985:79) mengatakan bahwa kepemimpinan dibedakan menjadi tiga menurut wewenang atau otoritasnya yaitu:

- 1) otoritas kharismatik, merupakan otoritas kepemimpinan yang didasarkan atas kharisma atau kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa seperti kebaikan, kualitas istimewa yang dimiliki seseorang sehingga perintahnya dipatuhi.
- 2) otoritas tradisional, merupakan otoritas kepemimpinan atas dasar pewarisan yang diberikan pada anggota kelompok yang berkuasa tanpa memperhatikan kemampuan yang dimiliki untuk memimpin.
- 3) otoritas legal rasional, merupakan otoritas kepemimpinan yang didasarkan pada pada sistem yang berlaku dimasyarakat. Sistem hukum ini telah diakui masyarakat. Selain itu kepemimpinan seseorang juga didasarkan atas kemampuan yang telah diakui oleh masyarakat.

Berdasarkan teori kepemimpinan yang dikemukakan Weber di atas, maka gaya kepemimpinan Franklin D. Roosevelt masuk ke dalam tipe ke satu dan ke dua yaitu otoritas kepemimpinan kharismatik dan otoritas kepemimpinan legal rasional. Pemimpin kharismatik datang pada waktu krisis atau keadaan sukar dalam masalah-masalah ekonomi, sosial, dan politik. Pada kondidi ini Franklin D. Roosevelt mampu menjawab tantangan krisis ekonomi. Teori ini berguna dalam masa krisis, sesudah pemimpin sebelumnya yang dianggap pemerintahannya telah gagal. Pada konteks ini Franklin D. Roosevelt menggantikan Hoover, yang sangat konservatif terhadap pandangan politinya yang dipandang rakyat Amerika Serikat sebagai rezim yang tidak baik. Franklin D. Roosevelt dianggap sebagai pemimpin kharismatik yakni seorang yang mampu menyelesaikan permasalahan akibat krisis. berdasarkan sifat utama yang dimilikinya, yaitu rasa percaya diri, memiliki visi dan misi, memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, berani mencoba gagasan baru, serta kesadaran penuh terhadap situasi yang terjadi.

Franklin D. Roosevelt memiliki kemampuan memimpin yang didukung oleh pemikirannya serta kemampuannya dalam berpidato dapat membangkitkan kepercayaan rakyat untuk keluar dari krisis. Usahnya secara nyata diwujudkan dalam progam yang secara langsung mengatasi krisis. Dengan demikian kebijakannya

tersebut mendapat dukungan rakyat. Kepemimpinannya dipatuhi, karena rakyat menaruh kepercayaan terhadap kemampuan pribadinya. Teori tersebut memaparkan bahwa pemimpin dilihat dari segi kualitas dan perannya. Selain pemimpin kharismatik Franklin D. Roosevelt juga sah secara hukum dalam wewenangnya sebagai presiden (kepemimpinan legal rasional). Wewenang yang dimilikinya sebagai presiden mendukung secara tegas terhadap keputusan-keputusan yang diajukan dalam kongres. Franklin D. Roosevelt adalah seorang politikus yang sangat imajinatif, fleksibel sangat mengerti akan harapan rakyat ketika depresi mengguncang Amerika. *New Deal* adalah respon Franklin D. Roosevelt selama dekade 1930-an, yang membawa Amerika keluar dari krisis.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, pada waktu melakukan kegiatan penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan bidang ilmunya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses mengkaji serta menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, sehingga dengan menggunakan metode sejarah, penulis berusaha untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa dari masa lampau manusia (Gottschalk, 1975: 32). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur kerja sejarawan untuk menguji dan menganalisis sumber-sumber sejarah peninggalan masa lampau secara kronologis, kritis dan logis yang kemudian disajikan dalam cerita sejarah. Adapun langkah-langkah metode penelitian sejarah meliputi empat tahap, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan sumber), (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (penulisan) (Gottschalk, 1975:18).

Berdasarkan langkah-langkah metode penelitian sejarah, maka kegiatan pertama yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ialah mengumpulkan dan menemukan sumber-sumber sejarah berupa jejak-jejak sejarah atau fakta sejarah yang disebut heuristik (Sjamsuddin, 1996: 67). Sumber yang dikumpulkan tentunya adalah sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan kegiatan heuristik, penulis berusaha mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan *Usaha Franklin Delano Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat tahun 1933-1939*.

Pada penelitian dilakukan pencarian berbagai sumber sejarah berupa buku, laporan penelitian, artikel, dan jurnal yang diperoleh di perpustakaan-perpustakaan antara lain: (1) Perpustakaan dan laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah, (2) Perpustakaan Universitas Jember, (3) Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, (4) Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember,

(5) Perpustakaan daerah Kabupaten Jember (6) Perpustakaan LP3Y di Yogyakarta. Pada proses pengumpulan sumber ini, sumber yang terkumpul diklasifikasi menjadi dua yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditulis sejaman dengan peristiwa yang terjadi, yakni orang yang hadir pada peristiwa yang dikisahkannya disebut saksi pandangan mata (Gottscalk,1975: 35). Sumber sekunder merupakan sesuatu yang ditulis oleh sejarawan pada masa sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber pertama. Pada pokoknya, sumber sejarah baik primer maupun sekunder, penting bagi sejarawan karena mengandung unsur-unsur primer, dan orang yang menulis dapat dipercaya sebagai saksi dari suatu peristiwa.

Pada tahap pengumpulan sumber ini peneliti tidak menemukan sumber primer. Sumber yang digunakan penulis merupakan sumber sekunder. Walaupun sumber sekunder yang digunakan oleh penulis, namun berdasarkan kritik sumber yang telah penulis lakukan, fakta-fakta, data statistik yang terdapat dalam sumber sekunder yang penulis gunakan mengandung unsur-unsur primer dan paling relevan dengan penelitian. Sumber sekunder yang paling relevan dan paling mendekati sumber primer tersebut antara lain sebagai berikut: (1) *The United States: From Wilderness to World Power* buku karangan Ralph Volney, buku ini sangat relevan untuk digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini. Data yang diperoleh di dalamnya mengandung unsur-unsur primer yang dapat dipertanggung jawabkan yakni dituliskan langsung oleh Frances Perkins yang menjabat sebagai Secretary of Labor pada kabinet Franklin D. Roosevelt; (2) *Contemporary America The National Scene Since 1900* buku karangan Harvey Wish, data yang terdapat dalam buku ini berasal dari memoar yang ditulis oleh Cordell Hull yang menjabat sebagai Secretary of State pada masa pemerintahan Franklin D. Roosevelt dari tahun 1933-1944, serta sumber arsip; (3) *Nation of Nation* buku karangan Davidson, E. Gienapp, Heyrman, Lytle, dan B. Stoff, fakta-fakta yang terdapat dalam tulisan tersebut berasal dari arsip sehingga dapat dipercaya serta dipertanggung jawabkan kebenarannya; (4) *A People & A nation: A History of the United States*, karangan Mary Beth Norton, David M. Katzman, Paul D. Escott, Thomas G Paterson, William M. Tuttle, Jr, dan William J. Brophy, buku

ini juga memenuhi syarat sebagai salah satu buku yang dapat penulis gunakan sebagai sumber dalam penelitian.

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan sumber ialah kritik sumber untuk mencari keautentikan sumber yang telah diperoleh (Gottschalk, 1975:18; Kuntowijoyo, 2013: 77). Kritik adalah pengujian mengenai ketepatan (akurasi) sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibilitas keasliannya (autentik) (Sjamsuddin, 1994:104). Tujuan dilakukannya kritik sumber adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta (Notosusanto, 1984: 11). Oleh karena itu setelah mendapatkan sumber-sumber tidak langsung digunakan penulis sebagai bahan acuan sehingga, sumber yang diperoleh perlu dikritisi untuk mencari kebenaran sumber (Sjamsuddin, 1996:103). Dengan demikian produk karya ilmiah yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.

Kritik sumber yang dilakukan mencakup dua hal yakni kritik intern dan kritik ekstern. Tahapan pertama ialah kritik ekstern peneliti melakukan verifikasi terhadap bentuk fisik dari sumber sejarah. Bentuk luar dapat dinilai dari kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, huruf yang digunakan dalam sumber tersebut. Identifikasi sumber oleh penulis dilakukan dengan cara memilah sumber-sumber yang diperoleh sesuai dengan kajian yang akan dibahas. Selain itu penulis melakukan identifikasi apakah sumber yang diperoleh merupakan sumber asli ataukah tiruan. Sumber sejarah dikatakan asli atau otentik jika sumber tersebut merupakan produk dari orang yang membuatnya (Sjamsuddin, 1996:105). Dengan demikian setelah melakukan tahapan tersebut akan diperoleh sumber yang benar-benar asli atau otentik.

Pada tahapan kedua dilakukan kritik intern ini menekankan pada aspek “dalam” yaitu isi dari sumber: kesaksian (testimony) (Sjamsuddin, 1996: 105). Hal yang dilakukan penulis untuk mendapatkan sumber yang kredibel serta reliabilitas dalam buku maupun dokumen adalah dengan membandingkan sumber-sumber yang didapat sehingga sumber yang digunakan benar-benar kredibel. Setelah mengkaji sumber-sumber tersebut penulis menemukan fakta-fakta sejarah yang dibutuhkan

dalam penelitian yang akan dilakukan. Fakta tersebut digunakan dalam pembahasan usaha yang dilakukan Franklin D. Roosevelt dalam mengatasi krisis di Amerika tahun 1933-1939 serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang digagas.

Langkah selanjutnya setelah melakukan kritik sumber adalah peneliti melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dari hasil proses kritik. Interpretasi adalah kegiatan untuk menafsirkan dan menetapkan makna yang saling berhubungan antar fakta-fakta sejarah. Proses interpretasi ini sering dianggap sebagai penyebab subjektifitas peneliti. Subjektifitas peneliti memang diakui namun tanpa penafsiran sejarawan tidak dapat berkata apa-apa. Oleh karena itu sejarawan perlu mencantumkan keterangan dari data yang diperoleh (Kuntowijoyo, 2013: 78). Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan fakta-fakta sejarah hingga menjadi suatu bentuk hubungan yang logis, rasional, faktual dan kausalitas, sehingga diharapkan dapat membentuk kisah sejarah yang mendekati kebenaran. Hal ini dilakukan karena fakta sejarah yang diperoleh melalui proses kritik tersebut terpisah berdiri sendiri, belum tersusun secara sistematis sehingga belum bisa disebut ceritera sejarah. Oleh karena itu berbagai fakta yang berdiri sendiri harus diinterpretasikan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis yang sedekat mungkin dengan kebenaran.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi. Historiografi adalah kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif fakta-fakta sejarah yang disebutkan secara terpisah (Gottschalk, 2008: 167). Rekonstruksi sejarah menghasilkan suatu gambaran suatu peristiwa sejarah namun tidak mungkin gambaran tersebut diperoleh secara utuh. Oleh karena itu setiap konstruk senantiasa dituntut menghasilkan sesuatu yang utuh dan bulat, baik naratif dan deskriptif, maka dalam penyusunan fakta-fakta menjadi konstruksi yang utuh diperlukan tambahan unsur lain yakni imajinasi sejarawan (Kartodirdjo, 1993: 90-91). Sejarah memerlukan imajinasi, dalam prosesnya sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi setelah suatu peristiwa berlangsung (Kuntowijoyo, 2013: 52). Pada proses penulisan

sejarah daya imajinasi dan kreatifitas harus terikat pada fakta-fakta sejarah dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Sejarawan juga terikat pada keharusan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, tanpa diberi tambahan-tambahan atau direka (Kuntowijoyo, 2013:80). Historiografi yang dilakukan penulis adalah dengan menyusun dan menulis cerita sejarah mengenai *Usaha Franklin Delano Roosevelt dalam mengatasi krisis ekonomi di Amerika tahun 1933-1939* dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah heuristik, kritik, dan interpretasi sehingga menjadi cerita sejarah yang kronologis, logis, rasional, faktual dan kausalitas (Gottscalk, 1975: 32). Hasil dari proses historiografi berupa penyajian penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi, dengan sistematika yang terdiri dari 7 Bab. Bagian pengantar terdapat dalam bab 1 sampai bab 3, bagian hasil penelitian terdapat dalam bab 4 sampai bab 5, bagian kesimpulan terdapat dalam bab 7.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan dilakukannya penelitian ini, yang memaparkan kondisi Amerika Serikat pada saat krisis berlangsung serta tindakan Franklin D. Roosevelt dalam mengatasi permasalahan yang berbanding terbalik dengan konstitusi. Berdasarkan latar belakang penulis menemukan berbagai permasalahan yang ingin dikaji. Fakta-fakta yang diperoleh dari pengumpulan sumber penulis gunakan untuk menjawab permasalahan, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka dan merupakan hasil dari book review. Berdasarkan pada permasalahan yang akan dibahas penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik selain itu digunakan pula teori kepemimpinan. Pendekatan sosiologi politik digunakan untuk mengkaji seberapa besar kekuasaan pemerintahan Franklin D. Roosevelt dalam menjalankan kebijakan dalam program *New Deal* di Amerika Serikat pada masa krisis ekonomi. Sedangkan teori kepemimpinan digunakan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam situasi tertentu. Teori tersebut memaparkan bahwa pemimpin dilihat dari segi kualitas dan perannya. Dengan demikian teori ini penulis gunakan untuk

menganalisis keberhasilan Franklin D. Roosevelt mengatasi krisis melalui kebijakannya sebagai pemimpin negara serta pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat.

Bab berikutnya adalah metode penelitian. Pada bab 3 ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode sejarah. Langkah-langkah dalam metode sejarah meliputi, heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.

Deskripsi hasil penelitian diuraikan dalam bab 4, bab 5, dan bab 6. Pada Bab 4, penulis mendeskripsikan tentang kondisi Amerika Serikat pada tahun 1929 yakni peristiwa kejatuhan pasar saham, berakibat krisis yang mengancam kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat. Tanggapan presiden Hoover atas kondisi tersebut ialah dengan kebijakan yang tetap menekankan pada tanggung jawab pribadi rakyat Amerika Serikat yang sesuai dengan pandangan politik liberalisme. Meskipun Hoover melakukan upaya terbaiknya, programnya gagal karena Hoover tidak optimal memberikan bantuannya pada rakyat. Krisis telah menghancurkan pondasi ekonomi, yang berdampak pada kehidupan sosial rakyat Amerika. Harapan baru rakyat Amerika Serikat muncul ketika Franklin D. Roosevelt terpilih sebagai presiden. Perannya dalam mengatasi krisis dengan program-program *New Deal* mendapat dukungan rakyat karena mengikut sertakan rakyat menghadapi situasi krisis seperti yang terdapat pada visi dan misinya.

Bab 5, penulis mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt dengan berlakunya undang-undang baru dalam program *New Deal* yang bertujuan kearah pemulihan serta perbaikan yang akan membawa Amerika Serikat keluar dari krisis. Program tersebut mencakup berbagai bidang meliputi bidang sosial dan Ekonomi. Pada bidang sosial perbaikan dengan disahkannya Undang-undang bagi buruh. Bagi penduduk miskin mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Sementara bagi kelas menengah diberikan pinjaman hipotek untuk mendapatkan kembali rumah yang telah disita oleh bank. Pada bidang ekonomi perbaikan sektor pertanian menjadi sorotan pemerintah untuk membantu petani menaikkan harga.

Kebijakan Franklin D. Roosevelt dalam perekonomian Amerika Serikat adalah perbaikan sektor industri dan sistem perbankan.

Pelaksanaan kebijakan yang diterapkan Franklin D. Roosevelt membawa pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pada bidang sosial hubungan masyarakat dengan pemerintah menjadi semakin baik, seperti tanggapan positif rakyat terhadap program pemerintah. Perekonomian Amerika Serikat semakin stabil setelah melewati masa-masa krisis. Kebijakan politiknya lebih mengarah kepada sosialisme akan tetapi dapat mempertahankan demokrasi liberal yang dianut hal tersebut akan diuraikan pada Bab 6. Di bagian akhir berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa, kebijakan Franklin D. Roosevelt dalam program *New Deal* telah membawa Amerika Serikat keluar dari krisis. Meski kebijakannya tidak berjalan optimal tetapi terdapat beberapa keberhasilan Franklin D. Roosevelt dalam pemulihan serta perbaikan sosial, ekonomi, dan politik rakyat Amerika Serikat yang diuraikan dalam bab 7.

**BAB 4. KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK AMERIKA SERIKAT
MENJELANG TERPILIHNYA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
SEBAGAI PRESIDEN TAHUN 1933**

Kondisi Amerika Serikat menjelang terpilihnya Franklin D. Roosevelt negara mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi, diantaranya jatuhnya pasar saham di New York tahun 1929. Perdagangan internasional Amerika Serikat menjadi terganggu akibat jatuhnya harga-harga dunia yang diperkuat oleh penurunan permintaan Eropa untuk produk-produk Amerika. Hal serupa juga terjadi dalam sektor pertanian, akibat produksi berlebih harga komoditas pertanian sangat murah yang mengakibatkan petani menderita kerugian (Mackie, 1964: 130-132). Kondisi demikian berakibat langsung pada timbulnya bencana krisis ekonomi. Kemacetan perekonomian berdampak pada kegagalan perbankan, sehingga dalam beberapa hari saja 300 bank ditutup. Para pengusaha mencari jalan keluar dengan menurunkan ongkos produksi serta menghemat tenaga kerja, bahkan pabrik-pabrik yang tidak mampu memproduksi lagi akhirnya ditutup. Hal ini berdampak pada jumlah pengangguran yang semakin meningkat diberbagai wilayah di Amerika Serikat.

Berlangsungnya krisis di Amerika Serikat sebagai dampak dari kekacauan sistem perekonomian. Perekonomian yang hanya bergantung pada sektor industri yang dikuasai oleh pebisnis, menyebabkan sedikitnya campur tangan pemerintah ketika terjadi krisis. Dampak yang ditimbulkan krisis dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan rakyat Amerika. Oleh karena itu perlu adanya peranan pemerintah dalam mengatasi krisis. Berikut ini akan diuraikan mengenai kondisi sosial, politik dan ekonomi Amerika Serikat menjelang terpilihnya Franklin D. Roosevelt tahun 1933.

4.1 Kondisi Sosial

Kehidupan sosial rakyat Amerika Serikat sebelum terjadinya krisis ekonomi berjalan dengan baik. Rakyat Amerika Serikat memiliki pandangan, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas nasibnya sendiri sehingga siapapun yang menunjukkan ketekunannya dan bekerja keras akan menjadi sukses. Bisnis swasta di tahun 1920-an mendapat dorongan yang sangat penting dari pemerintah, yakni dengan diberikannya pinjaman modal untuk sarana pembangunan infrastruktur bisnis serta pemberian tunjangan langsung dari pemerintah yang dapat mendukung perkembangan sektor swasta. Undang-undang pajak tahun 1922 dan 1930 menjadikan nilai pajak yang sangat tinggi pada pihak swasta, sehingga pemerintah menjamin adanya monopoli pengusaha Amerika Serikat di pasar domestik. Akan tetapi ketika krisis ekonomi berlangsung yang diawali oleh jatuhnya pasar saham di New York menunjukkan pengalaman traumatis bagi jutaan rakyat Amerika Serikat (Norton *et al*, 1984: 375). Berawal dari krisis sistem perekonomian menjadi kacau. Krisis menjangkau dalam setiap kehidupan dari ekonomi, hingga ke dalam kehidupan sosial. Perekonomian nasional berjalan lemah angka-angka statistik menunjukkan gambaran dari suatu tragedi bangsa (Lihat lampiran B hal.118).

Sejak tahun 1929 sampai 1933 perekonomian Amerika Serikat mengalami kelumpuhan. Perusahaan-perusahaan dan pabrik berhenti melakukan kegiatan produksi. Daya beli konsumen sangat rendah sehingga perusahaan merugi dan pada akhirnya menutup usahanya. Kondisi demikian tentu berdampak besar terhadap kehidupan sosial rakyat Amerika Serikat yang sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik. Akibatnya pengangguran meningkat dari empat juta pada permulaan tahun 1930 mencapai 13 juta dari 52 juta tenaga kerja di awal tahun 1933, ini berarti di antara empat buruh ada satu yang menganggur. Secara statistik tingkat GNP turun hampir setengah nilainya dari 104,6 milyar di tahun 1929 menjadi 58,6 milyar di tahun 1932. (Norton *et al*, 1984:375-378). Dampak dari krisis ekonomi berangsur-angsur dirasakan oleh rakyat Amerika Serikat. Di wilayah perkotaan, walaupun

sebagian besar masyarakat masih tetap bekerja, akan tetapi setiap harinya para pekerja menerima slip pemotongan.

Secara psikologi krisis ekonomi telah melemahkan cita-cita kerja serta kemajuan individu. Hal tersebut dapat dilihat dari reaksi rakyat pada waktu krisis, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kondisi demikian membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun (Brinkley, 2007: 672). Krisis ekonomi turut mempengaruhi gaya hidup masyarakat Amerika Serikat. Bahan pakaian yang digunakan cenderung jelek dan murah, terkadang rakyat lebih memilih menjahit kembali bajunya yang robek dari pada harus membeli pakaian demi menghemat pengeluaran. Banyaknya pengangguran memaksa rakyat Amerika Serikat untuk berpaling pada sistem bantuan publik negara bagian lokal. Akan tetapi bantuan yang diberikan pemerintah lokal, hanya cukup melayani sejumlah kecil kaum miskin. Akibatnya banyak dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan menderita kelaparan.

Di seluruh negeri masalah kekurangan gizi dan gelandangan tumbuh dengan mengkhawatirkan, jenis makanan berubah dengan hanya mengkonsumsi bahan-bahan pokok. Keadaan menjadi semakin buruk ketika orang-orang berbaris di depan dapur-dapur sup Palang Merah dan Tentara Keselamatan, hanya untuk mengantri mendapatkan jatah makanan. Kehidupan rakyat menjadi lebih memprihatinkan, bahkan penduduk kota hanya makan kentang, maupun biskuit kering sekedar untuk bisa makan. Bahkan sebagian orang untuk mendapatkan makanan menunggu di luar dapur restoran dengan harapan mendapat sisa hidangan (Norton *et al*, 1984: 378). Dengan demikian dampak krisis telah menimbulkan penurunan tingkat kesehatan masyarakat (Lihat lampiran B hal. 107).

Di daerah pinggiran kota, gubuk-gubuk dibangun dengan menggunakan kaleng bekas maupun potongan kayu. Pemukiman tersebut dengan cepat meluas karena rakyat sudah tidak mampu membeli, maupun menyewa rumah sebab sudah tidak memiliki penghasilan. Para tunawisma tidur dalam mobil-mobil muatan barang, di taman-taman kota, maupun di lorong-lorong kereta bawah tanah. Sekitar 2.000.000

pria, kebanyakan pemuda dan anak-anak, turun ke jalan dan menumpang kereta muatan barang dari kota satu ke kota lain, untuk mendapatkan pekerjaan (Brinkley, 2007: 672). Pada kondisi tersebut tidaklah mengejutkan bahwa angka bunuh diri bangsa meningkat.

Di daerah pedesaan, kesulitan ekonomi dirasakan pula para petani. Harga-harga komoditas pertanian menurun 60 persen. Meski demikian, para petani mengejar harga-harga yang lebih rendah dengan memproduksi lebih banyak, agar memberikan kelebihan produksi (Norton *et al*, 1984: 378). Kelebihan produksi pertanian justru tidak dapat diekspor, karena permintaan asing telah menyusut. Para petani menggunakan hasil panennya sebagai bahan bakar, karena harga jualnya tidak sepadan dengan biaya angkut ke pasar. Pada musim kemarau tahun 1934 hama belalang menyerang tanaman petani sehingga terjadi kegagalan panen. Akibatnya petani tidak mampu membayar hutang bank, sehingga terpaksa kehilangan rumah, harta benda, dan tanah petani yang disita kreditor sebagai jaminan pembayaran hutang-hutangnya. Para petani penyewa mengalami kehidupan yang semakin sulit karena tidak bisa mengembalikan modalnya (Norton *et al*, 1984: 375-378). Di Amerika Serikat bagian selatan, kondisi lebih buruk dirasakan oleh orang-orang kulit hitam karena adanya diskriminasi ras di tempat kerja.

Diskriminasi ras dan jenis kelamin semakin meningkat. Apabila dalam sebuah pekerjaan ada pemecatan terhadap pekerja, maka para warga kulit putih diberhentikan paling akhir. Para ras kulit putih banyak menggantikan posisi pekerjaan orang-orang ras kulit hitam. Selain itu di Amerika Serikat bagian barat daya, terdapat papan tanda yang bertuliskan “Orang Negro, Orang Meksiko, atau Orang Miskin tidak diijinkan masuk”. Yaitu berarti perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam (Norton *et al*, 1984: 375-377). Pekerjaan yang semula milik orang-orang kulit hitam, diambil alih oleh orang-orang kulit putih. Pada waktu krisis ekonomi, pengangguran kulit hitam sampai tahun 1932 mencapai 50 persen, dua kali tingkat nasional (Davidson *et al*, 2006: 722-723). Diskriminasi terjadi pula pada orang Meksiko yang dikenal dengan *Chicanos*. Beberapa orang Meksiko, dipaksa untuk meninggalkan

negara dan daftar namanya dihapus untuk tidak menerima bantuan negara. Konsekuensinya bagi yang tetap bertahan maka akan menghadapi diskriminasi yang keras. Dengan demikian orang-orang kulit hitam hidupnya menjadi semakin memprihatinkan.

Selain kaum *Chicanos* diskriminasi serupa juga dirasakan pula oleh kaum Asia Amerika. Di California, yang merupakan populasi Jepang-Amerika dan Cina-Amerika terbesar, merasa sulit untuk masuk dalam profesi-profesi utama. Lulusan universitas Jepang-Amerika seringkali hanya bekerja di kios buah (Brinkley, 2007: 676). Setiap pekerjaan yang diperoleh dibayar sangat rendah baik di ekonomi industri atau jasa. Seperti kaum kulit hitam, kaum Asia Amerika seringkali kehilangan pekerjaan yang digantikan oleh kaum kulit putih. Kaum Cina Amerika atau yang biasa disebut *Nisei* pun bernasib tidak lebih baik. Mayoritas bekerja di *laundry* dan restoran yang dimiliki orang Cina. Akibat perlakuan diskriminasi itu, maka *Nisei* mencoba untuk memperjuangkan haknya melalui politik. *Nisei* mengorganisir *Japanese American Democratic Clubs* (Kelompok Demokratis Jepang Amerika) di beberapa kota (Brinkley, 2007: 677). Tujuannya adalah mengusahakan hukum perlindungan ras dan etnis minoritas dari diskriminasi. Pada waktu yang sama, beberapa pebisnis Jepang-Amerika dan para ahli mencoba untuk membentuk *Japanese American Citizens League* (Persatuan Warga Negara Jepang Amerika) di tahun 1930 untuk mendapatkan hak-haknya.

Krisis ekonomi juga telah menciptakan diskriminasi tersendiri bagi kaum wanita dengan cara memperkuat kepercayaan bahwa tempat yang pantas untuk seorang wanita adalah di rumah. Kebanyakan pria percaya bahwa dengan langkanya pekerjaan, pekerjaan yang ada seharusnya ditujukan untuk pria. Selain itu terdapat kepercayaan yang sangat kuat bahwa tidak ada wanita yang dapat menerima pekerjaan jika suaminya sudah bekerja (Brinkley, 2007: 677). Beberapa negara bagian bahkan mengesahkan undang-undang yang melarang perekrutan para wanita yang sudah menikah untuk jenis pekerjaan pegawai dan pelayanan sipil.

Krisis memberikan tekanan yang sangat besar pada keluarga, masyarakat, dan negara Amerika Serikat selama kepresidenan Herbert Hoover yang tidak mampu menghasilkan kebijakan efektif dalam mengatasi krisis. Presiden Hoover tetap menjunjung tinggi ideologinya yang disebut “sistem Amerika”. Kepercayaan Hoover bahwa semua individu bertanggung jawab atas keadaan pribadi sendiri, seperti pengangguran, kemiskinan dinyatakan sebagai kegagalan pribadi (Norton *et al*, 1984: 374). Perubahan dalam siklus bisnis yang bangkrut pada saat krisis merupakan hal yang wajar. Peran pemerintah hanyalah memantau dan mendorong perekonomian melalui regulasi. Akan tetapi krisis pada kenyataannya mengguncang budaya dan nilai-nilai materialisme dan tanggung jawab pribadi sebagai jati diri bangsa Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden Hoover yang sangat menjunjung tinggi kemandirian individu, kebebasan dalam bidang perekonomian tidak mampu mengatasi krisis. Pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi rakyat yang menuntut kehidupan yang lebih baik dan dapat keluar dari krisis. Hal tersebut dijawab oleh Franklin D. Roosevelt yang terpilih dalam pemilu tahun 1932 sebagai pengganti Hoover dengan memberikan program baru untuk menyeimbangkan anggaran belanja pemerintah, program pekerjaan umum, dan bantuan pengangguran. Franklin D. Roosevelt siap memberikan bantuan-bantuan langsung terhadap individu-individu, sehingga mendapat dukungan rakyat Amerika Serikat yang ingin segera keluar dari krisis.

4.2 Kondisi Ekonomi

Kehidupan perekonomian rakyat Amerika Serikat pada tahun 1920-1929 diwarnai dengan kemajuan yang dramatis. Pemerintah memberikan dukungan besar terhadap bisnis di Wall Street. Peristiwa *Bull market* merupakan kemajuan pesat bagi para pebisnis (Norton *et al*, 1984: 375). Harga pasar saham naik sangat tinggi, sehingga menarik para pebisnis untuk menginvestasikan simpanannya dengan cara berspekulasi dalam pasar saham. Dengan demikian perekonomian berjalan dengan baik yang ditunjang oleh kelancaran bisnis.

Pada September 1929, rata-rata harga saham meningkat di atas 40 persen. Saham dari industri utama digunakan untuk menentukan *Dow Jones Industrial Average* (Rata-rata Industri *Dow Jones*). Perdagangan menjamur hingga di atas lima juta dalam waktu satu hari, bahkan mencapai sebanyak 10 juta sampai 12 juta saham (Brinkley, 2007: 668). Hal tersebut dengan cepat menimbulkan peningkatan spekulatif, terutama ketika perusahaan-perusahaan mulai menawarkan kredit yang mudah. Perkembangan perekonomian yang berada pada tingkat tinggi tersebut tidak diantisipasi dengan persiapan pasar yang mulai jenuh dengan keberadaan barang produksi yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Perkembangan perindustrian yang mulanya mengalami kemajuan di tahun 1920-an akhirnya mengalami guncangan yang hebat pada tahun 1929 dengan terjadinya krisis ekonomi.

Mentalitas rakyat Amerika Serikat tergoyahkan. Pada bulan Oktober 1929 ketika harga-harga saham jatuh yang berdampak pada perekonomian nasional. Peristiwa tersebut terjadi pada 24 Oktober yang dikenal dengan peristiwa *Black Friday* (Jum'at yang Kelam). Hal tersebut mengakibatkan kepanikan pada bursa saham di New York karena para pemegang saham mulai menjual saham miliknya secara besar-besaran mencapai 12.894.560 lembar saham yakni dua kali lipat dari jumlah sehari sebelumnya yaitu 6.000.000 lembar saham. Selanjutnya pada hari selasa menjadi 16.410.030 lembar saham, sehingga pasar saham mengalami kerugian dan mencapai titik terendah pada 13 November (Norton *et al.*, 1984: 375-376). Keadaan tersebut kemudian berusaha diatasi dengan pemulihan sementara oleh J.P. Morgan and Company dan bankir besar. Hal tersebut dilakukan dengan cara memborong saham untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tindakan tersebut pada 29 Oktober di kenal dengan *Black Tuesday*. Walaupun berbagai cara telah dilakukan untuk menyelamatkan pasar, semua upaya tersebut mengalami kegagalan. Terdapat 16 juta andil saham diperdagangkan tetapi indeks industri menurun 43 poin. Saham bagi banyak perusahaan menjadi hampir tidak berharga (Brinkley, 2007: 668). Pada bulan-bulan selanjutnya, pasar terus mengalami penurunan. Kehancuran pasar

saham merupakan awal dari krisis ekonomi. Akan tetapi meskipun Oktober 1929 mungkin menjadi tanda dari krisis, akan tetapi krisis memiliki permulaan yang lebih awal. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi krisis ekonomi menjadi lebih besar dan berpengaruh pada berbagai bidang.

Kebijakan perekonomian pada kurun waktu sebelumnya turut mendorong runtuhnya perekonomian Amerika Serikat yakni kurangnya *diversifikasi* (pembedaan). Kemakmuran perekonomian nasional terlalu sering bergantung pada beberapa industri utama, khususnya konstruksi dan otomotif. Pada perkembangannya industri yang menopang perekonomian nasional, justru mulai mengalami kemunduran. Pengeluaran untuk konstruksi jatuh dari 11 milyar sampai di bawah sembilan milyar antara tahun 1926 dan 1929. Penjualan otomotif turun drastis sebanyak lebih dari sepertiga pada tahun 1929 (Brinkley, 2007: 669). Kemunduran dari industri-industri utama telah mendorong industri baru untuk mengisi kekosongan di antaranya ialah industri minyak tanah, bahan kimia, plastik, dan lainnya. Industri tersebut berorientasi menuju pasar yang berkembang untuk barang-barang konsumen. Akan tetapi pengembangan bisnis yang baru dirintis, belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mengimbangi kemerosotan di sektor-sektor lain. Dengan demikian pengembangan industri pada komoditas lain sudah terlalu terlambat dilakukan, karena stabilitas ekonomi telah melemah. Krisis membawa dampak bagi menurunnya permintaan konsumen terhadap barang-barang industri.

Produksi nasional Amerika Serikat hancur dari 104 milyar di tahun 1929 menjadi 76,4 milyar. Di tahun 1929, pebisnis Amerika Serikat telah menghabiskan 16,2 milyar dalam investasi modal, akan tetapi pada tahun 1933, menurun yakni hanya menginvestasikan sepertiga milyar. Pada tahun 1932 diperkirakan penurunan tersebut mencapai 25 persen. Pendapatan kotor pertanian menurun dari 12 milyar menjadi 5 milyar dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu, sampai tahun 1932, menurut anggaran belanja secara relatif kasar pada waktu itu, 25 persen tenaga kerja Amerika menganggur, dari sisi lain para pekerja mengalami pemotongan gaji atau jam kerja (Brinkley, 2007: 671). Hal tersebut memberikan gambaran kemunduran

perekonomian Amerika Serikat. Kondisi demikian, tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, akan tetapi daerah-daerah pedesaan perekonomiannya juga mengalami kemunduran. Hal itu dapat dilihat dari menurunnya pendapatan dari hasil pertaniannya (Lihat lampiran B. Hal 119).

Di daerah-daerah pedesaan dalam banyak hal keadaan menjadi lebih buruk. Kebijakan partai Republik di bidang pertanian, sangat tidak adil. Pemerintah lebih memprioritaskan kemajuan dalam bidang perindustrian, sehingga bidang pertanian menjadi prioritas kedua. Akibatnya pendapatan pertanian menurun antara tahun 1929 dan 1932. Kelebihan produksi merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya harga-harga pertanian (Mackie, 1964: 131). Menurunnya permintaan akan bahan mentah dari hasil pertanian berpengaruh terhadap kerugian negara-negara pertanian. Dampaknya, sepertiga dari seluruh petani Amerika kehilangan tanahnya, karena tidak mampu membayar hutang terhadap bank.

Di Amerika Serikat bagian selatan, kondisi memburuk terjadi di wilayah pertanian *Great Plains* yang mengalami bencana alam. Mulai tahun 1930 wilayah tersebut, mengalami penurunan curah hujan yang diiringi oleh peningkatan suhu panas. Peristiwa tersebut dikenal sebagai *Dust Bowl* (Mangkuk Debu), membentang ke utara dari Texas sampai ke wilayah Dakota. Kemarau berlangsung selama satu dekade. Bencana alam menjadikan kawasan yang sebelumnya merupakan daerah pertanian subur menjadi gurun. Di Nebraska, Iowa, dan negara-negara bagian lainnya, suhu panas mencapai 100 derajat (Brinkley, 2007: 674). Keadaan tersebut sungguh menyiksa kehidupan daerah pedesaan, yang menyebabkan tingkat kesehatan menurun. Selain itu, hama belalang menyerang tanaman petani sehingga petani mengalami gagal panen.

Ekonomi pertanian selama tahun 1930-an memproduksi lebih banyak daripada yang mampu konsumen beli. Harga pertanian turun sangat rendah hingga petani tidak menghasilkan keuntungan sama sekali dari hasil panennya. Selain itu, masalah yang dihadapi para petani ialah struktur kredit ekonomi yang kacau, menyulitkan para petani. Para petani yang terjepit hutang terpaksa menggadaikan

tanahnya akibat merosotnya harga panen (Brinkley, 2007: 674). Di Amerika Serikat Bagian selatan, banyak petani kulit hitam dan putih mengembara dari satu kota ke kota lain, berharap untuk menemukan pekerjaan atau bantuan. Sebagai akibat, banyaknya petani yang menjadi pengangguran.

Faktor lainnya yang membebani rakyat Amerika Serikat ialah distribusi daya beli yang tidak merata sebagai akibatnya, ialah turunnya permintaan konsumen. Bahkan di tahun 1929, setelah hampir satu dekade rakyat Amerika Serikat hidup di bawah garis kemiskinan (Brinkley, 2007: 668). Ketika produksi industri dan pertanian meningkat, justru keuntungan yang diberikan kepada petani, pekerja, maupun konsumen sangat kecil. Sampai pada tahun 1929 pabrik-pabrik hanya memproduksi lebih banyak barang dari pada yang konsumen beli. Dampaknya industri-industri tersebut mengalami penurunan permintaan dan mulai memecat para pekerja. Bahkan dalam rangka menyelamatkan industri, perusahaan seringkali mengurangi tenaga kerja karena adanya teknologi baru.

Pada tahun 1929 ketika perekonomian sedang lemah, para pekerja semakin sulit menemukan pekerjaan. Nilai-nilai materialisme dan tanggung jawab pribadi ikut terguncang. Pengangguran meningkat mencapai 20-25% di Amerika mencapai 13 juta pengangguran (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 460). Meningkatnya pengangguran yang diikuti oleh upah yang lebih rendah, berpengaruh terhadap berkurangnya daya beli. Padahal masyarakat merupakan bagian terbesar dari pasaran konsumen. Masalah tersebut kurang mendapat tanggapan pemerintahan Presiden Hoover. Pemerintah tidak dapat mengeluarkan pembayaran tambahan bagi para penganggur karena menurunnya pendapatan pajak yang diterima negara.

Pemecahan masalah pengangguran dengan memberi bantuan pekerjaan umum, menggunakan dana pemerintah sangat ditentang oleh Presiden Hoover. Hoover beranggapan bantuan yang diberikan pemerintah hanya akan memberikan dampak deflasi yang lebih lanjut, namun pemerintah juga tidak memberikan solusi konstruktif untuk dapat keluar dari krisis (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 470). Akibatnya timbul pemikiran bahwa pengangguran hanya bisa diatasi dengan

dihapuskannya kapitalisme atau merubah dasar-dasarnya dengan memakai defisit financing, hal ini seperti yang disarankan oleh Franklin D. Roosevelt.

Tindakan-tindakan pemerintah dalam berbagai lapangan ekonomi menjadi sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat seperti pada saat krisis berlangsung. Hal ini menandakan bahwa teori *laissez-faire* secara otomatis tidak dapat dipertahankan. Bantuan pemerintah dibutuhkan untuk menolong para pengangguran, sehingga kebijakan pemerintah dikeluarkan untuk melindungi perindustrian dalam negeri dengan melakukan rasionalisasi pada berbagai bidang untuk mencegah produksi berlebih (Mackie, 1964: 131-132). Oleh sebab itu pemerintah harus lebih berusaha mengadakan pemulihan ekonomi, dengan mendistribusikan pendapatan nasional secara merata. Tujuannya agar dapat menopang daya pembelian masal dalam ekonomi konsumen. Selain itu tindakan pemerintah terhadap sistem perbankan harus diperkuat dan disempurnakan untuk mengembalikan kepercayaan publik, yang menurun akibat krisis.

Keadaan krisis membawa Franklin D. Roosevelt seorang politisi dan ahli komunikasi politik, dalam program percobaan-percobaan yang tidak lazim dilakukan, namun rasional untuk dijalankan. Pada suatu masa ketika lawan politiknya Hoover menguasai sebagian besar surat kabar. Franklin D. Roosevelt untuk memanfaatkan radio untuk menyampaikan pesannya secara langsung kepada masyarakat terhadap perbaikan kondisi Amerika Serikat. Sejak pertengahan tahun 1930-an, lebih dari 2/3 rakyat Amerika Serikat memiliki radio. Dengan demikian, sangat tepat penggunaan media radio sebagai sarana penyampaian visi, misi Franklin D. Roosevelt masa depan Amerika Serikat dengan berbagai program perbaikan sosial, ekonomi, dan politik.

Franklin D. Roosevelt pandai menarik dukungan rakyat Amerika Serikat dalam kebijakan baru. Franklin D. Roosevelt memberikan arti modern untuk istilah "liberalisme." Pada abad ke-19, liberalisme telah menjadi pandangan bagi pemerintahan Amerika Serikat yang terbatas dalam perekonomian pasar bebas. Akan tetapi Franklin D. Roosevelt menggunakan liberalisme untuk menggambarkan negara yang besar, aktif dan sadar secara sosial. Pada pidato Franklin D. Roosevelt

mensejajarkan definisinya tentang kebebasan sebagai perlindungan bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Dengan demikian Franklin D. Roosevelt telah mereklamasi kata “kebebasan” dari makna konservatif dengan menjadikannya kebebasan secara luas bagi pemerintah pusat untuk menyelamatkan rakyat melalui program *New Deal*. Franklin D. Roosevelt secara konsisten menghubungkan kebebasan dengan perlindungan ekonomi bagi semua golongan. Dengan demikian Franklin D. Roosevelt telah memberikan arah baru bagi kehidupan rakyat Amerika secara keseluruhan. Pada akhirnya pemerintah memberikan bantuan langsung atas gagasan yang diberikan Franklin D. Roosevelt dengan adanya dukungan rakyat. Berbagai kebijakan yang membela kepentingan rakyat yang mendesak akibat krisis mendapat respon positif oleh kongres, sehingga secara bersama-sama program pemulihan ekonomi yang digagas melalui program *New Deal* dapat berjalan.

4.3 Kondisi Politik

Pada tahun 1929 krisis ekonomi tengah mengancam struktur perekonomian nasional. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis. Akan tetapi pemerintahan Presiden Hoover yang menganut politik liberal konservatif enggan untuk bertindak lebih jauh menggunakan kekuasaan pemerintah. Presiden Hoover beranggapan pemerintah hanya perlu melengkapi sistem perekonomian dengan kerjasama individualisme dan menyokong para pebisnis menuju ekonomi yang sukses (Brinkley, 2007: 685-686). Krisis yang bermula tahun 1929, akhirnya memaksa Presiden Hoover untuk berurusan dengan masalah-masalah baru yang mencakup kehidupan sosial maupun ekonomi negara.

Usaha yang dilakukan Presiden Hoover ialah dengan mengembalikan kepercayaan publik dalam segi ekonomi. Kemudian Presiden Hoover mengumpulkan pemimpin perusahaan, buruh, dan pertanian di Gedung Putih untuk merencanakan program kerjasama sukarela (Brinkley, 2007: 686). Hoover, meminta kepada pebisnis untuk tidak memotong produksi atau memecat pegawai. Selain itu, Hoover

memerintahkan kepada pemimpin buruh untuk tidak meminta kenaikan upah, sehingga perekonomian dapat tetap berjalan.

Kenyataannya krisis telah menjangkau setiap aspek kehidupan rakyat Amerika Serikat secara keseluruhan. Keruntuhan perekonomian Amerika Serikat yang berujung pada krisis ekonomi merupakan masalah sosial yang menyangkut wewenang pemerintah pusat untuk bertanggung jawab menanganinya. Krisis bukan hanya masalah individu-individu. Akan tetapi Presiden Hoover memiliki pandangan sendiri mengenai bantuan. Usaha Hoover dalam mengatasi krisis kurang begitu besar. Walaupun dengan kekuasaannya sebagai presiden dapat mendorong kongres untuk meloloskan kebijakan mengatasi krisis dengan lebih cepat, khususnya program bantuan untuk menyelamatkan rakyat (Davidson *et al*, 2006: 723-724). Sebab bantuan pemerintah pusat terhadap rakyat sangat dibutuhkan, sehingga krisis dapat segera ditangani.

Selanjutnya Presiden Hoover memberikan bantuan layanan kota yang diberikan pemerintah melalui pajak yang dikumpulkan, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan hampir 30 persen penduduk tidak mampu membayar pajak, sedangkan sekitar 30 juta orang di seluruh negeri membutuhkan bantuan dana. Pada akhir tahun 1931, Detroit, Boston dan beberapa kota lain mengalami kebangkrutan akibat ekonomi yang tidak stabil. Banyak negara bagian yang terlilit hutang akibat sistem perekonomian yang kacau. Pajak pokok yang dikumpulkan menyusut sedangkan pengeluaran begitu besar dalam masa-masa krisis. Peristiwa tersebut membuat kota-kota di Amerika Serikat menuntut pada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan yang diwujudkan dalam program *Temporary Emergensi Relief Administration* (Pemberian Bantuan Darurat Sementara/TERA) (Davidson *et al*, 2006: 724). Bantuan yang diberikan hanya untuk pemulihan ekonomi yang telah hancur. Akan tetapi tidak membantu secara langsung terhadap pengangguran.

Pada pertengahan tahun 1931, kondisi ekonomi semakin memburuk sehingga memaksa Presiden Hoover untuk bertindak lebih jauh. Amal swasta menjadi salah

satu program Hoover. Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan bantuan pada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan. Akan tetapi sedikitnya jumlah bantuan yang dikeluarkan oleh swasta mengakibatkan program tersebut tidak berhasil (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 461). Meskipun programnya gagal, Presiden Hoover telah melakukan upaya menangani krisis walaupun tidak secara langsung melibatkan peran pemerintah. Presiden Hoover menyadari adanya peningkatan pengangguran yang telah menurunkan permintaan konsumen. Dengan demikian, Hoover telah menjalankan sebuah program aktivisme pemerintah yang belum pernah dilakukan presiden sebelumnya, akan tetapi tidak maksimal. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahannya yang diharuskan demikian.

Presiden Hoover telah melakukan upaya terbaiknya, untuk meningkatkan perekonomian negara dengan mengesahkan *Smoot-Hawley Tariff* yang disahkan pada tanggal, 17 juni 1930 untuk melindungi industri Amerika Serikat dari barang-barang luar negeri yang murah. Kebijakan ini menetapkan tarif bea cukai yang sangat tinggi terhadap barang-barang impor dari Eropa. Akan tetapi kebijakan *Smoot-Hawley Tariff* justru menimbulkan malapetaka bagi perekonomian nasional. Kebijakan *Smoot-Hawley Tariff* ditujukan pada negara-negara Eropa yang menjual barang-barang industrinya di Amerika Serikat dengan pajak yang tinggi. Pendapatan pajak tersebut berguna bagi pemulihan perekonomian (Norton *et al*, 1984: 380). Akan tetapi kebijakan tersebut justru menghambat perdagangan karena mendapat pembalasan dari negara-negara luar dengan mengurangi penjualan produk Amerika Serikat di luar negeri. Akibat kecerobohan Presiden Hoover dalam mengambil keputusan membuat krisis di Amerika Serikat menjadi semakin buruk. Kehidupan rakyat menjadi lebih sulit, keadaan tersebut ditangani Hoover dengan mengupayakan menekan potongan pajak melalui kongres di tahun 1930. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan membeli konsumen. Kebijakan Presiden Hoover telah memberikan keringanan terhadap rakyat, namun disisi lain merugikan negara karena anggaran belanja pusat menjadi tidak seimbang. Pada akhirnya Hoover membatalkan

kebijakannya dengan tetap teguh terhadap pandangan politiknya tanpa campur tangan pemerintah.

Pada intinya Hoover dengan mantap percaya bahwa kapitalisme akan pulih dengan sendirinya. Anggaran pusat yang seimbang dapat mengembalikan kepercayaan perusahaan. Apabila terlalu banyak tindakan pemerintah, dikhawatirkan akan menghancurkan sistem ekonomi yang ingin Hoover selamatkan. Oleh sebab itu Presiden Hoover memberikan kebijakan untuk meningkatkan pajak di tahun 1932. Tujuannya ialah untuk menggali investasi dan konsumsi, namun hal ini justru memperberat beban hidup rakyat.

Perekonomian yang telah hancur, turut mempengaruhi sistem perbankan Amerika Serikat. Di bawah tekanan dari kongres, Presiden Hoover melakukan tindakan yang paling berani untuk menyelamatkan bank. Antara tahun 1930 dan 1932 kira-kira 5100 bank gagal karena penabung yang panik menarik dananya. Presiden Hoover bersama kongres setuju untuk pembentukan *Reconstruction Finance Corporation* (Rekonstruksi Lembaga Keuangan/RFC) di tahun 1932 (Davidson *et al*, 2006: 725). RFC merupakan sebuah lembaga yang dapat meminjamkan uang kepada bank, lembaga pengutang perusahaan asuransi dan perusahaan kereta api. Tiga bulan setelah pembentukan RFC, telah memberikan perubahan dengan menurunnya kegagalan perbankan dari 70 bank seminggu menjadi satu setiap dua minggu. RFC bahkan memberikan dana bagi pemerintah lokal untuk membantu proyek pekerjaan umum. Tidak seperti beberapa program Hoover sebelumnya, program RFC beroperasi dalam skala besar. Pada tahun 1932, RFC mempunyai anggaran 1,5 milyar untuk pekerjaan umum (Brinkley, 2007: 686). Meskipun demikian, RFC gagal dalam pemulihan perekonomian. RFC hanya meminjamkan dana kepada lembaga-lembaga keuangan dengan jaminan yang cukup. Dana RFC hanya mengalir ke bank-bank besar dan perusahaan besar. Selanjutnya, atas desakan Hoover, RFC hanya membantu keuangan proyek pekerjaan umum. Di atas semua itu, RFC tidak mempunyai cukup uang untuk membuat pengaruh yang kuat dan nyata pada waktu krisis, bahkan dalam program RFC dana tidak dikeluarkan semua. Dari 300 juta yang tersedia untuk

membantu upaya-upaya bantuan lokal, RFC hanya meminjamkan 30 juta di tahun 1932.

Sejak awal Presiden Hoover memang telah menolak rencana bantuan pemerintah pusat untuk para pengangguran. Hal ini bukan karena presiden tidak sensitif jauh dari itu, Hoover takut bahwa program bantuan, akan merusak inisiatif berusaha untuk mandiri, bahkan kemungkinan program bantuan pemerintah dapat menciptakan kelas bawah secara permanen. Birokrasi yang bertanggung jawab menjaga ketertiban penerima dikhawatirkan hanya akan membawa dampak serentetan korupsi serta pemborosan. Presiden Hoover beranggapan bahwa keramahtamahan dan kerjasama akan cukup membantu individu Amerika Serikat untuk pulih.

Pada waktu situasi semakin memburuk, akhirnya Presiden Hoover pelan-pelan melunakkan pendiriannya mengenai bantuan pemerintah pusat. Pada tahun 1932 Hoover mengizinkan Kongres untuk menjalankan Bantuan Darurat. Hal ini memberi kuasa RFC untuk meminjamkan sampai 1,5 milyar untuk pekerjaan umum seperti jembatan tol dan pembersihan daerah kumuh. Akan tetapi dari dana 1,5 milyar anggaran pekerjaan umum, hanya dikeluarkan sekitar 20 persen yakni sebesar 300 juta. Walaupun demikian 300 juta merupakan jumlah yang sedikit sekali pada waktu krisis (Davidson *et al*, 2006: 726). Akhirnya berbagai program yang dijalankan Hoover menemui kegagalan. Hoover telah berupaya keras akan tetapi presiden tidak mau keluar terlalu jauh mengenai bantuan pusat terhadap rakyatnya. Hoover terlalu terikat pada pandangan politiknya yang justru membawa negara mengalami krisis lebih lama. Akibatnya kebijakan Hoover menjadi kurang efektif menimbulkan berbagai protes dari rakyat Amerika Serikat.

Kekacauan terjadi diberbagai wilayah, kaum pekerja yang mengalami pemotongan upah dan pemecatan masal merespon hal tersebut dengan cara melakukan demonstrasi dan pemogokan di berbagai tempat di negara-negara bagian. Pada tahun 1932, sekelompok pemilik pertanian berkumpul di Des Moines, Iowa untuk membentuk sebuah organisasi baru yang bernama *Farmers' Holiday Association* (Asosiasi Petani *Holiday*). Tujuan dibentuknya organisasi tersebut adalah

mendorong pemotongan pajak produk pertanian dari pasar. Protes tersebut dilakukan akibat kebijakan pemerintah yang merugikan petani. Selain itu protes yang lebih besar terjadi pada masa pemerintahan Hoover yakni ketika sebuah pergerakan protes muncul dari para veteran Perang Dunia I. Pada tahun 1932, kongres telah menyetujui pembayaran sebanyak \$1000 sebagai bonus bagi para veteran, uang tersebut akan dibayarkan mulai tahun 1945. Akan tetapi pada tahun 1932 banyak veteran meminta uang tersebut agar segera dibayarkan (Brinkley, 2007: 687). Pada bulan Juni, lebih dari 20.000 veteran menyatakan diri sebagai *Bonus Expeditionary Force* (Angkatan Berkenaan dengan Bonus) atau yang lebih dikenal *Bonus Army* (Tentara Bonus). Para demonstran berbaris menuju Washington, membangun kemah-kemah di sekeliling kota serta menempati gedung-gedung pemerintahan. Protes akan terus dilakukan sampai kongres menyetujui tuntutan untuk membayar bonus bagi para veteran. Pada saat krisis tentu dana tersebut sangat dibutuhkan oleh para veteran, akan tetapi kondisi perekonomian negara juga sedang tidak stabil. Hoover menolak permohonan veteran, hal tersebut terpaksa dilakukan Hoover untuk menjaga anggaran keseimbangan negara.

Keberadaan para demonstran yang terus-menerus di Washington sangat memalukan Presiden Hoover. Pada Juli 1932, Presiden Hoover memerintahkan polisi Washington D.C. untuk mengusir para demonstran yang berada di gedung-gedung Federal. Tindakan Hoover mendapat reaksi perlawanan dari para demonstran dengan melemparkan batu kepada polisi. Polisi melepaskan tembakan yang mengakibatkan dua veteran terbunuh (Norton *et al*, 1984: 379). Pertempuran-pertempuran kecil tersebut meyakinkan Presiden Hoover untuk memberi tugas para tentara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasukan tentara yang dipimpin Jenderal Douglas MacArthur, Kepala Staf Angkatan Darat menjalankan tugas dari Presiden Hoover dengan bantuan dari ajudannya, Dwight D. Eisenhower. Akan tetapi tindakan Jenderal Douglas MacArthur sangat melampaui perintah presiden. Jenderal Douglas MacArthur memimpin Kavaleri di bawah komando George S. Patton dua resimen infanteri dengan enam tank melakukan pengejaran terhadap para veteran di

Pennsylvania Avenue, serta memerintahkan para prajurit untuk membakar tenda para demonstran di kota sampai rata dengan tanah. Tindakan tersebut menyebabkan lebih dari 100 demonstran terluka (Brinkley, 2007: 688). Hoover menyebut insiden ini sebagai bukti dari kekerasan dan radikalisme yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah pusat. Dimata rakyat insiden tersebut merupakan kekecewaan terhadap kedudukan politik Hoover yang semakin buruk. Pada masa kepresidenan Herbert Hoover pada akhirnya tidak mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi krisis.

Pada bidang politik dan budaya bangsa, krisis ekonomi telah membangkitkan aliran kuat radikalisme dan protes bagi rakyat Amerika Serikat untuk keluar dari krisis. Presiden Hoover seringkali mengabaikan saran dari kongres untuk mengeluarkan keputusan yang berpihak pada rakyat dalam bentuk bantuan sosial. Pada akhirnya Presiden Hoover menyadari bahwa kapitalis yang diidamkan untuk memajukan kesejahteraan umum serta membangun suatu kemajuan yaitu masyarakat yang tidak tereksplotasi. Namun Presiden Hoover akhirnya menyadari bahwa para pebisnis tidak mendekati cita-cita ini.

Pada konvensi di Chicago, kaum Republikan masih sibuk dengan kampanye Hoover dan mendukung program dalam mengatasi krisis. Di sisi lain Demokrat bersama Franklin D. Roosevelt, gubernur New York yang memberikan isyarat mengenai masa depan Amerika Serikat. Franklin D. Roosevelt mematahkan semua yang selama krisis dijadikan teladan bangsa Amerika Serikat yaitu perekonomian yang bebas tanpa campur tangan pemerintah. Cita-cita Hoover ternyata tidak mampu mengatasi krisis. Oleh karena itu Franklin D. Roosevelt, memberikan harapan baru bagi rakyat Amerika Serikat dengan pernyataannya “Saya berjanji kepada kalian, saya berjanji kepada diri sendiri untuk sebuah program baru bagi orang Amerika”. Franklin D. Roosevelt berjanji untuk menyeimbangkan anggaran belanja, memberikan pekerjaan umum dan bantuan kepada pengangguran (Davidson *et al*, 2006: 727-728). Pada kampanyenya Franklin D. Roosevelt juga berjanji untuk membantu perusahaan yang mengalami kebangkrutan, serta kesejahteraan bagi buruh

dan kaum kulit hitam. Franklin D. Roosevelt selanjutnya memberikan banyak tanda tentang bagaimana program tersebut nantinya dapat membawa rakyat keluar dari krisis.

Franklin D. Roosevelt merupakan seorang pria muda dengan karier politik yang cemerlang. Franklin D. Roosevelt sebelumnya pernah menjabat pada sebuah kedudukan badan pembuat undang-undang Senat New York, Franklin D. Roosevelt menuju ke posisi sebagai asisten sekretaris angkatan laut selama Perang Dunia I, sampai pada pencalonannya untuk wakil presiden di tahun 1920. Kurang dari satu tahun kemudian, Franklin D. Roosevelt terkena serangan polio. Meskipun Franklin D. Roosevelt tidak pernah mendapatkan kembali kakinya dan hanya dapat berjalan dengan menggunakan tongkat penopang, Franklin D. Roosevelt mampu membangun kekuatan fisik yang cukup untuk kembali dalam dunia politik di tahun 1928. Ketika Al Smith menerima pencalonan presiden dari Demokrat, Franklin D. Roosevelt terpilih menggantikannya sebagai gubernur, sehingga pada tahun 1930, Franklin D. Roosevelt dengan mudah memenangkan pemilihan ulang sebagai gubernur di New York.

Franklin D. Roosevelt tidak menghasilkan keajaiban di New York, namun Franklin D. Roosevelt cukup memprakarsai program-program positif mengenai bantuan pemerintah. Hal tersebut menghadirkan Franklin D. Roosevelt sebagai pemimpin yang lebih giat dan imajinatif daripada Hoover. Sebagai hasilnya Franklin D. Roosevelt mampu mengumpulkan sebuah koalisi yang besar dalam partai dan memenangkan pencalonan partainya. Franklin D. Roosevelt, telah memainkan peranan politik dengan luar biasa. Franklin D. Roosevelt menyatakan dirinya siap untuk memberikan bantuan langsung kepada individu-individu, sehingga membuat Hoover sangat marah. Kampanye tersebut lebih dari sebuah persaingan antara dua orang, lebih dari sebuah pertandingan antara dua partai melainkan juga antara dua filsafat pemerintahan.

Pada pidato Franklin D. Roosevelt dalam pencalonan partai Demokrat untuk presiden di tahun 1932. Franklin D. Roosevelt menjanjikan sebuah program *New*

Deal bagi masyarakat Amerika untuk keluar dari krisis. Franklin D. Roosevelt menekankan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memberi jaminan bagi setiap orang, akan tetapi Franklin D. Roosevelt juga mendukung anggaran belanja pemerintah pusat yang berimbang. Bangsa Amerika yang putus asa di tahun 1932 mengharapkan terhadap kepemimpinan baru, dan Franklin D. Roosevelt memenangkan kemenangan telak. Franklin D. Roosevelt mendapat 57 persen dari suara populer, dan partai Demokrat menjuarai secara menyeluruh di Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (Forner, 2005:699-700).

Dampak dari Krisis telah membawa Franklin D. Roosevelt ketika menjadi Presiden, untuk bereksperimen dengan ide-ide yang tidak lazim. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan ekonomi nasional yang berubah. Pada pelaksanaan Programnya Franklin D. Roosevelt dibantu oleh banyak profesor perguruan tinggi. Franklin D. Roosevelt meyakini *New Deal* sebagai suatu alternatif untuk mengatasi krisis. Franklin D. Roosevelt berharap dapat merekonsiliasi demokrasi, kebebasan individu, dan perencanaan ekonomi.

**BAB 5. PELAKSANAAN KEBIJAKAN FRANKLIN DELANO
ROOSEVELT MENGATASI KRISIS EKONOMI DI AMERIKA SERIKAT
TAHUN 1933-1939**

Pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt mengatasi krisis ekonomi di Amerika Serikat tahun 1933-1939, pada hakikatnya lebih mengarah kepada pemulihan perekonomian yang menyangkut bidang sosial dan bidang ekonomi dengan memperluas kekuasaan pemerintah federal dalam menghadapi situasi genting akibat krisis. Secara garis besar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Franklin D. Roosevelt tujuannya untuk membawa Amerika Serikat keluar dari krisis. Program tersebut dilakukan secara langsung untuk membantu rakyat Amerika Serikat yang merasakan dampak krisis melalui bantuan pemerintah. Tujuannya mengarah pada perbaikan kehidupan sosial rakyat Amerika Serikat, pemulihan ekonomi pertanian, industri dan stabilitas keuangan. Pelaksanaan kebijakan membutuhkan peran besar dari pemerintah federal. Oleh sebab itu, pada uraian ini akan membahas kebijakan Franklin D. Roosevelt mengatasi krisis ekonomi di Amerika Serikat dengan usahanya melalui kongres untuk memperluas kekuasaan pemerintah dalam menstabilkan kembali perekonomian yang telah terguncang sejak tahun 1929.

5.1 Kebijakan di Bidang Sosial

Masuknya pemerintah federal ke dalam program yang sangat luas, dengan memberi bantuan langsung terhadap rakyat merupakan suatu penyimpangan yang tajam dari tradisi sebelumnya. Peran besar pemerintah dianggap hanya akan merusak karakter bangsa. Karakteristik bangsa Amerika Serikat adalah individualisme. Orang-orang Amerika memiliki semangat untuk hidup bebas, sehingga muncul jiwa mandiri atau individualistik untuk tetap *survive* (Krisnadi, 2012: 326-327). Akan tetapi petaka yang ditimbulkan oleh krisis telah memberikan perubahan terbesar bagi

pola pikir rakyat Amerika Serikat yang menyangkut peran pemerintah di dunia ekonomi. Datangnya krisis ekonomi, telah menyingkirkan doktrin *Laissez Faire* yang menjadi prinsip perekonomian di Amerika Serikat, dengan bentuk persaingan bebas diantara kaum kapitalis dalam usaha mendapatkan akumulasi kapital yang sebesar-besarnya. Perekonomian Amerika Serikat hanya dikuasai oleh kaum kapitalis, sedangkan tingkat daya beli masyarakat tidak dapat menjangkau harga pasar. Pada saat krisis, rakyat pada umumnya memandang pemerintah sebagai faktor berpengaruh yang dapat menyelamatkan perekonomian rakyat melalui bantuan pemerintah (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 488). Hal ini tidak terlepas dari peran besar seorang Franklin D. Roosevelt untuk menginsyafkan pemerintah akan terancamnya keamanan individu. Pemerintah berkewajiban untuk menyelamatkan korban-korban dari ekonomi kapitalis, mengingat pemerintahan sebelumnya dengan tegas menolak memberikan bantuan langsung.

Pada dasarnya beban pengangguran akan terlalu berat jika hanya ditangani oleh pemerintah lokal atau lembaga kemanusiaan swasta di dalam masyarakat industri. Oleh karena itu, pemerintah federal harus bertanggung jawab menangani petaka ekonomi. Tindakan berani Franklin D. Roosevelt dengan melibatkan pemerintah secara langsung pada waktu krisis merupakan suatu kekuatan untuk membangkitkan semangat rakyat. Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai kebijakan pemerintahan F. D. Roosevelt di bidang sosial.

5.1.1 Kebijakan Bagi Pekerja (buruh)

Kehidupan Amerika Serikat tidak terlepas dari dunia perindustriannya. Perekonomian nasional sebagian besar disokong oleh kegiatan pabrik. Oleh karena itu peran buruh sangatlah besar di dalamnya. Pabrik-pabrik di Amerika Serikat pada permulaan tahun 1930-an merupakan pemerintahan diktator kecil. Berlangsungnya krisis telah memberikan pengaruh besar terhadap perindustrian yang semakin menurun. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya industri-industri yang gulung tikar. Akibatnya kehidupan para pekerja menjadi sangat memprihatinkan dengan upah

rendah dan jam kerja yang panjang. Meski demikian para pekerja terpaksa bertahan mengingat sangat sulit sekali memperoleh pekerjaan dimasa krisis. Selain itu para pekerja sering diperlakukan sewenang-wenang oleh para mandor dan dipecat sesuka hati. Hal ini sering terjadi karena serikat kerja masih jarang ada (Forner, 2005: 709). Pada tahun-tahun sebelum krisis, dalam komunitas industri yang tersebar dilintas negara. Pemerintah dengan mantap memberikan dukungan serta dorongan dalam dunia industri, akan tetapi tidak diiringi dengan sikapnya untuk melindungi para pekerja. Tindakan sewenang-wenang majikan kurang begitu mendapat perhatian. Oleh sebab itu, para pekerja menuntut adanya kenaikan upah dan penghentian terhadap kekuasaan majikan yang sewenang-wenang ditempat kerja serta pemberian kebebasan sipil bagi para pekerja. Semua tujuan tersebut memerlukan adanya pengakuan serikat kerja.

Pada masa Franklin D. Roosevelt terpilih sebagai presiden telah memberikan kembali harapan pada para buruh. Franklin D. Roosevelt dalam program kebijakannya *National Recover Adjustment/NRA* (Lembaga Pemulihan Nasional), yang dibentuk tahun 1933 bersamaan dengan pemunculan Undang-Undang pemulihan Industri Nasional (*National Industrial Recovery Act/ NIRA*). Adanya undang-undang tersebut turut menyangkut perbaikan bagi para pekerja. NRA menjamin hak buruh untuk melakukan perundingan secara kolektif melalui perwakilan buruh terhadap pengusaha. Pada perkembangannya tahun 1935 kongres meloloskan Undang-undang hubungan tenaga kerja atau *National Labor Relations Act* (Francis, 2004: 295). Tujuannya untuk mendorong pengusaha mengakui serikat kerja. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai larangan bagi perusahaan mempengaruhi serikat kerja dengan sogokan serta membeda-bedakan dalam merekrut tenaga kerja. Dengan demikian undang-undang tersebut telah memperkuat kedudukan buruh untuk mendapatkan hak-haknya.

Selanjutnya, peraturan tersebut juga melahirkan lembaga Dewan Hubungan Buruh Nasional atau *National Labor Relations Board*. Dewan Hubungan Buruh Nasional bertugas untuk mengawasi proses tawar menawar dengan pimpinan

perusahaan, untuk melaksanakan pemilihan pengurus serikat serta menjamin hak buruh dalam memilih organisasi yang dapat mewakili aspirasinya dalam memperoleh haknya. Sejak saat itu, tidak sah bagi seorang majikan bertindak tidak adil dengan serta merta mencegah aktivitas serikat kerja di dalam perusahaannya (Norton *et al*, 1984: 387-388). Kemajuan besar dalam organisasi buruh membuat para pekerja merasa memiliki kepentingan bersama. Pada masa *New Deal* inilah serikat pekerja mencapai prestasi yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dengan demikian adanya kebijakan Franklin D. Roosevelt menjadikan kekuatan serikat kerja tidak hanya di dunia industri tetapi juga di dunia politik. *Revitalization* partai Demokrat telah membentuk suatu koalisi politik baru yang sangat kuat dari buruh.

Munculnya sebuah pergerakan serikat kerja merupakan salah satu perkembangan sosial dan politik yang paling penting. Hal ini sebagai jawaban atas upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kekuatan serikat. Pada tahun 1930an, terdapat faktor-faktor yang sebelumnya menghalangi gerakan buruh untuk mendapatkan haknya. Peraturan para pebisnis melarang dengan tegas keberadaan serikat kerja. Militansi buruh yang berkembang pertama menjadi jelas di tahun 1934, ketika para pekerja yang terorganisir terinspirasi oleh ketentuan-ketentuan perundangan dari *National Industrial Recovery Act*. Bantuan pemerintah dengan berbagai kebijakannya ternyata tidak cukup untuk membesarkan hati *American Federation of Labor* (Federasi Buruh Amerika) (Brinkley, 2007: 701). AFL hanya terikat kepada buruh terampil, sehingga mengabaikan pekerja tidak terampil yang menjadi bagian terbesar tenaga buruh industri. AFL hampir tidak pernah mengatur wanita atau pekerja kulit hitam. Dengan demikian AFL menghindari industri utama seperti karet, automobil, dan baja.

Kondisi tersebut ditanggapi oleh John L. Lewis yang berjuang untuk membentuk serikat pekerja bagi pekerja tidak terampil. John L. Lewis memiliki sifat keras, kharismatik, dan praktis. Lewis bertugas mengepalai *United Mine Workers* (Persatuan Pekerja Tambang/UMW) yang merupakan cabang dari AFL. Ketika John L. Lewis bertemu Franklin D. Roosevelt, presiden menginginkannya untuk

bergabung dengan serikat UMW, dalam satu tahun mempunyai 400.000 anggota. Hal tersebut menaikkan semangat Lewis untuk menyerukan pembentukan *Steel Workers' Organizing Committee* (Komite Pengurus Pekerja Baja/SWOC) dan pengakuan *United Auto Workers* (Persatuan Pekerja Otomotif/UAW) ke dalam AFL (Brinkley, 2007: 701-702). Pada rapat tahunan AFL di Atlantic City tahun 1935, Lewis meminta adanya persetujuan kepada Organisasi Industri Pekerja Produksi Besar. Akan tetapi para delegasi, kebanyakan dari serikat pengrajin, menolak permintaan tersebut. Kejadian tersebut membuat Lewis sangat kecewa. Lewis bertekad mematahkan dominasi AFL, melalui serikat industri yang didirikannya. Beberapa minggu kemudian, Lewis dan kepala dari tujuh serikat AFL lainnya mengumumkan pembentukan *Committee for Industrial Organization* (Komite Organisasi Industri/CIO).

Perjuangan serikat diawali dengan mogok duduk oleh para pekerja. Perwakilan CIO berkonsentrasi pada industri baja. Para pekerja karet di Akron, Ohio, hanya duduk di tempat kerja di awal tahun 1936 sebagai aksi pemogokan. Sejak para pemogok menempati pabrik-pabrik, para manajer tidak dapat mengganti pemogok dengan pekerja lain. Tidak pula bagi perusahaan karet dapat memanggil tentara atau polisi untuk menggagalkan aksi pemogokan. Hal tersebut dapat beresiko karena properti perusahaan mungkin saja dirusak oleh para pemogok. Serikat pekerja lain seperti para pemimpin *United Rubber Workers Union* (Persatuan Pekerja Karet) menentang “pemogokan duduk,” namun ketika Perusahaan Goodyear Tire & Rubber memecat 70 pekerja. Pada akhirnya 1400 pekerja karet, ikut melakukan pemogokan kerja. Adanya aksi pemogokan tersebut akhirnya Perusahaan Goodyear mengakui keberadaan serikat dan menerima tuntutan mengenai upah dan jam kerja (Davidson *et al*, 2006: 743).

Pemogokan terbesar lainnya juga meletus pada industri otomotif. Serangkaian pemogokan secara spontan di pabrik-pabrik General Motors di Atlanta, Kansas City, dan Cleveland menyebar ke Fisher Body di Flint, Michigan, di akhir Desember tahun 1936. Para pekerja mengambil alih pabrik sementara sesama anggota serikat

membantu memberikan makanan dan baju. Polisi lokal mencoba untuk memutuskan jalur pasokan tersebut, namun malah justru mendapatkan perlawanan. Kekerasan berdarah menyertai beberapa kampanye. Pada *Memorial Day* (Hari Peringatan) tahun 1937, terdapat 10 pemogok kehilangan nyawa mereka ketika polisi Chicago menembak para buruh yang akan menuju pabrik Republic Steel. Para pekerja tidak terampil mempunyai suara yang sangat kuat dalam CIO. Serikat tidak terampil memiliki anggota melebihi pengrajin dari AFL sebanyak lebih dari satu juta. Keanggotaan wanita dalam serikat menjadi tiga kali lipat antara tahun 1930 dan 1939, dan orang Afrika Amerika juga mendapat keuntungan. Serikat-serikat independen telah menjadi bagian yang berarti dari industri Amerika (Davidson *et al*, 2006: 744-745).

Pemerintah memainkan peran yang penting dalam pergerakan serikat industri dengan menciptakan sebuah lingkungan yang ramah bagi buruh. Franklin D. Roosevelt bersikap ramah terhadap para pekerja, baik terorganisir maupun tidak. Pemerintahan Franklin D. Roosevelt telah memberikan para buruh kesempatan untuk berorganisasi dan memperoleh perlindungan hukum. Pemimpin Serikat Kerja seperti John L. Lewis, Walter Reuther dari *United Auto Workers*, dan Philip Murray dari *Steel Workers' Organizing Committee* yang berjuang bagi para pekerja, telah mendapatkan kemenangan bagi para pekerja. Pada perkembangannya di tahun 1938, pemerintah dengan sukses mendukung undang-undang buruh, yaitu *Fair Labor Standards Act* (Undang-Undang Standar Adil Buruh), yang pertama kali menetapkan upah minimum nasional dan jam kerja selama empat puluh jam dalam satu minggu. Selain itu juga menempatkan batasan ketat pada pekerja anak (Brinkley, 2007: 708).

Selanjutnya ketika *Wagner Act* menjadi undang-undang, telah menciptakan bentuk organisasi yang lebih efektif dengan cepat mendapatkan kekuatan dalam jajaran buruh. *National Labor Relations Act*, yang lebih dikenal sebagai UU Wagner, jauh lebih efektif. Undang-Undang Wagner menjamin karyawan berhak untuk berorganisasi, serta bergabung dalam organisasi buruh, untuk tawar-menawar kolektif melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri, dan untuk terlibat dalam kegiatan

bersama untuk tujuan perundingan bersama. Selain itu, terdapat pembatasan khusus pada apa yang bisa dilakukan manajemen dengan menetapkan lima praktik manajemen yang tidak adil (Norton *et al*, 1984: 387-388). Pelaksanaan ketentuan ini, melalui undang-undang yang ditetapkan membentuk *National Labor Relations Board/NLRB* yang memberikan kewenangan tidak hanya untuk mengeluarkan perintah terhadap majikan yang melanggar undang-undang, tetapi juga untuk menentukan unit tawar-menawar yang tepat dan untuk melakukan pemilihan perwakilan. Dengan demikian, bagian dari Undang-Undang Wagner menandai titik balik yang penting dalam hubungan pekerja serta manajemen perusahaan. John L. Lewis, presiden Serikat Pekerja Tambang, memimpin perjuangan untuk perserikatan industry dalam AFL, namun ditolak, sehingga Lewis membentuk Committee for Industrial Organization (dikenal setelah tahun 1938 sebagai Congress of Industrial Organization) yang tujuannya adalah membawa pekerja tidak terampil ke dalam serikat pekerja.

5.1.2 Kebijakan Bagi Kaum Miskin

Bagi orang biasa, pengangguran merupakan dampak yang paling parah dari krisis. Pengangguran merata diseluruh wilayah Amerika Serikat, menggerogoti segala lapisan dan sektor kehidupan masyarakat (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 493). Krisis mendorong rakyat serta pemerintah untuk menyadari dan mengambil keputusan keluar dari doktrin agung *Laissez Faire*, mengingat kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan 1930-an tidak pernah efektif menurunkan jumlah jutaan penganggur.

Pada masa pemerintahan Franklin D. Roosevelt pertumbuhan bantuan oleh pemerintah pusat terhadap rakyat terus mengalami perbaikan. Meskipun Franklin D. Roosevelt tidak mempertimbangkan pemberian bantuan langsung bagi para pengangguran sebagai tugasnya yang paling penting. Tindakan-tindakan pertamanya ketika menjabat adalah pembentukan *Federal Emergency Relief Administration* (Administrasi Bantuan Darurat Pusat/FERA), yang dikeluarkan pada tanggal, 12

Maret 1933 dengan memberikan dana bantuan tunai kepada negara-negara bagian untuk menyokong lembaga-lembaga bantuan yang bangkrut. Program tersebut dilaksanakan oleh direktur lembaga bantuan Negara Bagian New York, Harry Hopkins dengan mengeluarkan dana bantuan secara luas dan cepat sebesar 500 juta dollar. Tujuannya untuk membantu negara-negara bagian, kota-kota, dan industri dengan sistem pinjaman. Namun baik Hopkins maupun Franklin D. Roosevelt mempunyai perasaan khawatir tentang pemberian bantuan langsung dari pemerintah federal (Brinkley, 2007: 698). Franklin D. Roosevelt lebih senang dengan bentuk lain pertolongan pemerintah melalui bantuan pekerjaan. Dengan demikian ketika dana bantuan FERA tidak cukup memperbaiki keadaan, maka pemerintah membuat sebuah program kedua yakni *Civilian Conservation Corps* (Badan Konservasi Sipil/CCC).

Pada 21 Maret 1933 Franklin D. Roosevelt meminta pemasukan-pemasukan besar bantuan dari tiga jenis satuan pekerjaan yang disebut *Civilian Conservation Corps* (Badan Konservasi Sipil/CCC). Bantuan uang tunai langsung kepada negara-negara bagian untuk memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan dan proyek-proyek pekerjaan umum. Kongres menyetujui CCC, yang akhirnya menempatkan 2,5 juta pekerja dalam program tersebut (Norton *et al.*, 1984: 383). CCC dimaksudkan untuk menyediakan pekerjaan kepada jutaan pemuda berusia 18-25 tahun yang tidak dapat menemukan pekerjaan di kota. CCC membuat kemah-kemah di taman-taman nasional dan hutan. Para pemuda bekerja dalam lingkungan semimiliter pada proyek-proyek penanaman pohon, membangun waduk, mengembangkan taman, dan memperbaiki irigasi pertanian. Sebagian besar pekerjaan terbatas bagi kaum kulit putih, namun beberapa disediakan bagi kaum kulit hitam, orang Meksiko, dan orang Indian. Program CCC mayoritas dikerjakan oleh kaum laki-laki akan tetapi para wanita yang memiliki akses untuk jenis pekerjaan lain seperti halnya proyek menjahit. Bantuan langsung yang diberikan pemerintah pada tahapan selanjutnya lebih mengarah pada bantuan pemberian pekerjaan umum. Hal tersebut dapat memberikan pertolongan bagi para penganggur untuk memperoleh pendapatan.

Sementara itu, antara November 1933 dan April 1934, Franklin D. Roosevelt lebih gencar mengadakan program pekerjaan umum. Lebih lanjut program tersebut dikembangkan dalam, *Civil Works Administration* (Administrasi Pekerjaan Sipil/CWA) (Brinkley, 2007: 698). CWA telah menempatkan lebih dari 4.000.000 orang untuk bekerja pada proyek-proyek sementara. Beberapa proyek bertujuan jangka panjang, seperti pembangunan jalan, sekolah, taman, gedung pengadilan dan bandara. Akan tetapi pada akhirnya, CWA dibubarkan pada tahun 1934 akibat biaya yang terus naik. Selain itu terdapat pertentangan bahwa *New Deal* sedang menciptakan kelas masyarakat Amerika yang bergantung pada bantuan pemerintah secara permanen. Namun, Franklin D. Roosevelt terus menjalankan program untuk menanggulangi pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja (Francis, 2004: 292). Dengan demikian, bagi Franklin D. Roosevelt yang terpenting adalah dapat memompa stimulus fiskal dalam perekonomian, sehingga programnya dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

Sebulan sebelumnya kongres juga telah menyetujui sebuah program *New Deal* yang sangat penting dalam rangka perbaikan kehidupan rakyat akibat krisis. *Tennessee Valley Authority/TVA*, pada 18 Mei 1933 merupakan gagasan pekerjaan umum dalam *New Deal* sebagai rencana perubahan perekonomian nasional. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat memberikan kemajuan pada wilayah yang melintasi Lembah Tennessee, Carolina Utara, Kentucky, Virginia, Mississippi, Georgia, dan Alabama. Kewenangan Lembah Tennessee atau *Tennessee Valley Authority (TVA)*, yang merupakan salah satu hasil dari *Hundred Days* (Norton *et al*, 1984: 383-384). TVA merupakan rencana pemerintah yang bersifat progresif. Tujuan TVA ialah peningkatan kesejahteraan ekonomi dari keseluruhan lembah Sungai Tennessee (Forner, 2005: 704-705). TVA dibangun sebagai sebuah perusahaan umum dengan dewan pengurus yang terdiri dari tiga direktur yaitu, Arthur E. Morgan sebagai ketua, Harcourt Morgan, dan David E. Lilienthal. Kekuasaan TVA mencakup produksi, distribusi, dan penjualan energi listrik, menyediakan air untuk didistribusikan, dan penyediaan pupuk nitrogen pada industri

maupun bagi penduduk yang berada di daerah tersebut. Secara luas manfaat yang di dapatkan dari program TVA bagi masyarakat yang diwujudkan dengan menyediakan konstruksi untuk jaringan listrik untuk pertanian dan desa-desa yang sebelumnya tidak memiliki listrik dengan tarif yang murah, sehingga terjangkau bagi penduduk desa.

Sebelum adanya TVA sumber daya alam di daerah Tennessee telah dieksploitasi, pohon-pohon di daerah tersebut ditebang secara besar-besaran, sehingga daerah sekitar Lembah menjadi rusak, jika terjadi hujan lebat maka sangat berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, dengan program TVA diharapkan dapat mencegah dan mengendalikannya. Di tahun-tahun pertamanya, *New Deal* telah menyokong sejumlah besar usulan undang-undang perbaikan ekonomi, telah meraih peningkatan dalam produksi dan stabilitas perekonomian. Akan tetapi pencapaian tersebut belum sepenuhnya menghapus krisis di Amerika Serikat. Dengan demikian, TVA telah menempatkan pemerintah pusat untuk pertama kalinya dalam bisnis penjualan listrik yang bersaing dengan perusahaan swasta. Hal itu merupakan peninjauan program perencanaan regional yang menghimbau pengembangan ekonomi secara nasional.

Permasalahan lain yang muncul ketika ancaman krisis mulai menurun, ialah tututan dari para pelaku bisnis yang meratapi tamatnya *Laissez-Faire*. Di bawah kungkungan peraturan NIRA, para pebisnis mengeluh karena NIRA dianggap pilih kasih. Para organisasi buruh banyak mendapatkan keuntungan, sedangkan ketetapan pajak yang tinggi ditanggung para pengusaha. Pola berpikir yang bertemakan permusuhan mulai tampak nyata diantara masyarakat bisnis atas kebijakan pemerintah. Serangan keras terhadap *New Deal* datang dari politik sayap kanan maupun kiri (Davidson *et al*, 2006: 733-734). Pertentangan kuat turut dilakukan oleh Huey P. Long, seorang senator yang sangat progresif dari Louisiana. Long menganggap kebijakan pemerintah telah memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Sebagai gubernur Louisiana, Long mendorong adanya reformasi dengan

pembangunan jalan raya, sekolah, dan rumah sakit baru semuanya dibayar dengan pajak.

Huey Long bukanlah seorang yang berambisi hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Long begitu peka terhadap kekecewaan yang dirasakan orang miskin, di wilayah pedalaman South tempat kelahirannya. Long memperoleh dukungan untuk mencapai kekuasaan dengan menggunakan ketidakpuasaan masyarakat sebagai perlawanannya terhadap pemerintah. Meskipun Long pada awalnya telah mendukung Franklin D. Roosevelt, Long kecewa dengan *New Deal*. Hal tersebut dikarenakan program Franklin D. Roosevelt masih mementingkan para pebisnis, pemilik modal yang turut mengendalikan perekonomian.

Pada Februari 1934, Huey Long berorasi lewat radio nasional untuk menawarkan solusinya terhadap krisis ekonomi. Distribusi kekayaan yang tidak merata merupakan masalah bagi rakyat Amerika Serikat. Oleh karena itu Long menawarkan program Berbagi Kekayaan sebagai solusi mengatasi krisis. Dibawah moto “Setiap Orang itu Raja”. Long menjanjikan program Berbagi kekayaan pada setiap keluarga yang akan mendapatkan \$5.000. Programnya akan memberikan pendapatan tahunan sebesar \$2.000 sampai \$3.000 serta pemberian dana pensiunan yang cukup. Selain itu program berbagi kekayaan, mencakup program untuk pendidikan perguruan tinggi gratis bagi mahasiswa yang cerdas. Pada jangkauan lebih luas kebijakan Long turut mengatur pula jam kerja bagi para buruh yakni 30 jam kerja dalam seminggu, dan 11 bulan kerja dalam satu tahun. Bagi para petani, rencana Long menjanjikan bahwa pemerintah akan menaikkan dan menstabilkan harga komoditas pertanian dengan membeli kelebihan produksi petani. Untuk menjalankan programnya, pemerintah akan mengatur undang-undang perpajakan untuk mengambil alih kekayaan bagi setiap keluarga yang memiliki kelebihan harta \$5.000.000 serta bagi setiap orang yang berpenghasilan diatas \$1.000.000 pertahun (Clark *et al*, 1982: 247-248). Melalui program berbagi kekayaannya popularitas Long menyebar dengan cepat.

Sampai pada tahun 1935, satu tahun setelah berdirinya, organisasi *Share Our Wealth* Long memiliki anggota 27.000 klub dengan data berisi hampir delapan juta nama anggota pengikutnya. Kemajuan dari gerakan Long, sangat mengkhawatirkan bagi posisi partai Demokrat. Jika Long sampai mendapatkan empat juta suara di tahun 1936, maka Long dapat menempatkan dirinya dalam Gedung Putih. Namun di akhir tahun 1935, tepat ketika Long berada di koridor gedung DPR Louisiana, Long ditembak mati oleh seseorang yang tidak terima, akibat keluarganya telah diperlakukan tidak adil oleh organisasi politik Long (Davidson *et al*, 2006: 736). Setelah kematiannya gerakan berbagi kekayaan perlahan-lahan sirna. Akan tetapi pertentangan terhadap program *New Deal* tidak berhenti, ketika seorang Pendeta bernama Charles Coughlin turut menentang program Franklin D. Roosevelt.

Pendeta Charles Coughlin merupakan rekan Long yang ikut menentang kebijakan *New Deal*. Coughlin menyalahkan banker di Wall Street dan para kapitalis yang serakah sebagai penyebab terjadinya krisis. Pada awalnya Coughlin merupakan pendukung Franklin D. Roosevelt, sampai akhir tahun 1934. Akan tetapi selanjutnya Coughlin, menjadi kecewa yang dinyatakan sebagai kegagalan presiden untuk menangani krisis. Pada musim semi 1935, Coughlin membentuk organisasi politik *National Union for Social Justice* (Persatuan Nasional untuk Keadilan Sosial). Pendeta Charles Coughlin menarik pendengar radio melalui siaran mingguan dari *Shrine* di pinggiran kota Detroit. Coughlin berjanji untuk mengakhiri krisis dengan cara sederhana menasionalisasikan bank, inflasi mata uang dengan perak, serta menyebarkan pekerjaan (Davidson *et al*, 2006: 737; Brinkley, 2007: 700). Coughlin sampai tahun 1937 dikenal, sebagai seorang pembela perubahan sistem perbankan. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mengembalikan kemakmuran dan menjamin keadilan ekonomi di Amerika Serikat.

Satu tantangan lain terhadap *New Deal* datang dari Dr. Francis Townsend. Dokter berumur 67 tahun merupakan seorang pensiunan rumah sakit di California. Francis Townsend tergerak oleh keadaan yang memprihatinkan, kaum tua Amerika yang tidak mempunyai perencanaan dana pensiun serta asuransi kesehatan. Townsend

membangun *Old Age Revolving Pensions* (Peredaran Dana Pensiun Masa Tua) di tahun 1934 (Davidson *et al*, 2006: 737). Townsend mengusulkan pemerintah untuk membayar \$200 sebulan bagi yang berusia 60 tahun atau lebih yang telah berhenti dari pekerjaannya. Meskipun rencana tersebut secara keuangan mustahil, namun pergerakannya mempunyai daya tarik yang tinggi. Sampai pada tahun 1936 klub Townsend mempunyai 3,5 juta anggota, yang sebagian besar meliputi pengusaha kecil dan para petani di usia pensiun (Norton *et al*, 1984: 386).

Para penentang *New Deal*, Huey Long, Coughlin, Townsend, dan kritikus lainnya memiliki tujuan yang sama yakni ingin keluar dari krisis. Meskipun solusi yang diajukan sederhana, masalah yang dituju serius, meliputi distribusi kekayaan yang tidak merata, kekurangan persediaan uang, serta keadaan kaum tua yang tidak memiliki jaminan hari tua. Penentang *New Deal* menyerang peningkatan kontrol perusahaan, bank, dan pemerintah di atas individu. Oleh sebab itu para penentang *New Deal* ingin menciptakan gerakan politik massa berdasarkan ketidakpuasan sosial maupun ekonomi. Tujuannya ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi kebebasan serta persamaan rakyat Amerika Serikat dari campur tangan perusahaan besar maupun pemerintahan atas rakyat.

Usaha Franklin D. Roosevelt demi perbaikan kehidupan rakyat Amerika Serikat melalui program *New Deal* tidaklah mudah. Selain tantangan-tantangan dari berbagai golongan kanan dan kiri, maupun pebisnis kebijakan *New Deal* terancam pula oleh Mahkamah Agung. Pada Januari 1935, di *Panama Refining Co.v Ryan*, Mahkamah membekukan bagian dari NIRA. Kemudian pada 27 Mei Mahkamah Agung dengan suara bulat menjatuhkan keseluruhan NIRA (*Schechter v. U.S.*) atas dasar bahwa NIRA telah memberikan kekuasaan perundang-undangan terhadap Gedung Putih dan ketentuan perdagangan. Padahal dalam konstitusi Amerika Serikat tidak memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur bisnis antar-negara bagian. Oleh sebab itu program perbaikan industri Franklin D. Roosevelt telah dibekukan. Pada Januari 1936 program pertaniannya mengalami nasib yang sama ketika Mahkamah memutuskan AAA (*U.S. v. Butler*) tidak berlaku, dengan alasan

bahwa pertanian merupakan permasalahan daerah. Dengan demikian, berdasarkan Amandemen Kesepuluh, masalah pertanian hanya tunduk kepada tindakan negara bagian saja (Norton *et al*, 1984: 385). Sampai tahun 1935 Franklin D. Roosevelt berada dalam bahaya karena kehilangan kekuatannya untuk memimpin dan memerintah. Koalisinya dengan semua kepentingan mulai terputus, kaum radikal dan para pemimpin rakyat mulai menawarkan program alternatif kepada warga Amerika Serikat dan Mahkamah Agung mulai membuat *New Deal* tidak berlaku lagi.

Berbagai kritik tajam yang dialamatkan kepada program *New Deal* tidak membuat Franklin D. Roosevelt menyerah dalam usahanya untuk memperbaiki krisis ekonomi. Franklin D. Roosevelt tidak pernah berpikir untuk melawan para pengkritiknya melalui debat publik, namun pada pesannya kepada kongres tahun 1935 menjelaskan bahwa Franklin D. Roosevelt sedang mempersiapkan *New Deal* dalam bentuk baru (reform). Pada musim semi tahun 1935, Franklin D. Roosevelt mengambil inisiatif dalam *New Deal* dan memperoleh beberapa kemenangan terbesarnya. Begitu mengesankannya perundang-undangan baru yang disebut *New Deal* Kedua. Sampai tahun 1935 gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintahannya mendorong Franklin D. Roosevelt untuk bertindak lebih banyak begitu pula terhadap kongres. Kemenangan Demokrat lebih dari dua pertiga di kedua majelis. Demokrat berupaya untuk memenangkan presiden dalam memperluas jangkauan *New Deal*. Seratus hari dari April sampai pertengahan Juli, Franklin D. Roosevelt telah menghasilkan sekumpulan undang-undang yang menggerakkan *New Deal* menuju tujuan akhir. Pemerintah dapat mengurangi pengaruh industrialisme, serta melindungi kaum miskin, dan mengganti kerugian untuk siklus bisnis yang bangkrut.

Demi membantu kebanyakan orang Amerika yang masih tidak memiliki pekerjaan Franklin D. Roosevelt selanjutnya mengajukan *Emergency Relief Appropriation Act* (Undang-Undang Pemberian Bantuan Darurat) terhadap kongres pada tahun 1935. Dana yang diajukan sebesar 4,8 milyar untuk bantuan dan pengangkatan kerja. Sebagian uang diberikan kepada *National Youth Administration* (Administrasi Pemuda Nasional). Adanya program ini telah merekrut lebih dari 4,5

juta para pemuda untuk pekerjaan umum. Akan tetapi sebagian yang lebih besar diberikan kepada *Works Progress Administration* (Administrasi Perkembangan Pekerjaan/WPA).

Di bawah pimpinan Harry Hopkins yang telah menyusun program WPA, telah mengubah wujud fisik Amerika Serikat yakni kemajuan dalam pembangunan. WPA setidaknya telah mempekerjakan 8,5 juta orang untuk membangun 100.000 sekolah, kantor pos, jalan lebih dari 500.000 mil dan 600 bandara. Disamping itu pekerja WPA diajari kelas seni membuat peta dengan huruf Braille bagi tunanetra di Massachusetts, dan membuat perpustakaan keliling dengan memanfaatkan tenaga kuda melewati bukit-bukit di Kentucky (Davidson *et al*, 2006: 738). Dampak krisis tidak hanya menimpa para pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaannya, akan tetapi hal serupa turut dialami oleh pekerja kantor, para profesional dan bahkan dokter. Oleh sebab itu pada program WPA turut mempekerjakan para tenaga profesional tersebut dalam program pekerjaan umum pemerintah. Selama delapan tahun pelaksanaan WPA berhasil membangun dan memperbaiki 124.031 jembatan, membangun 651.087 jalan tol, jalan raya, membangun 125.110 fasilitas umum, 8.142 taman-taman, dan 853 jalan lapangan terbang.

Bantuan langsung yang diberikan pemerintah bukanlah sekedar menangani pengangguran. Walaupun berbagai program tersebut bersifat sementara dalam arti masih pada tahap perkembangan. Akan tetapi berbagai program perbaikan nasib rakyat merupakan tindakan yang paling tepat dari pandangan baru mengenai kesejahteraan. Meskipun pada kenyataannya masih banyak masalah mengenai pengangguran, akan tetapi segera dapat dipecahkan. Perkembangan bantuan pengangguran dari proyek pekerjaan umum sampai menjadi suatu lembaga, merupakan sebuah pengakuan betapa pentingnya bantuan tersebut bagi rakyat Amerika Serikat. Pada tahun 1936 pemerintah federal sangat memperhatikan nasib rakyat yang menganggur (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 495). Pemerintah tidak hanya sekedar menyelamatkan kehidupan, tetapi juga memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keterampilan yang

dimiliki. Padahal program pekerjaan semacam itu belum pernah ada pada masa pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang menarik dan bermanfaat, bagi para penganggur.

Arah baru dalam bantuan *Social Security* dimaksudkan terutama untuk memenuhi tujuan-tujuan jangka panjang. WPA juga memperlihatkan fleksibilitas yang luar biasa dalam menawarkan bantuan kepada penganggur yang pekerjaannya tidak berkaitan dengan kategori bantuan sosial manapun. *Federal Writers Project* (Proyek Penulis Federal) dari WPA, telah memberikan kesempatan bagi para penulis yang menganggur untuk melakukan pekerjaan dan menerima gaji dari pemerintah di bawah pimpinan Harry Hopkins. *Federal Arts Project* (Proyek Seni Federal), dengan cara yang sama, membantu pelukis dan pemahat untuk melanjutkan karirnya yang sempat terhenti ketika krisis berlangsung. Selain itu, *Federal Music Project* (Proyek Musik Federal) dan *Federal Theater Project* (Proyek Teater Federal) mengatur produksi konser dan sandiwara, untuk menciptakan pekerjaan bagi musisi, aktor, dan sutradara yang menganggur. Selain itu, lembaga-lembaga bantuan lainnya muncul bersamaan dengan WPA. Pada bidang pendidikan pemerintah melalui *National Youth Administration* (Administrasi Pemuda Nasional/NYA) memberikan bantuan pekerjaan serta beasiswa kepada pelajar usia SMA dan perguruan tinggi. Lebih jauh lagi pemerintah pusat juga memberikan keringanan berupa *Emergency Housing Division* (Divisi Perumahan darurat) dari *Public Works Administration* memulai perumahan umum yang di danai pemerintah pusat (Brinkley, 2007: 703-704). Dengan demikian, pemerintahan Franklin D. Roosevelt telah memberikan perhatian penuh terhadap rakyat Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai kalangan. Bantuan tersebut tentu tidak mungkin rakyat dapatkan pada sektor swasta.

Rakyat Amerika Serikat sama-sama dalam kesusahan di tahun 1930-an. Namun sistem kesejahteraan yang baru telah menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan cara yang sangat berbeda. Bagi pria, pemerintah berkonsentrasi terutama dalam bantuan pekerjaan pada program-program seperti CCC, CWA, dan WPA, kesemuanya didominasi oleh pria dan melalui *Social Security Act* dana

pensiun dan jaminan pengangguran, pada awalnya disusun untuk membantu kebanyakan pria. Sedangkan bantuan pemerintah bagi wanita bukanlah bantuan pekerjaan melainkan bantuan tunai khususnya melalui program *Social Security Aid to Dependent Children* (Bantuan bagi Anak-Anak yang Menjadi Tanggungan), yang dimaksudkan sebagian besar untuk para ibu tunggal. Perbedaan dalam perlakuan ini mencerminkan sebuah anggapan yang tersebar luas bahwa pria merupakan bagian terbesar dari tenaga kerja yang dibayar dan bahwa wanita butuh diperlakukan dalam kaitannya dengan keluarga. Akan tetapi faktanya, jutaan wanita sudah dipekerjakan sampai pada tahun 1930-an. Dengan demikian pemerintahan Franklin D. Roosevelt telah memberikan kesempatan untuk perbaikan hidup bagi semua golongan yang mencakup pria maupun wanita ke dalam program *New Deal*.

5.1.3 Kebijakan Bagi Kelas Menengah

Kepemilikan rumah bagi banyak anggota kelas menengah, menjadi sebuah tanda kehormatan seseorang di Amerika Serikat. Bagi para pekerja, kepemilikan rumah akan memberikan perlindungan ekonomi pada saat upah rendah, pekerjaan tidak menentu, dan mobilitas pekerjaan yang terbatas. Akan tetapi dampak krisis telah menghancurkan industri perumahan Amerika. Pembangunan tempat tinggal semuanya dihentikan, bank, dan asosiasi pinjaman yang membiayai kepemilikan rumah ikut bangkrut (Forner, 2005: 706). *New Deal* bersama pemerintah secara sistematis memasuki pasar perumahan. Franklin D. Roosevelt berbicara mengenai perlindungan rumah sebagai hak dasar serta perlindungan jaminan sosial. Pada tahun 1933 dan 1934, pemerintahannya bergerak dengan tanggap untuk melindungi para pemilik rumah dari pencabutan hak milik dan mendorong pembangunan rumah-rumah baru. Perusahaan Pinjaman Pemilik Rumah dan Penyelenggaraan Perumahan Pemerintah Pusat (FHA) mengasuransikan jutaan hipotek jangka panjang yang dikeluarkan oleh bank swasta (Forner, 2005: 707). Pada waktu yang sama, pemerintah pusat sendiri membangun ribuan unit perumahan berharga sewa rendah. Kebijakan perumahan *New Deal* menunjukkan sebuah permulaan yang luar biasa dari

pemerintah. Kepemilikan rumah menjadi lebih murah bagi sebagian besar penduduk Amerika Serikat untuk membeli rumah dari pada menyewa apartemen.

Selain di daerah perkotaan, jangkauan program *New Deal* juga meliputi wilayah kehidupan di desa. *Farm Credit Administration* (Administrasi Kredit Pertanian), yang dalam dua tahun membiayai kembali seperlima dari seluruh hipotek pertanian di Amerika Serikat, adalah satu jawaban terhadap masalah tersebut. Undang-Undang *Farm Credit Administration* memungkinkan beberapa petani untuk mendapatkan kembali tanahnya bahkan setelah penyitaan hipotek-hipoteknya. Meskipun terdapat upaya-upaya seperti itu, akan tetapi 25 persen dari keseluruhan pemilik pertanian Amerika telah kehilangan tanahnya. Para pemilik rumah sama-sama bermasalah, pada bulan Juni 1933 pemerintah membentuk *Home Owners' Loan Corporation* (Badan Hukum Pinjaman Pemilik Rumah), yang sampai tahun 1936 telah membiayai kembali hipotek lebih dari 1 juta pemilik rumah (Brinkley, 2007: 698). Setahun kemudian, kongres membentuk *Federal Housing Administration* (Administrasi Perumahan Pusat) untuk mengasuransikan hipotek bagi konstruksi baru dan perbaikan rumah.

Jawaban pemerintah atas permasalahan kepemilikan rumah, yaitu dengan dibentuknya Lembaga Pinjaman Pemilik Rumah (HOLC). Di bawah wewenang sebuah penetapan kongres pada bulan Juni 1933. HOLC dibentuk bukan untuk memberikan pinjaman hipotek baru melainkan untuk mengambil alih semua dan para pemilik rumah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pemilik hipotek mengembalikan dokumen kepada HOLC dan menerima sertifikat bursa saham yang baru. Dengan demikian, HOLC merupakan perantara untuk meringankan penderitaan para pemilik hipotek seperti halnya para pemilik rumah yang mengalami kesulitan (Harlow, 1961: 721). Perundang-undangan tambahan menyediakan dana sentral selanjutnya untuk dipinjamkan bagi pemeliharaan harta benda serta dana lain bagi pembangunan baru.

Secara keseluruhan, pemerintah menjadi faktor tunggal terbesar dalam bisnis kepemilikan rumah. Kemudian di tahun 1937 kongres mengesahkan Penetapan

Perumahan Nasional, yang membentuk Kewenangan Perumahan Amerika Serikat. Tujuan usaha baru ini ialah menyediakan pinjaman sentral kepada kotamadya untuk membangun perumahan baru bagi masyarakat dengan kelompok pendapatan rendah. Pinjaman ini dikeluarkan untuk dijalankan selama 60 tahun dengan bunga 3 persen. Struktur baru perlu dibangun dengan apa yang telah ada di daerah kumuh, dan bangunan yang lama harus di bersihkan sebagai bagian dari proyek pembersihan daerah kumuh. Dengan demikian program pemulihan ekonomi pasca krisis terus berjalan, dengan memperhatikan kepentingan berbagai golongan baik kaum miskin maupun golongan menengah. Kebijakan Franklin D. Roosevelt menjangkau setiap area kehidupan rakyat Amerika Serikat secara keseluruhan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan sosial.

5.1.4 Kebijakan Bagi Perlindungan dari Krisis di Masa Mendatang

Pada awal pelaksanaan *New Deal*, para pejabat pemerintah khususnya *Secretary of Labor* (Menteri Tenaga Kerja) Frances Perkins, telah melobi sebuah sistem jaminan sosial yang dibiayai pemerintah pusat bagi kaum tua dan para pengangguran. Pada tahun 1935, Franklin D. Roosevelt memberikan dukungan publik atas *Sosial Security Act* (Undang-Undang Jaminan Sosial), yang disahkan kongres di tahun yang sama. Undang-undang Jaminan Sosial menetapkan beberapa program yang berbeda. Bagi kaum tua, terdapat dua macam bantuan yakni bantuan yang diberikan pemerintah pusat pada kaum miskin sebesar \$15 sebulan dan bantuan dalam program jangka panjang dengan memasukkan para pekerja dalam sistem pensiun (Brinkley, 2007: 702). Kategori pekerja yang menerima dana pensiun mencakup profesi pembantu rumah tangga dan buruh pertanian. Undang-undang jaminan sosial merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam membangun program sosial negara yang penting bagi kaum tua. Program tersebut dibiayai atas kontribusi rakyat yang bekerja dengan cara membayar pajak gaji yang nantinya akan memberikan pendapatan pensiunan hari tua.

Program bantuan digagas Franklin D. Roosevelt untuk masa mendatang. Pemerintah dengan program jangka panjang yakni *Social Security Act* tahun 1935 yang menciptakan sebuah sistem jaminan bagi pengangguran, yang akan dibiayai para pengusaha sendiri, sehingga ketika para pekerja diberhentikan dari pekerjaannya tetap menerima bantuan pemerintah untuk sementara waktu. Undang-undang *Social Security Act* menetapkan sebuah sistem bantuan pemerintah pusat yang kemudian diperluas bagi penyandang cacat serta program bantuan bagi anak-anak yang menjadi tanggungan pemerintah. Para penyusun *Social Security Act* ingin menciptakan sebuah sistem jaminan bagi anak-anak yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. Program-program terbesar pensiun hari tua dan jaminan pengangguran dalam banyak hal mirip dengan program-program jaminan swasta, dengan kontribusi dari para pekerja (Brinkley, 2007: 703). Dengan demikian program Franklin D. Roosevelt melalui undang-undang *Social Security Act* telah memberikan bantuan langsung yang cukup besar bagi kebutuhan kaum tua, penyandang cacat, dan anak-anak terlantar yang menjadi tanggung jawab negara. Komitmen Franklin D. Roosevelt terhadap program *Social Security* merupakan dasar untuk *welfare state* modern bagi masa depan Amerika Serikat.

Hasilnya, *Social Security* (perlindungan sosial) muncul sebagai suatu hibrida pembiayaan nasional dan lokal, dengan pengawasan, dan standar yang memenuhi syarat. Pensiunan usia lanjut diatur secara nasional akan tetapi dibayar dengan pajak atas para pegawai dan majikan. Pajak-pajak serupa juga dibayarkan untuk pembayaran terhadap pengangguran. Negara membayar sebagian besar biaya bantuan miskin langsung, di bawah program yang disebut Aid to Dependent Children (Bantuan bagi Anak-anak yang masih bergantung).

Social Security menandai pembalikan bersejarah dalam nilai politik Amerika Serikat. Sebuah kontrak sosial baru antara pemerintah dan masyarakat yang menggantikan ajaran bantuan terhadap individu dan kebijakan-kebijakan yang terdahulu tentang tidak campur tangannya pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Pada akhirnya pemerintah mengakui tanggung jawab yang lebih luas untuk

melindungi hak-hak sosial warga negara. *Welfare state*, ditandai dengan bantuan yang diberikan kepada veteran meskipun cakupannya terbatas (Davidson *et al*, 2006: 738). Meskipun demikian, Perlindungan Sosial menunjukkan sebuah permulaan yang dramatis dari fungsi tradisional pemerintah. *New Deal* kedua telah mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan warga negara Amerika Serikat. Sebelum tahun 1930-an, perdebatan politik nasional seringkali berputar-putar dalam persoalan apakah pemerintah pusat boleh turut campur tangan dalam perekonomian atau tidak (Forner, 2005: 717). Akan tetapi setelah program *New Deal* berjalan, peranan pemerintah dalam menjamin hak warga negara justru semakin besar. Di samping itu, pemerintah memikul sebuah tanggung jawab untuk memberi jaminan serta melindungi masyarakat Amerika terhadap krisis. Dengan demikian negara yang modern bertanggung jawab pada perekonomian modern dan mengemban tugas mengasuransikan standar hidup yang pantas bagi masyarakatnya

5.2 Kebijakan di Bidang Ekonomi

Kehancuran perekonomian Amerika Serikat sejak tahun 1929, telah membawa Amerika Serikat dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pemerintahan Presiden Hoover dengan sistem perekonomian bebasnya tidak berhasil mengatasi krisis. Oleh karena itu campur tangan pemerintah merupakan tindakan yang sangat diperlukan. Jika pemerintah tidak menangani secara langsung dampak dari krisis, dikhawatirkan para penganggur yang jumlahnya mencapai 13.000.000 pada tahun 1929 akan menimbulkan bahaya revolusi. Perekonomian nasional harus segera dipulihkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara tepat. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan Franklin D. Roosevelt dalam mengatasi krisis ekonomi baik dalam sektor pertanian, industri, maupun keuangan (perbankan). Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai kebijakan yang dikeluarkan Franklin D. Roosevelt dalam membangun kembali perekonomian Amerika Serikat.

5.2.1 Kebijakan dalam Sektor Pertanian

Kemunduran perekonomian Amerika Serikat dalam sektor pertanian merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan akibat krisis. Pada seratus hari pertama masa jabatan Franklin D. Roosevelt, untuk menolong petani yang menderita kerugian, pemerintah memberlakukan *Agricultural Adjustment Act* (Undang-undang Penyesuaian Pertanian/AAA) yang disahkan kongres pada Mei 1933. Di bawah ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah mengatur produsen dari tujuh komoditas pertanian utama yang meliputi, gandum, kapas, jagung, babi, beras, tembakau, dan produk susu (Brinkley, 2007: 694-695). Peraturan tersebut akan menentukan batas produksi hasil panen dari para petani. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah, melalui Pelaksanaan Penyesuaian Pertanian/AAA meminta kepada para produsen hasil pertanian untuk mengurangi produksi normal 15 persen pada produksi kapas sebesar 33 persen. Selanjutnya pemerintah akan mengeluarkan pembayaran keuntungan untuk bagian hasil panen yang tidak diproduksi. Misalnya, jika seorang petani gandum biasanya mengumpulkan 1000 gantang, dia akan diminta mengumpulkan hanya 850 gantang. Untuk jumlah 150 gantang yang diserahkan pada pemerintah dengan digantikan pembayaran sebesar 28 sen per gantang (Harlow, 1961: 718). Para penanam kapas diminta untuk menyimpan sendiri hasil panen tanah pada setiap baris ketiga dari tanaman yang sudah siap dipanen pada saat undang-undang AAA mulai berlaku. Kemudian dengan hasil panen yang lebih kecil maka harga akan naik dengan sendirinya, sehingga para petani akan mendapat keuntungan dengan kedua cara tersebut. Untuk menyediakan dana bagi pembayaran keuntungan tersebut, bendahara program AAA akan mengumpulkan pajak pengolahan dari para usahawan industri. Misalnya industri penggilingan tepung, akan membayar pajak pengolahan untuk gandum. Selama tiga tahun pada masa Penetapan Penyesuaian Pertanian/AAA berlaku, pemerintah telah mengeluarkan pembayaran keuntungan sampai sejumlah sekitar \$2.000.000.000. Harga pertanian disubsidi sampai pada titik keseimbangan.

Pada perkembangannya AAA telah membantu membawa kenaikan harga bagi komoditas pertanian di tahun-tahun setelah 1933. Pendapatan bruto pertanian meningkat pada tiga tahun pertama sejak pelaksanaan *New Deal*. Ekonomi pertanian secara keseluruhan jauh lebih stabil dan makmur daripada di tahun-tahun sebelumnya (Brinkley, 2007: 694-695). Di tahun 1933 para petani telah membajak 10,4 juta hektar kapas dan menyembelih 220.000 sapi dan 6.000.000 babi (Norton *et al*, 1984: 385). Meskipun bagi para petani yang memiliki tanah program tersebut berhasil, rata-rata orang mendapati hal tersebut sebagai pemborosan. Padahal masyarakat pada waktu krisis berada dalam keadaan sulit untuk memperoleh makanan. Kelemahan program AAA, lebih memilih petani-petani besar daripada petani kecil, khususnya karena pelaksanaan lokal programnya seringkali jatuh ke tangan produsen-produsen yang paling kuat dalam masyarakat. Dengan demikian kebijakan AAA merupakan pembayaran atas para petani yang memiliki tanah, bukan untuk meningkatkan hasil panen yang mendorong pengeluaran ribuan petani kecil miskin dan petani bagi-hasil.

Pada saat petani didorong untuk mengurangi produksi, kekeringan yang ganas melanda negara-negara bagian di Daratan Besar. Akibatnya produksi pertanian turun tajam. Angin ribud dan topan debu menyerang wilayah Dataran Besar kejadian tersebut dikenal dengan “Mangkuk Debu”. Peristiwa ini paling dahsyat terjadi antara tahun 1935-1938. Hasil panen musnah, mobil, dan peralatan mesin rusak. Akibat bencana tersebut sekitar 80.000 orang meninggalkan Arkansas, Texas, Missouri, dan Oklahoma. Tujuannya mencari kehidupan yang lebih baik di wilayah barat, California. Sebagian yang hijrah tersebut adalah untuk memperebutkan pekerjaan memetik hasil panen dengan upah yang sangat rendah (Norton *et al*, 1984: 386). Kondisi tersebut, ditanggapi pemerintah dengan memberikan bantuannya. Presiden Franklin D. Roosevelt menandatangani undang-undang baru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi sumber tanah terhadap erosi tanah. Selain itu, hampir 30.000 pohon ditanam untuk menghalangi laju angin. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Pada tahun 1935 Franklin D. Roosevelt juga telah memberikan perubahan bagi cara hidup masyarakat menjadi lebih baik melalui *Rural Electrification* (Pemberian Listrik Pedesaan/REA). Sebelumnya pemakaian listrik di desa kurang dari 10 persen, akan tetapi setelah berlakunya peraturan REA tersebut enam tahun kemudian meningkat menjadi 40 persen (Davidson *et al*, 2006: 740). Adanya kebijakan REA telah memberikan kemajuan pada pertanian Amerika Serikat yang dapat memiliki listrik. *New Deal* tidak selalu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi rakyat. Akan tetapi dengan adanya *New Deal* telah mengubah kehidupan rakyat biasa seperti yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Selanjutnya, keuntungan distribusi yang tidak merata menjadi masalah yang paling terlihat diakhir pelaksanaan AAA. Sistem subsidi AAA yang tidak efisien membuktikan keadaan buruk bagi pertanian. Pemberian hasil pertanian dalam gabungan dengan pembayaran subsidi, menawarkan pendapatan yang terlalu sedikit. Ketidakadilan AAA dihasilkan dari kegagalan yang berkaitan dengan masalah sewa-menyewa lahan pertanian.

Berbagai kelemahan dalam AAA, mendapat perhatian oleh Mahkamah Agung. Di permulaan tahun 1936, Mahkamah Agung mengumumkan AAA tidak berlaku. Berdasarkan keputusan tersebut Penetapan AAA dinyatakan telah melanggar hak yang dilindungi oleh Negara. Undang-undang AAA merupakan program yang mengatur dan mengawasi produksi pertanian, yang merupakan suatu persoalan di luar kekuasaan yang diserahkan pada Pemerintah Pusat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemerintah tidak mempunyai otoritas dasar untuk mewajibkan petani membatasi produksinya (Harlow, 1961: 718). Oleh karena itu pembayaran terhadap para petani dihentikan, selanjutnya Mahkamah Agung memerintahkan pengembalian semua yang telah dibayarkan tersebut. Akan tetapi pada beberapa minggu kemudian pemerintahan Franklin D. Roosevelt telah mendapatkan penerimaan atas rancangan undang-undang baru yakni Undang-undang Konservasi Tanah dan Penjataan dalam Negeri (*Soil Conservation and Domestic Allowment Act*), dan pembayaran keuntungan diperbarui di bawah ketentuan tersebut.

Kemudian di tahun 1938, kongres mengesahkan *Second Agricultural Adjustment Act* (Undang-undang Penyesuaian Pertanian Kedua). Selain untuk melanjutkan pembayaran pada petani, undang-undang AAA memberi kuasa bendahara AAA untuk meminjamkan uang sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap para petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah demi keamanan. Selanjutnya, jika harga pasar seharusnya meningkat di atas jumlah pinjaman, petani dapat memperoleh kembali hasil panennya dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Jika harga merosot atau masih sama, pemerintah akan menjaga kepemilikan hasil panen tersebut. Efek sebenarnya dari program pertanian dalam program *New Deal* yaitu pada hakekatnya untuk meningkatkan pendapatan para petani. Dengan demikian adanya aturan baru tersebut mempercepat kenaikan harga komoditas pertanian dan stabilitas ekonomi bagi para petani.

5.2.2 Kebijakan Dalam Sektor Industri

Krisis ekonomi telah memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan perindustrian Amerika Serikat. Keadaan ekonomi semakin memburuk. Produk-produk industri bersaing dalam pasaran dengan harga yang sangat rendah, sehingga produsen maupun buruh menjadi sangat dirugikan. Sudah semestinya, negara memerlukan suatu program untuk melindungi produsen, buruh, dan juga konsumen (Harlow, 1961: 714-715). Rencana Administrasi Rehabilitasi Nasional sangat tepat untuk menangani masalah tersebut. Oleh karena itu pemerintahan Franklin D. Roosevelt mengeluarkan kebijakan *National Reacavery Administration/NRA* sebagai dasar pemulihan industri nasional pada 16 Juni 1933. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan terhadap presiden untuk menata perencanaan kerjasama diseluruh industri. Program tersebut secara luas menghasilkan suatu rencana untuk memperbaiki kepercayaan dalam komunitas bisnis.

Peran bisnis begitu besar dalam perekonomian Amerika Serikat, sehingga diperlukan adanya kerja sama antar masyarakat bisnis dengan cara menerima bisnis gabungan. Struktur rencana terpusat dapat menghasilkan keputusan penting dari para

pemimpin tenaga kerja dan perwakilan dari kelompok konsumen (Clark *et al*, 1982: 234). NRA akan mengatur bisnis, sehingga keuntungan potensial tidak hilang melalui persaingan yang tidak sehat. Jendral Hugh Johnson, yang merupakan anggota dewan pengurus industri pada Perang Dunia 1, dipilih untuk mengendalikan program NRA. NRA di bawah ketua Hugh Johnson memberikan kode praktek yang adil sebagai perwakilan dari pemerintah, terhadap perusahaan, buruh dan juga pada kelompok konsumen. Kode tersebut menetapkan harga minimal, gaji minimal, dan jam maksimal (Davidson *et al*, 2006: 733). Hal ini juga mengharuskan perusahaan untuk menerima negosiasi dengan pimpinan buruh, termasuk hak-hak serikat buruh untuk mengatur jam kerja dan upah. Setiap kode yang dijanjikan untuk memperbaiki kondisi pekerja, selain itu juga melarang pekerja anak-anak. Upah minimum ditentukan sebesar 12 \$ untuk 40 jam dalam seminggu. Dengan demikian tidak ada perusahaan yang dapat bersaing secara ketat dengan memotong harga atau gaji di bawah tingkat tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu tidak dibenarkan pula para majikan mempekerjakan pegawai secara sewenang-wenang di bawah peraturan NRA.

Tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk tunduk dalam NRA oleh karena itu program NRA lebih mengandalkan partisipasi sukarela. Pemerintah hanya melakukan kampanye publisitas seperti pawai, memasang poster, dan janji umum agar perusahaan mau bergabung dalam NRA. Konsumen juga diarahkan hanya untuk membeli produk yang didukung NRA. Lebih dari 2.000.000 pegawai pada akhirnya mendaftar dalam NRA. Di jendela toko dan dalam berbagai barang dagangan, ditempelkan stiker bergambar dengan kepala elang-biru untuk memberi tanda kepada konsumen (Davidson *et al*, 2006: 733). Selama program NRA berjalan, secara berangsur-angsur berkembang dengan pemakaian kode praktek yang adil. Melalui NRA bisnis mengalami perubahan yang penting.

Pada setiap bisnis mempunyai kodenya sendiri, sehingga bisnis-bisnis tersebut berhubungan dengan jam, upah, dan kebijakan aspek bisnis yang lebih luas. Salah satu dari kode pertama yakni para pengusaha pabrik kapas, menetapkan kerja

mingguan maksimal 40 jam. Kode tersebut menyediakan upah minimum 13 dolar per minggu di Utara, 12 dolar di Selatan (Harlow, 1961: 716). Kemudian bagi industri secara keseluruhan, akan ada agen perencanaan pusat, dengan kekuasaan untuk mengubah jam kerja, mengharuskan sistem penghitungan yang seragam. Tujuannya untuk memberikan pekerjaan yang meningkat, mengurangi lamanya pekerjaan mingguan, memberikan upah yang lebih tinggi, mencegah persaingan yang tidak adil, dan untuk menghentikan produksi yang berlebih. Bagian 7a dijamin hak terhadap buruh untuk mengatur jam kerja. Para pengusaha pabrik menyukai program NRA karena melarang memotong harga dan mengesahkan persetujuan untuk menetapkan harga. Presiden menyukainya karena mengandung dasar pembaharuan sosial yang besar. Berbagai asosiasi perdagangan menerima karena akan memainkan peranan yang memimpin dalam perencanaan kode persaingan yang adil.

Akan tetapi, antusiasme atas undang-undang NRA hanya bertahan enam bulan. Harga-harga menjadi naik, harga tersebut meningkat lebih cepat daripada upah. Pada bulan Februari 1934 pemerintahan menunjuk dewan pengurus khusus dengan Clarence Darrow sebagai ketua, untuk menyelidiki efek undang-undang pada perusahaan bisnis kecil. Dewan tersebut melaporkan pada bulan Mei bahwa Penetapan Pemulihan Industri Nasional mendorong monopoli dan bisnis kecil yang cacat. Selain itu dilaporkan bahwa peningkatan yang lebih kecil dalam pekerjaan. Pada bulan Mei 1934 pengangguran masih berjumlah 10.616.000 (Harlow, 1961: 716). Dengan demikian, dalam program NRA masih banyak kelemahan, sehingga kurang begitu efektif dalam pelaksanaannya.

Atas segala kelemahan, NRA ternyata gagal untuk membawa pemulihan. Perusahaan-perusahaan besar menentukan kode untuk keuntungannya. Sering kali pebisnis secara sengaja membatasi produksi dan menaikkan harga, terkadang melebihi harga normal. Tidak semua perusahaan bergabung dengan program NRA, sehingga para pengusaha merasa bahwa kode tersebut terlalu rumit untuk diikuti. NRA mencoba untuk melindungi perusahaan yang jumlahnya terlalu banyak, sedangkan pengawasannya yang relatif sedikit mempunyai masalah untuk

menampung semua keluhan. Perusahaan bertahan di bawah NRA, namun tanpa menaikkan produksi tidak ada dorongan untuk ekspansi dan investasi baru. Di bawah kondisi seperti itu masa-masa sulit dapat berlangsung tanpa terbatas. Hanya dalam waktu yang singkat, meskipun dimulai dengan antusias, segera NRA sedikit berhasil namun menimbulkan pengelakan dan kritik atas ketidak efektifannya.

Pada tanggal 27 Mei 1935, *Supreme Court* (Mahkamah Agung) membekukan NRA yang terguling dalam *Schechter Poultry Corp. v. United States* (Perusahaan Ternak Schechter versus Amerika Serikat). Pengadilan dengan suara bulat memutuskan bahwa NRA telah melampaui kekuasaan pemerintah pusat terhadap perdagangan di antara negara-negara bagian dengan mengatur perusahaan peternakan milik Schechter bersaudara di New York. Secara pribadi Franklin D. Roosevelt merasa lega dengan penghapusan NRA (Davidson *et al*, 2006: 733-734). Namun Franklin D. Roosevelt dan kaum *New Deal* cukup terguncang pada keputusan ini. Meski demikian, program pemerintah telah berusaha memberikan perbaikan dalam industri nasional, sehingga perindustrian dapat terus berjalan setelah melewati masa-masa krisis. Para pendukung *New Deal* bergantung pada pandangan yang luas mengenai ketentuan perdagangan untuk melawan krisis.

5.2.3 Kebijakan dalam Sektor Keuangan (Perbankan)

Kemacetan industri yang terjadi Amerika Serikat akibat krisis ekonomi, diiringi pula dengan kegagalan bank. Pertama-tama hanya di beberapa tempat, akan tetapi kemudian menjalar keseluruh negeri. Bank-bank di Amerika Serikat mulai menutup pintu bagi para nasabah. Secara keseluruhan, pada tahun 1933 terdapat lebih dari 10.000 bank deposito bangkrut (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 483). Jika bank sebagai pemandu nilai mata uang ternyata dalam kondisi yang buruk, tentu sangat mempengaruhi kepercayaan rakyat akan keamanan tabungannya. Kegagalan perbankan benar-benar memprihatinkan, dampak yang ditimbulkan akibat krisis begitu besar terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Franklin D. Roosevelt menghadapi sistem perbankan pada ambang keruntuhan. Dana bank yang telah diinvestasikan dalam bursa saham kehilangan nilainya. Kondisi tersebut membuat panik para penyetor yang menarik kembali tabungannya. Menjelang awal tahun 1933 kepercayaan bangsa terhadap keuangan negara mencapai titik yang paling rendah. Pada 5 Maret, Franklin D. Roosevelt mengeluarkan sebuah pengumuman untuk menutup seluruh bank-bank Amerika Serikat selama lima hari sampai kongres dapat bertemu dalam sidang khusus untuk mempertimbangkan perundang-undangan reformasi perbankan. Kepanikan mengenai kegagalan bank sangat besar, sehingga Franklin D. Roosevelt memerintahkan untuk *bank holiday* (liburan bank), tujuannya adalah untuk memberikan bantuan ketenangan pada publik. Tiga hari kemudian, Franklin D. Roosevelt mengirimkan gagasan kepada kongres *Emergency Banking Act* (Undang-Undang Perbankan Darurat), sebuah rancangan undang-undang yang secara umum konservatif sebagian besar dirancang oleh peninggalan pemerintahan Hoover (Forner, 2005: 701-702). Tujuan utamanya untuk melindungi bank-bank yang lebih besar agar tidak terseret oleh lemahnya bank-bank yang lebih kecil.

Rancangan undang-undang diberikan untuk pemeriksaan Departemen Keuangan atas semua bank sebelum bank dibenarkan untuk dibuka kembali. Hal tersebut dilakukan untuk bantuan pemerintah pusat kepada beberapa lembaga yang bermasalah dan sebagai reorganisasi yang seksama terhadap bank yang dalam kesulitan paling besar. Kongres ragu-ragu mengesahkan rancangan undang-undang tersebut hanya dalam waktu empat jam setelah pengenalannya. Franklin D. Roosevelt mengatakan kepada publik pada 12 Maret, dalam obrolan pertamanya di depan perapian, “bahwa lebih aman untuk menyimpan uang kalian di bank yang buka kembali daripada di bawah kasur.” Dengan adanya pernyataan itu, telah membantu menghilangkan kepanikan publik. Tiga perempat bank-bank dalam sistem *Federal Reserve* buka kembali dalam tiga hari kemudian dan 1 milyar dalam timbunan mata uang dan emas mengalir kembali hanya dalam kurun waktu satu bulan. Dengan demikian krisis perbankan yang datang dengan tiba-tiba telah berakhir.

Pada pagi hari setelah pengesahan *Emergency Bank Act*, Franklin D. Roosevelt mengirim kepada kongres undang-undang lain yakni *Economy Act* (Undang-Undang Ekonomi) pada 20 Maret 1933 yang ditujukan untuk meyakinkan rakyat Amerika Serikat yang konservatif secara keuangan, terutama komunitas bisnis bahwa pemerintah pusat berada dalam keadaan yang aman dan bertanggung jawab. Undang-undang *Economy Act* mengusulkan untuk mengimbangkan anggaran pemerintah pusat dengan memotong gaji pegawai pemerintah dan mengurangi dana pensiun bagi veteran sebanyak 15 persen atau sebesar 400 dollar, serta pemotongan gaji pada para anggota kongres sebesar 100 dollar. Sebaliknya, presiden juga telah memperingatkan, bahwa negara menghadapi defisit sebanyak 1 milyar (Brinkley, 2007: 694). Dengan cara demikian pemerintah telah menghemat keuangan negara hingga 500 milyar. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan anggaran pengeluaran pemerintah agar anggaran ekonomi dapat lebih diefisienkan.

Franklin D. Roosevelt selalu mengambil jalan tengah dalam setiap kebijakan yang diambil. Bukannya menasionalisasikan bank-bank seperti yang diinginkan kaum radikal, akan tetapi justru mengeluarkan undang-undang *Emergency Banking Act* (Undang-Undang Perbankan Darurat). Franklin D. Roosevelt hanya memperluas bantuan pemerintah pusat kepada bank-bank yang terancam ditutup. Bank yang bermasalah akan diserahkan kepada pengelola pusat, dalam mengatasi permasalahannya (Davidson *et al*, 2006: 729-730). Undang-undang selanjutnya segera mengikuti yang mengubah sistem keuangan Amerika Serikat yakni *Federal Deposit Insurance*. Tujuannya untuk penjagaan terhadap jatuhnya saham.

Reformasi keuangan telah memberikan pemerintah wewenang yang lebih besar untuk mengatur peredaran dan pengaturan transaksi saham. Undang-undang tersebut mencegah banyak praktik yang tidak bertanggung jawab yang berkontribusi terhadap kehancuran bursa saham. Pada bulan April 1933, Franklin D. Roosevelt menurunkan standar emas dan memulai percobaan baru dengan nilai dolar untuk menaikkan harga. Kemudian pada tanggal, 16 Juni 1933 *Glass-Steagall Banking Act* diberlakukan untuk membatasi spekulasi oleh bank. Undang-undang ini menerapkan

pengaturan lembaga perbankan dan asuransi agar tidak mencampuradukkan bisnis dengan aktivitas di pasar bursa saham. Lebih penting lagi, Franklin D. Roosevelt telah membuat peraturan pemerintah pusat untuk simpanan bank yang sampai \$2500.

Di bawah *Federal Deposit Insurance Corporation* (Badan Hukum Asuransi Simpanan Pusat), maka lebih sedikit bank gagal. Lembaga ini juga mengatur pengasuransian simpanan di bank di bawah 5000 dollar, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi 10.000 dollar, dan peraturan-peraturan tegas turut dibuat dalam hal penjualan surat-surat berharga di bursa saham. Kemudian Franklin D. Roosevelt mengambil standar emas Amerika Serikat yakni, dengan memotong jaringan antara mata uang negara dan cadangan emasnya. Dengan demikian memungkinkan pengeluaran lebih banyak uang dengan harapan mendorong aktivitas bisnis. Kebijakan tersebut telah menolong sistem keuangan dan meningkatkan kekuatan pemerintah di atas sistem tersebut. Sekitar 5.000 bank atau sepertiga jumlah bank telah gagal antara tahun 1929 dan 1933, yang mewakili kerugian puluhan juta dolar terhadap para penyetor. Di tahun 1936, tidak satupun bank mengalami kegagalan di Amerika Serikat (Forner, 2005: 701-702). Dengan demikian, program yang digagas Franklin D. Roosevelt telah memberikan perbaikan serta mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga perekonomian berangsur-angsur stabil.

**BAB 6. PENGARUH KEBIJAKAN YANG DITERAPKAN FRANKLIN
DELANO ROOSEVELT TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN
POLITIK TAHUN 1933-1939**

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan berdampak bagi kehidupan masyarakatnya, termasuk pelaksanaan kebijakan Franklin Delano Roosevelt dalam program *New Deal*. Perluasan kekuasaan pemerintah dalam perekonomian mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan rakyat. Timbulnya perubahan pada peraturan pemerintah tidak terlepas dari keadaan pada waktu krisis. Pemerintahan sebelum Franklin D. Roosevelt sangat membatasi perannya dalam kehidupan rakyat. Akan tetapi dampak besar yang ditimbulkan krisis, melalui dukungan rakyat telah mendorong pemerintah untuk ikut campur mengatasi masalah krisis.

Franklin D. Roosevelt bagaimanapun telah berusaha keras untuk memperbaiki kondisi krisis. melalui program *New Deal*. Franklin D. Roosevelt telah menciptakan program-program yang dapat menyerap tenaga kerja, serta mengeluarkan undang-undang untuk mengatur kembali jalannya perekonomian. Perubahan yang ditimbulkan dari kebijakan politik Franklin D. Roosevelt adalah kembalinya stabilitas perekonomian, yang berpengaruh terhadap perubahan di bidang lainnya. Perubahan-perubahan meliputi perubahan dalam bidang, sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai timbulnya perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut uraian secara rinci mengenai perubahan-perubahan tersebut.

6. 1 Di Bidang Sosial

Perkembangan krisis ekonomi yang terus berlanjut sejak tahun 1929, telah memberikan perubahan terhadap pola kehidupan rakyat Amerika Serikat. Krisis berdampak besar terhadap meningkatnya angka pengangguran, khususnya para

pekerja pabrik industri. Hal tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan oleh krisis, sehingga pabrik mengurangi produksi yang diiringi dengan menurunnya daya beli konsumen. Selain itu, kehidupan petani juga tidak lebih baik bersamaan dengan menurunnya permintaan pasar luar negeri akan komoditas pertanian. Para petani mengalami kerugian besar. Disamping itu, kehidupan kaum negro juga tidak lebih baik, justru semakin sulit ketika terjadi krisis, pola diskriminasi semakin nampak dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian tingginya angka pengangguran pada akhirnya juga menyebabkan bermacam dampak negatif, dari unjuk rasa dari para pekerja yang dipecat secara sewenang-wenang yang berujung kekerasan menuntut adanya bantuan dari pemerintah. Selain itu kemiskinan yang meluas diseluruh wilayah, tajamnya perselisihan antar ras dan kriminalitas yang kian meningkat. Akibatnya krisis telah menggeser nilai-nilai yang menjadi pandangan rakyat Amerika Serikat sebelum terjadi krisis.

Rakyat Amerika Serikat diajarkan untuk mandiri terhadap kehidupannya, sebagai tanggung jawab pribadi melemah. Masyarakat mulai putus asa dan beralih pada bantuan pemerintah (Brinkley, 2007: 9-10). Hal ini tentu merupakan perubahan yang luar biasa bagi bangsa Amerika yang sudah terbiasa dalam kemandirian individu. Pemerintahan sebelum Franklin D. Roosevelt sangat menghindari adanya kebijakan bantuan langsung terhadap rakyat. Akan tetapi F. D. Roosevelt memiliki pandangan lain tentang masyarakat. Pada pidatonya ketika menerima pencalonan partai Demokrat sebagai presiden di tahun 1932. Franklin D. Roosevelt menjanjikan sebuah program yaitu *New Deal* bagi masyarakat Amerika. Franklin D. Roosevelt berbicara tentang tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh kehidupan yang layak (Forner, 2005: 3). Hal tersebut memberikan harapan baru bagi bangsa yang sedang terpukul krisis.

Franklin D. Roosevelt di awal jabatannya, diisi dengan kegiatan yang begitu padat. Pada seratus hari pertama digunakan untuk membuat langkah-langkah yang akan meringankan Amerika Serikat untuk keluar dari krisis. Franklin D. Roosevelt dengan cepat mendirikan beberapa program ekonomi seperti *Federal Emergency*

Relief Administration (Pelaksana Bantuan Darurat Pemerintah Pusat/FERA). Pelaksanaan program FERA sifatnya hanya sementara, akan tetapi bantuan tersebut sangat membantu rakyat yang jatuh miskin (Forner, 2005: 7). Meski demikian, Franklin D. Roosevelt lebih menyukai bantuan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemberian pekerjaan umum yang menjadi proyek pemerintah, selain memberikan perubahan bagi pembangunan nasional sekaligus juga dapat menyerap pengangguran.

Pemikiran Franklin D. Roosevelt dengan mengembangkan bantuan melalui pekerjaan umum merupakan sebuah perubahan inovatif dari pemberian dana secara langsung menuju sebuah program kerja untuk para penganggur (Forner, 2005, 17-18). Setiap kebijakan yang dikeluarkan Franklin D. Roosevelt selalu bertentangan dengan Hoover. Perubahan-perubahan yang dilakukan Franklin D. Roosevelt dengan kekuatan pemerintah semata-mata adalah untuk menyelamatkan rakyat. Program pekerjaan umum merupakan salah satu yang Franklin D. Roosevelt gagas. Pemberian upah terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang berguna secara sosial, akan dapat membangkitkan kepercayaan rakyat Amerika untuk bangkit kembali. *Civil Works Administration* (Pemberian Pekerjaan Sipil/CWA) mempekerjakan 4.000.000 orang Amerika (Davidson, 2006: 12). Program bantuan pekerjaan lainnya yang ditetapkan pada tahun 1933 bahkan terbukti lebih kreatif. *Civilian Conservation Corps* (Badan Konservasi Sipil/CCC) sebagai bentuk perhatian Franklin D. Roosevelt terhadap pemuda. CCC telah memberikan bantuan dan mengirimkan para pemuda yang awalnya menganggur ke hutan dan ladang untuk menanam pohon, membangun taman, dan mencegah erosi tanah. Selama 10 tahun, CCC menyediakan 2.500.000 pemuda (Davidson, 2006: 13). Dengan demikian, adanya program tersebut telah memberikan jalan baru untuk mengatasi pengangguran dan merupakan teladan yang penting bagi program bantuan di masa mendatang bagi pemerintah. Adanya program *New Deal* dapat meningkatkan infrastruktur bangsa seperti pembangunan jalan, jembatan, bangunan umum, dan taman. Franklin D.

Roosevelt sangat peka sekali akan keinginan rakyat agar segera keluar dari masa-masa sulit akibat krisis.

Rakyat Amerika sangat bersemangat dengan adanya bantuan pemerintah melalui lembaga-lembaga *New Deal*. *New Deal* salah satu program terbesarnya adalah TVA. TVA Telah memberikan perbaikan bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Banyak upaya-upaya pengembangan ekonomi pada pemerintahan Franklin D. Roosevelt lakukan, sebagian besar karena Selatan adalah daerah yang paling kurang berkembang secara ekonomi di negara Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Bantuan listrik pedesaan oleh Franklin D. Roosevelt mempunyai dampak yang besar terhadap wilayah pertanian di berbagai wilayah termasuk di wilayah selatan yang mendapatkan bantuan untuk saluran listrik REA (Brinkley, 2007: 72). *New Deal* juga mengarahkan perhatian nasional menuju kondisi yang lebih stabil yakni perbaikan pada wilayah Selatan yang belum pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Banyak orang Amerika di luar Selatan wilayah Amerika Serikat Bagian Selatan beranggapan bahwa wilayah Selatan merupakan wilayah yang terbelakang. Keterbelakangan tersebut berkaitan dengan rasisme dan pemisahan pekerjaan. Akan tetapi istri Franklin D. Roosevelt yaitu Eleanor Roosevelt menentang rasisme dan mencoba untuk membantu perjuangan Amerika hitam dalam memperoleh kewarganegaraan penuh. Hal ini menjadi kemajuan tersendiri bagi kulit hitam serta kemajuan bagi para wanita (Brinkley, 2007: 710). Dengan adanya berbagai program pemerintah telah memberikan perubahan tersendiri bagi keberlangsungan kehidupan rakyat Amerika yakni kemajuan di selatan.

Selain itu, keberpihakan Franklin D. Roosevelt terhadap kaum buruh juga merupakan hal baru dalam pemerintahan Amerika. Hal ini mengingat pada masa pemerintahan sebelumnya yang kurang memperhatikan nasib buruh. Terpilihnya Franklin D. Roosevelt telah memberikan kesempatan bagi buruh untuk mendapatkan haknya. Undang-undang yang diajukan Franklin D. Roosevelt terhadap kongres telah memberikan jaminan bagi para buruh untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai buruh. Peraturan NRLA melarang tindakan sewenang-wenang terhadap para buruh,

menetapkan upah, lamanya jam kerja serta kebebasan buruh untuk membentuk serikat kerja. Pada tahun 1936 kemajuan lebih baik diperoleh para buruh ketika NRLA sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi telah digantikan dengan pemberlakuan undang-undang *National Recovery Labour Board* (NRLB) atau yang lebih dikenal *Wagner Act* (Brinkley, 2007: 701). Dengan demikian Undang-undang *Wagner Act* telah membawa kemajuan bagi para buruh, yaitu selain perbaikan dalam dunia pekerjaan buruh tapi juga telah mendapatkan kemajuan dalam hak politiknya.

Pada intinya, Franklin D. Roosevelt telah berusaha keras memperjuangkan program *New Deal* yang semuanya itu mempehatikan kehidupan sosial berbagai golongan baik kaum miskin, golongan menengah serta kebijakan bagi para pebisnis. Bantuan Franklin D. Roosevelt terhadap golongan menengah dengan pemberlakuan peraturan baru bagi rakyat yang telah kehilangan rumahnya akibat krisis. Program pemerintah ini sangat membantu, lantaran bagi golongan menengah memiliki rumah merupakan suatu *prestige* tersendiri (Harlow, 1961: 720). HOLC sangat membantu rakyat yang rumahnya terancam disita karena sudah tidak mampu lagi membayar cicilan. Keringanan yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat bagi kehidupan rakyat.

Selain itu program pemerintah juga sangat memperhatikan, rakyat penganggur dengan memberikan pekerjaan yang belum pernah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya justru mendapat perhatian Franklin D. Roosevelt. Pemerintah memberikan subsidi pada para pemuda, puncaknya ketika dilaksanakan program *The Federal Writers' Project* (Proyek Penulisan Federal) mempekerjakan 6.000 wartawan, pengarang novel, dan sarjana-sarjana lain dalam program pemerintah. Dana \$46.000.000 yang dikeluarkan oleh WPA untuk seni yaitu seni musik, seni lukis, seni patung. Proyek-proyek tersebut diberikan kebebasan yang dulu kiranya mustahil diberikan pada usaha yang disponsori pemerintah. Usaha pemerintah untuk menggairahkan seni yang sama sekali bebas dari propaganda, sehingga yang terpenting kebebasan itu tidak pernah disalahgunakan (Freidel, dalam Davis dan Woodman, 1991: 495-496). Dengan demikian, masuknya pemerintah federal kedalam

program yang sangat luas dalam memberikan bantuan pada rakyat yang menderita merupakan penyimpangan yang tajam dari tradisi sebelumnya, akan tetapi kenyataannya program tersebut bertahan lama. Kebijakan tersebut sangat membantu rakyat untuk pulih dari masa sulit, sehingga rakyat menjadi terbuka dan selalu mendukung program pemerintah.

Selain sikap tanggap Franklin D. Roosevelt terhadap dampak krisis pada kehidupan sosial. Pemerintah telah menyiapkan sebuah program untuk masa mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya krisis pada masa mendatang. *Social Security Act* merupakan program baru pemerintah yang telah memberikan perubahan bagi terjaminnya kehidupan pekerja jika dipecat secara tiba-tiba, orang tua dengan dana pensiun, serta bantuan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga diberlakukan program *Security Exchange* merupakan peraturan untuk menjaga dana rakyat agar tetap aman, tidak seperti pada masa-masa awal krisis rakyat kebingungan setelah ditutupnya bank secara besar-besaran akibat kegagalan sistem perbankan.

Franklin D. Roosevelt memang ahli menarik hati rakyat dalam dukungan kebijakan baru. Franklin D. Roosevelt telah memberikan arti modern untuk istilah liberalisme. Pada abad ke-19, liberalisme telah menjadi pandangan bagi pemerintah yang terbatas dan ekonomi pasar bebas (Forner, 2005: 17-18). Akan tetapi Franklin D. Roosevelt secara sadar memilih menggunakannya untuk menggambarkan negara yang besar, aktif dan sadar secara sosial. Franklin D. Roosevelt mereklamasi makna kebebasan dari konservatif dan menjadikannya sebagai dukungan rakyat berkumpul untuk *New Deal* yakni kebebasan sebagai perlindungan yang lebih besar bagi setiap rakyat. Franklin D. Roosevelt memahami *New Deal*, dan khususnya Perlindungan Sosial sebagai perluasan makna kebebasan dengan memperluas bantuan terhadap masyarakat Amerika yang membutuhkan sebagai hak warga negara, bukan sebagai amal atau hak istimewa yang khusus.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai kebijakan Franklin D. Roosevelt telah menimbulkan perubahan. Kepustusasaan akibat krisis,

rakyat berangsur-angsur bangkit kembali. Rakyat menjadi lebih terbuka terhadap peranan pemerintah. Pada bidang sosial hubungan masyarakat dengan pemerintah menjadi semakin baik, seperti tanggapan positif rakyat terhadap program pemerintah. Keberhasilan Franklin D. Roosevelt membawa Amerika keluar dari krisis, serta dukungan kuat dari para buruh serta kemampuannya untuk menyatukan kaum kulit putih di bagian selatan dan kaum kulit hitam di bagian utara merupakan hal besar yang telah dilakukannya.

6.2 Di Bidang Ekonomi

Krisis telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan rakyat Amerika Serikat, termasuk pula perubahan dalam perekonomiannya. Keseluruhan upaya penanggulangan krisis presiden Hoover tidak berhasil memperbaiki kondisi perekonomian negara. Kondisi ini kemudian menuntut pergantian Presiden yang baru, kemudian mengangkat Franklin D. Roosevelt sebagai Presiden Amerika di tahun 1933. Pada akhirnya dengan adanya perubahan arah kebijakan telah membawanya keluar dari krisis. Di bawah *New Deal* pemerintah mengambil peran yang lebih luas dalam ekonomi yang belum pernah dilakukan secara progresif. Pada perturan baru ditambahkan tugas yang lebih sulit mengenai memelihara stabilitas ekonomi, dengan memberikan ganti rugi untuk perubahan dalam siklus bisnis. Pengalaman buruk di masa lalu memberikan arahan di masa mendatang dengan adanya peraturan keamanan perbankan, asuransi pengangguran, keperluan gaji, dan jam kerja. *New Deal* telah menciptakan program stabilitor untuk menghindari gangguan di masa yang akan datang (Davidson *et al*, 2006: 36). Dengan adanya dukungan pemerintah terhadap sistem *Federal reserve* serta mempertinggi kontrol atas piutang telah memperkuat pengaruh pemerintah atas ekonomi.

Franklin D. Roosevelt pasca pengangkatannya telah berupaya membawa Amerika Serikat pada sistem ekonomi yang berbeda dari sistem ekonomi sebelumnya, yakni dengan menekankan bahwa tidak ada lagi *Laissez faire* yang dibawa oleh kapitalis. Franklin D. Roosevelt kemudian menerapkan sistem ekonomi

yang menekankan peran pemerintah yang tidak boleh hilang sepenuhnya dalam sistem ekonomi negara. Tentu pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt tersebut membawa perubahan yang sangat signifikan. Tidak mudah bagi Franklin D. Roosevelt melaksanakan programnya yang mendapat perlawanan dari berbagai pihak sayap kiri maupun kanan termasuk Hoover. Langkah-langkah yang kemudian dilakukan Franklin D. Roosevelt dalam memulihkan kondisi Amerika Serikat memberikan pengaruh bagi berjalannya kembali roda perekonomian.

Bantuan yang diberikan pemerintah secara tidak langsung telah memberikan harapan baru bagi rakyat, tidak hanya diberikan bagi pengangguran, akan tetapi perubahan kebijakan-kebijakan dalam sektor pertanian turut menjadi sorotan pemerintahan Franklin D. Roosevelt. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk Amerika Serikat yang berprofesi sebagai petani. Perubahan tersebut merupakan sebuah peraturan yang membatasi produksi petani dalam tujuh komoditas yang telah pemerintah tentukan. Rendahnya harga-harga akibat kelebihan produksi yang semakin diperparah dengan menurunnya kegiatan ekspor merupakan permasalahan bagi para petani yang harus segera diatasi.

Pemberlakuan *Agricultural Adjustment Adjusment* (Undang-undang Penyesuaian Pertanian), bertujuan untuk memulihkan harga-harga komoditas pertanian. Pelaksaann program AAA selanjutnya memberikan perubahan sendiri bagi petani dengan pengurangan jumlah produksi sesuai peraturan pemerintah serta pemberian subsidi bagi petani yang melaksanakan peraturan tersebut dengan dana subsidi yang didapatkan dari pajak industri. Para petani akan menerima pembayaran berdasarkan *paritas*, sebuah sistem dari harga yang sudah diatur untuk jagung, gandum, beras, babi, dan produk susu (Norton *et al*, 1984:15-16). Pada hakekatnya, pemerintah telah menyusun perbedaan antara nilai pasar sesungguhnya dari hasil pertanian dan pendapatan yang dibutuhkan para petani untuk memperoleh keuntungan. Hal ini perlahan meningkatkan pendapatan pertanian hingga 50 persen.

Pada sektor perbankan dilakukan penutupan bank-bank di Amerika Serikat untuk sementara waktu merupakan langkah awal Franklin D. Roosevelt. Sistem

perbankan dan kredit terpusat pada negara, sehingga negara mengatur bahwa bank saat itu hanya akan buka jika memiliki modal untuk membayar hutang. Tindakan ini adalah upaya untuk mengembalikan nilai saham demi menarik kembali para investor sehingga dalam pemerintahan dapat membuka kembali fasilitas kredit untuk industri dan pertanian (Brinkley, 2007: 694). Franklin D. Roosevelt pada akhirnya juga melobi kongres untuk menetapkan regulasi baru pada sektor keuangan. Langkah lain yang diambil Franklin D. Roosevelt adalah meniadakan standar emas dengan mengizinkan rakyat Amerika Serikat dan warga asing menukar mata uang dengan emas. Tujuan kebijakan Franklin D. Roosevelt adalah untuk mencegah penimbunan emas maka Franklin D. Roosevelt akhirnya memerintah untuk menyerahkan persediaan emas swasta untuk ditukar dengan uang.

Pada tahun 1933 Pemulihan Industri Nasional merupakan usaha lain dari pemerintah Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali perekonomian secara menyeluruh. Pernyataan tersebut dibuat sebagai bentuk motivasi terhadap dunia perindustrian agar dapat meningkatkan persaingan industri yang sehat. Sesuai dengan teori ekonomi Keynes, Franklin D. Roosevelt yakin bahwa peran pemerintah harus lebih besar perannya di beberapa sektor dalam negara, seperti sektor publik yang mengikat kepentingan seluruh warga negara. Keynes melihat bahwa peran pemerintah akan dapat menjamin keberlanjutan ekonomi negara dari krisis yang akan dihasilkan bila seluruh aturan perdagangan diserahkan kepada pasar bebas tanpa ada aturan besar yang mengaturnya. Hal itulah yang kemudian dilihat Keynes sebagai titik permasalahan terbesar dari krisis ekonomi sehingga terjadi inflasi dan pengangguran (Mackie, 1964: 125-126). Pandangan kongres menilai pemerintah yang harus lebih agresif untuk menjaga stabilitas ekonomi negara bahwa dengan meningkatkan prasarana umum akan dapat menambah keuangan di dalam perekonomian.

Pembentukan *The National Recovery Administration* atau NRA yang kemudian bekerjasama dengan *The National Industry Recovery Act* atau NIRA untuk menghentikan persaingan yang telah diatur oleh para pebisnis. Peraturan tersebut

mendapatkan tanggapan positif. Negara kemudian mengambil alih peran untuk menetapkan harga yang telah diatur. Kebijakan tersebut memberikan perlindungan terhadap para pekerja untuk bisa mendapatkan haknya sebagai buruh. Dengan demikian kondisi ini membawa peningkatan yang lebih baik pada semangat bekerja para buruh. Kebijakan tenaga kerja *New Deal* adalah bagian dari pemerataan kekuasaan. Hal ini merupakan peran baru bagi pekerja yang cocok untuk kerja tim, kerjasama, dan demokratisasi tempat kerja melalui partisipasi pekerja. Akan tetapi perkembangan itu hanya dirasakan di awal saja, bertahan hanya 6 bulan. Hal tersebut dikarenakan pengaturan yang sangat buruk bagi ekonomi negara dan menghalangi pemulihan ekonomi.

Upaya pemulihan Amerika Serikat dibawah pemerintahan Franklin D. Roosevelt memang tidak menyelesaikan krisis ekonomi, akan tetapi upaya tersebut telah meningkatkan kembali optimis warga negara terhadap krisis. Terjadi peningkatan pendapatan negara secara perlahan sehingga kondisi ekonomi dan sosial masyarakat lebih stabil. Keberhasilan ini membawa Franklin D. Roosevelt berhasil di putaran kedua pada pemilihan presiden Amerika Serikat sekitar tahun 1936-1937, bahkan suara yang didapatkan Franklin D. Roosevelt jauh lebih besar daripada ditahun 1933, karena Franklin D. Roosevelt kemudian banyak mendapatkan dukungan dari 60% warga Amerika Serikat sepenuhnya yang terdiri dari buruh, petani, imigran, penduduk dari timur dan selatan eropa. Pada kondisi yang stabil terus membawa Amerika Serikat untuk memulai keterlibatannya dalam interaksi internasional di awal tahun 1938 (Hardjosoebroto,1986: 68). Pada tahun-tahun berikutnya *New Deal* terus berkembang, kesibukannya dalam lapangan ekonomi yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan alat-alat perang pada industri Amerika sehingga pengangguran pun semakin berkurang dan perekonomian semakin stabil. Gambaran mengenai pengaruh dari krisis dan setelah pelaksanaan program *New Deal* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Timbulnya Perubahan Perekonomian Amerika Serikat Ketika Terjadi Krisis yang di Atasi dengan Program *New Deal*.

	1929	1932	1937	1938	1939
Pendapatan Nasional	82.3	40	71.5	64.2	70.8
Jumlah Produksi Industri	110	58	113	88	
Tanah	11.6	3.2	(titik tertinggi 1930)		
Perusahaan	9.8	3.3		5.1	5.8
Nilai Ekspor	5.2	1.6			3.2
Nilai Impor	4.4	1.3			2.3

Sumber: Carman *et al*, (1967: 607).

Usaha yang dilakukan Franklin D. Roosevelt untuk mengatasi krisis ekonomi, menunjukkan peran pemerintah yang berkewajiban melindungi rakyat serta membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai program *New Deal* menunjukkan suatu perubahan kearah perbaikan. Meskipun program *New Deal* tidak secara signifikan berhasil mengatasi krisis, tetapi *New Deal* telah berhasil memperbaiki perekonomian Amerika Serikat. Hal tersebut terbukti dari kenaikan GNP Amerika Serikat dari 56 milyar di tahun 1933 meningkat menjadi 66 milyar, di tahun 1934, dan meningkat lagi di tahun yang sama menjadi 77 milyar, peningkatan terus terjadi sampai memasuki akhir dari program *New Deal*. Selain itu prosentase pengangguran menurun yaitu dari 25% di tahun 1933 menjadi 21,7% tahun 1934, dan 20,1 di tahun 1935.

6.3 Di Bidang Politik

Pemerintahan Franklin D. Roosevelt dalam banyak hal adalah kepresidenan yang paling sukses secara politik dalam sejarah Amerika. Partainya mengontrol kongres sepanjang Franklin D. Roosevelt menjabat sebagai presiden. Franklin D. Roosevelt tetap mempunyai popularitas yang sangat luas selama masa jabatannya

(Brinkley, 2007: 693). Namun krisis ekonomi juga menciptakan banyak tantangan bagi *New Deal*. Kelompok-kelompok yang tidak sepakat baik pada aliran politik kanan dan kiri menentang keras kebijakan yang dikeluarkan Franklin D. Roosevelt.

Sampai pada akhir tahun 1930-an, *New Deal* sebagaimana program Franklin D. Roosevelt sebut telah menciptakan banyak garis besar dalam dunia politik. Pemerintahannya telah membangun dasar sistem kesejahteraan pemerintah pusat. Program kebijakannya memperluas regulasi nasional atas area-area baru ekonomi. Franklin D. Roosevelt telah memimpin lahirnya pergerakan buruh modern. Telah menjadikan pemerintah sebuah kekuatan utama dalam ekonomi pertanian. Secara dramatis memperluas peran Washington dalam mengawasi dan mendanai proyek-proyek pekerjaan umum utama di seluruh negeri. Pada hakekatnya dengan kebijakan Franklin D. Roosevelt telah membawa pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya sebagian besar berada di luar jangkauan pemerintah, untuk masuk ke dalam ekonomi nasional (Brinkley, 2007: 694). Selain itu Franklin D. Roosevelt telah menciptakan sebuah koalisi yang kuat dalam Partai Demokrat yang akan mendominasi politik Amerika. Dengan demikian pemikiran Franklin D. Roosevelt telah menghasilkan awal dari ideologi liberal baru yang akan menentukan upaya-upaya reformasi selama beberapa dekade selanjutnya

Jarang ada presiden Amerika yang menikmati popularitas luar biasa seperti Franklin D. Roosevelt selama jabatannya. Setelah masa seratus hari pertama memegang jabatan, Franklin D. Roosevelt telah menunjukkan diri sebagai pemimpin negara yang cakap. Franklin D. Roosevelt memperoleh dukungan rakyat yang unik dalam sejarah Amerika dalam melancarkan sebuah program percobaan yang bertujuan mencapai apa yang disebut sebagai sistem yang bersifat lebih sosial dan lebih demokratis. Namun sampai awal tahun 1935, dengan akhir krisis yang belum terlihat, *New Deal* mendapati dirinya sebagai target dari kritikan sengit publik. Golongan-golongan penting partai Demokrat, paling khususnya kaum konservatif dari selatan, berbalik melawan kebijakan-kebijakan presiden, dengan bergabung pada kaum Republikan, dan membantu menciptakan sebuah koalisi konservatif dalam

kongres yang mampu menghalangi banyak tujuan yang ingin dicapai Franklin D. Roosevelt. Pada musim semi 1935, sebagian sebagai jawaban atas serangan yang berkembang tersebut, Franklin D. Roosevelt meluncurkan sebuah program baru yaitu perundang-undangan ambisius yang seringkali disebut *New Deal* Kedua (Harlow, 1961: 716).

New Deal Kedua pada musim semi tahun 1935 sebagai jawaban atas tekanan politik yang berkembang maupun atas krisis ekonomi yang berlanjut. Usulan baru tersebut menunjukkan, meskipun bukan sebuah arah baru setidaknya sebuah perubahan dalam penekanan kebijakan *New Deal*. Perubahan yang paling mencolok adalah sikap pemerintah terhadap perusahaan besar. Pada bulan Maret, Franklin D. Roosevelt mengusulkan kepada kongres sebuah undang-undang yang ditujukan untuk memecah perusahaan-perusahaan induk utilitas yang besar, dan pemberian kontrol monopoli industri.

Hasil pemilihan menunjukkan penyusunan kembali partai yang telah dihasilkan *New Deal*. Kaum Demokrat sekarang mengontrol sebuah koalisi luas antara petani barat dan selatan, kelas-kelas pekerja perkotaan, kaum miskin, pengangguran, dan komunitas kulit hitam di kota-kota di utara (Norton *et al*, 1984: 391). Selain itu juga kaum progresif tradisional dan kaum liberal baru yang berkomitmen, yakni sebuah koalisi yang merupakan mayoritas besar pemilih.

Presiden sendiri mengangkat sejumlah kaum kulit hitam untuk posisi signifikan tingkat kedua dalam pemerintahannya. Beberapa orang yang diangkat Franklin D. Roosevelt ialah Robert Weaver, William Hastie, dan Mary McLeod Bethune membentuk sebuah jaringan tak resmi para pejabat negeri yang sering berunding dengan satu sama lain dan yang menjadi dikenal sebagai *Black Cabinet* (Kabinet Hitam). Eleanor Roosevelt, Harold Ickes, dan Harry Hopkins semuanya berupaya untuk memastikan bahwa program-program bantuan *New Deal* tidak mengecualikan kaum kulit hitam dan sampai tahun 1935, diperkirakan terdapat seperempat dari keseluruhan kaum Afrika Amerika menerima beberapa bentuk

bantuan pemerintah. Salah satu hasilnya adalah sebuah perubahan bersejarah dalam kebiasaan pemilu kaum kulit hitam. Hingga akhir 1932, sebagian besar kaum kulit hitam Amerika memberikan suara untuk Republik, seperti sebelumnya sejak Perang Saudara. Sampai tahun 1936, lebih dari 90 persen dari kaum kulit hitam telah memberikan suara untuk Demokrat. Awal dari sebuah persekutuan politik yang akan bertahan selama puluhan tahun.

Kaum kulit hitam mendukung Demokrat karena tahu Franklin D. Roosevelt bukanlah musuhnya. Namun kaum kulit hitam mempunyai sedikit pandangan bahwa *New Deal* mewakili sebuah perubahan dalam hubungan ras Amerika. Sebagai contoh, presiden tidak pernah bersedia mengambil resiko kehilangan dukungan dari kaum Demokrat selatan dengan mendukung perundang-undangan untuk menjadikan hukuman mati sebagai kejahatan federal. Tidak pula Franklin D. Roosevelt akan menyokong upaya-upaya dalam kongres untuk melarang pajak untuk mendapatkan hak pilih, salah satu alat paling ampuh yang digunakan kaum kulit putih di selatan untuk mencegah kaum kulit hitam untuk memilih (Brinkley, 2007: 728). Seperti halnya dengan kaum Afrika Amerika, *New Deal* tidak memusuhi aspirasi feminis, tapi tidak pula melakukan banyak untuk memajukan wanita. Hal ini sebagian besar karena aspirasi-aspirasi seperti itu tidak memiliki dukungan yang cukup tersebar luas menguntungkan secara politik bagi pemerintahan untuk menyokongnya (Brinkley, 2007: 733).

Ternyata Franklin D. Roosevelt dan kabinetnya tidak serta merta melaksanakan tugasnya dengan mulus, sebab pemikiran Franklin D. Roosevelt dapat sedikit demi sedikit telah memulihkan kondisi sosial dan ekonomi di Amerika bukan berarti tidak ada gangguan berupa perlawanan, pemberontakan, dan revolusi dari berbagai kelompok tertentu, seperti halnya bisnis besar atau serikat buruh yang mengganggu secara terus menerus agar terjadi perubahan, sehingga membuat Franklin D. Roosevelt dan pemerintahannya merasa berjalan melawan arus. Meski demikian, kebijakan *New Deal* telah mengembalikan stabilitas Amerika Serikat sebagai sebuah negara dan Franklin D. Roosevelt dan pemerintahannya telah

mewariskan sebuah negara yang terkelola dengan baik. Secara drastis mengubah peraturan pemerintahan federal baik dalam politik maupun masyarakat. Franklin D. Roosevelt telah berhasil menerapkan teori ekonomi Keynes yang ditransformasikan oleh partai Demokrat ke dalam pendukung kesejahteraan sosial masyarakat. Koalisi *New Deal* yang menyatukan berbagai kekuatan politik dari faksi-faksi dalam partai Demokrat sehingga mampu memperoleh kemenangan 57 persen. Kemudian kemampuannya dalam meyakinkan publik lewat radio secara terus menerus menjelaskan dasar dan tujuan dari kebijakan-kebijakannya yang menjadikan bangsa Amerika keluar dari krisis.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai permasalahan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. menjelang terpilihnya Franklin D. Roosevelt sebagai presiden tahun 1933, kondisi sosial rakyat Amerika Serikat sangat memprihatinkan. Hal tersebut diakibatkan oleh krisis ekonomi yang sudah berlangsung sejak tahun 1929. Kehancuran perekonomian nasional yang berpengaruh terhadap rakyat tidak mendapat tanggapan secara langsung oleh pemerintah, sehingga krisis berlangsung dalam waktu yang lama. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis hanya terfokus untuk menyelamatkan perekonomian perindustrian serta sektor keuangan, bukannya memberikan bantuannya terhadap rakyat. Pemerintah cenderung membiarkan keadaan tersebut dengan alasan menjaga prinsip kemandirian individu sebagai karakter bangsa. Padahal rakyat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Harapan baru muncul ketika Franklin D. Roosevelt terpilih sebagai presiden, yang menawarkan gagasan baru dalam program *New Deal* untuk keluar dari krisis;
2. pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt menyerang secara langsung terhadap dampak krisis ke dalam tiga aspek luas: (1) bantuan langsung untuk kaum miskin, (2) pemulihan untuk ekonomi, dan (3) perbaikan ekonomi untuk menghindari krisis di masa mendatang. *New Deal* telah membawa perbaikan bagi Amerika untuk keluar dari krisis walaupun kebijakannya tidak berjalan optimal. Akan tetapi *New Deal* telah menghasilkan perubahan yang kekal bagi rakyat Amerika Serikat. *New Deal* telah menciptakan stabilitator ekonomi seperti asuransi pemerintah pusat untuk deposit bank, bantuan bagi pengangguran, dan kontrol lebih besar atas uang dan perbankan dalam perekonomian nasional.

Franklin D. Roosevelt telah memberikan perubahan, dengan pembangunan sebuah *welfare state* untuk menyediakan standar minimal kesejahteraan untuk seluruh rakyat Amerika Serikat. Selain itu Franklin D. Roosevelt telah menciptakan *revitalization* partai Demokrat dan pembentukan sebuah koalisi politik baru yang sangat kuat dari buruh, etnis perkotaan, wanita, kaum Afrika Amerika dan penduduk bagian Selatan;

3. pelaksanaan kebijakan Franklin D. Roosevelt dalam program *New Deal* memberikan dampak bagi kehidupan rakyat Amerika Serikat keluar dari krisis, berupa perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan sosial yang di timbulkan adalah hubungan masyarakat dengan pemerintah menjadi semakin baik, seperti tanggapan positif rakyat terhadap program pemerintah. Hal tersebut berpengaruh terhadap Perekonomian Amerika Serikat semakin stabil setelah melewati masa-masa krisis. Perubahan pada bidang politik ialah Franklin D. Roosevelt telah memodernisasi jabatan kepresidenan serta *New Deal* merupakan jalan tengah bagi kebijakan politik Franklin D. Roosevelt yang lebih mengarah kepada sosialisme akan tetapi dapat mempertahankan demokrasi liberal yang dianut.

7.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah, hendaknya selalu mempelajari berbagai kajian sejarah kewilayahan seperti Sejarah Amerika, diantaranya tentang usaha Franklin Delano Roosevelt dalam mengatasi krisis ekonomi di Amerika Serikat tahun 1933-1939 yang dapat menunjang profesionalismenya sebagai calon guru sejarah;
2. bagi generasi muda, hendaknya dapat mengambil sisi positif dari sikap Bangsa Amerika Serikat. Sebab di bawah kepemimpinan Franklin D. Roosevelt berhasil melampaui krisis ekonomi akut. Franklin D. Roosevelt berhasil membalikkan

cara pandang bernegara rakyat Amerika Serikat dari semangat individualisme menuju solidaritas sosial, serta komitmen kapitalisme tanpa peran negara sebagai regulator, menjadi tatanan pasar berkeadilan dengan peran aktif dari negara untuk mendistribusikan kesejahteraan sosial. Sisi positif yang dapat diambil adalah sikap terbuka terhadap cara pandang, prespektif sebagai pedoman untuk bisa menjadi negara yang maju, serta mampu menghadapi berbagai persoalan;

3. bagi guru sejarah, hendaknya dapat memperkaya materi kesejarahan khususnya Sejarah Amerika, yaitu usaha Franklin Delano Roosevelt dalam mengatasi krisis ekonomi di Amerika Serikat tahun 1933-1939, sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar;
4. bagi alمامater FKIP Universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sejarah dan bermanfaat untuk sumber belajar.

Demikian beberapa saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anonim. *Out Line of U. S History*. Bureau of International Information Program U. S Departemen of State
- Birdsall, S. S., dan Florin, John.1922. *Garis Besar Geografi Amerika*. Terj. Gembirasari & Deddy Mulyana. Washington D.C: United State Departemen of State
- Brinkley, A. 2007. *American History: A Survey*. New York: The McGraw.Hill Companies
- Cincotta, H. (ed). 1994. *An Outline of American History*. United States Information Agency
- Davidson, E. G., Heyrman, L., dan B. Stoff. 2006. *Nation of Nations A Concise Narrative of The American Republic*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Departemen Luar Negeri AS. 1981. *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*. Lembaga Penerangan Amerika Serikat.
- Departemen Luar Negeri AS. 1989.*Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*.Terjemahan oleh Sumantri Ar, Dianthus.
- Duverger, M. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Foner, E. 2005. *Give Me Liberty! An American History*. New York. London: W. W. Norton & Company.
- Whitney, F., ed.Keith W. Olsen. 2004. *Garis Besar Sejarah Amerika*. Deplu AS.
- Freidel, F. “Gerakan Pembaharuan Konservatif”, dalam Davis, Allen F dan Woodman, Harold D (Eds). *Konflik Dan Konsensus dalam Sejarah Amerika Modern*. 1991. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- G. Clark, M. K., D. McKinzie, dan A. Wilson. 1982. *Trhee Generation in Twentieth Century Amerika*. United State of America: The Dorsey Press.

- Gottschalk, L. 1975. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Gottschalk, L. 2008. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hardjosoebroto, Dra. Soedinar. 1986. *Sejarah Perekonomian Dunia*. Yogyakarta: BPFE
- Harlow, R. V. 1961. *The United States: From Wilderness to World Power*. New York. Holt, Rinehart And Winston
- J. Carman, H. C., Syrett, H., dan W. Wishy, B. 1967. *A History of the American People*. New York. Alfred .A. Knopf
- Kartodirjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Krisnadi, IG. 2012. *Sejarah Amerika Serikat*. Yogyakarta: Ombak
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lipset, Martin Seymour. 1963. *Amerika Serikat Bangsa Baru Yang Pertama*. Jakarta: PT. Cipta Prakarsa Sejati
- Mackie, J.A.C.1963. *Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern II*. Terj. Soekadijan c.s. Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta
- Mas'oed, M. 1997. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norton, M. B., Katzman, M. David, E., D. Paul, Paterson, G. Thomas, Jr. Tuttle, M. William, dan Brophy, J. William. 1984. *A People and A Nation, A History of The United States*. Boston: Houhton Mifflin Company.
- Notosusanto, N. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer(Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Soekanto, S. 1895. Max Weber. *Konsep-konsep Dasar dalam Sosiologi*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.

United State Science.2004.*Garis Besar Sejarah Amerika*.Washington D.C. Departemen Luar Negeri, AS.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Wish, H. 1961. *Contemporary America The National Scene Since 1900*. Harper & Row, Publishers New York, Evaston, and London.

Artikel/Jurnal/Laporan Penelitian/Skripsi/Tesis

Thornton, J. 2009. Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Kepemimpinan Barack Obama. Tidak diterbitkan. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah.

D. A, Rujito Eko. 2010. Kelangsungan dan Perubahan Individualisme Amerika: Kajian Tekstual dan Kontekstual Terhadap Pidato Pelantikan Presiden Franklin Delano Roosevelt. *Jurnal Adabiyat*, Vol 9 (1): 22-28.

Sumber Internet

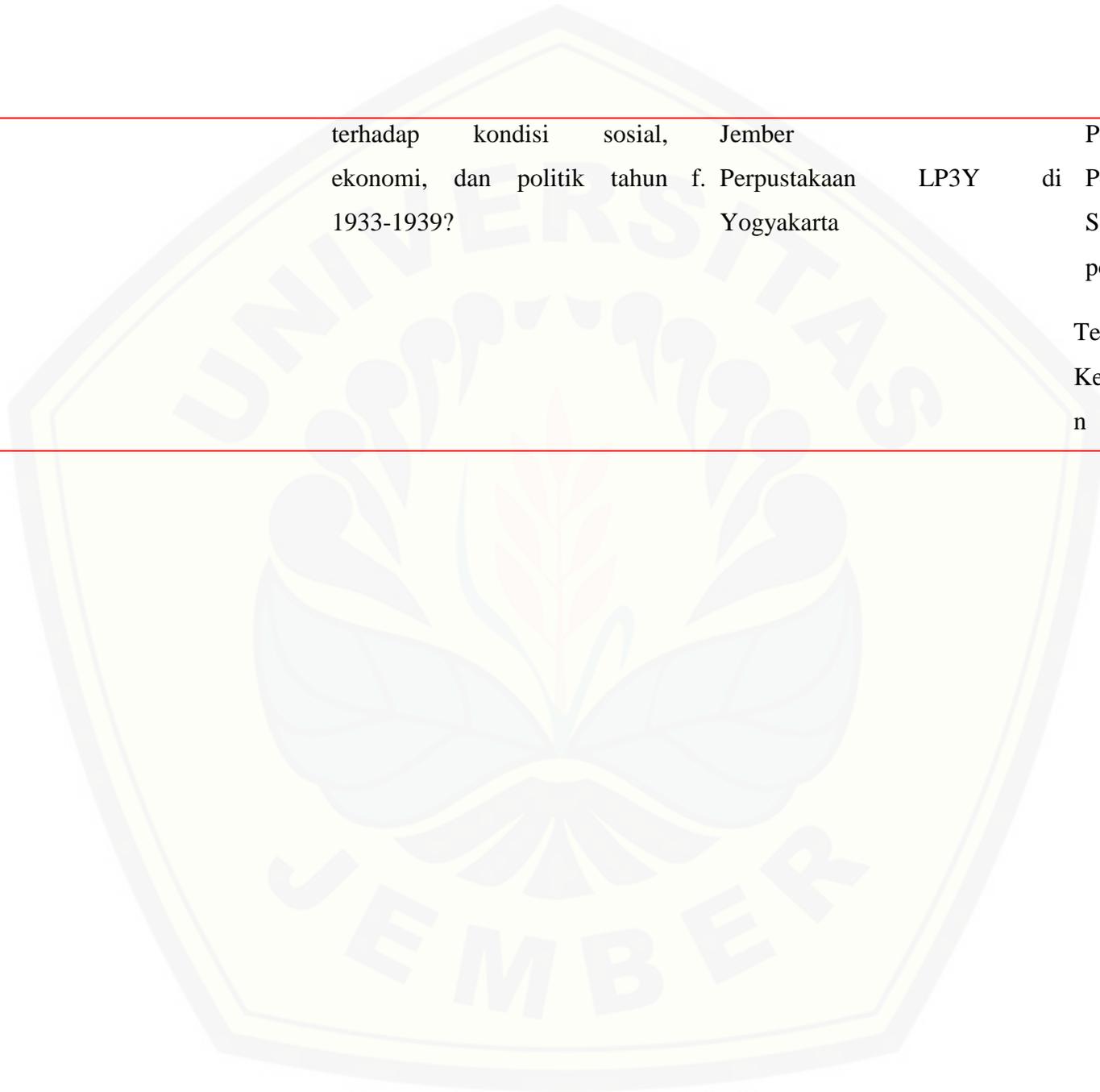
Franklin Delano Roosevelt. *American Rhetoric Online Speech Bank*.
<http://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrcommonwealth.htm>. [14
Desember 2014].

LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN

Topik	Judul Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6
Sejarah Amerika	Usaha F. D. Roosevelt dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Amerika Serikat Tahun 1933-1939	a. Jenis Penelitian : penelitian sejarah. b. Sifat Penelitian : studi pustaka	1. Bagaimanakah kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat menjelang terpilihnya Franklin Delano Roosevelt sebagai presiden tahun 1933? 2. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Franklin Delano Roosevelt mengatasi krisis di Amerika Serikat tahun 1933-1939? 3. Bagaimanakah pengaruh kebijakan yang diterapkan Franklin Delano Roosevelt	Buku pokok. Buku penunjang. Diperoleh dari: a. Perpustakaan dan laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah. b. Perustakaan Universitas Jember c. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember d. Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember e. Perpustakaan daerah Kabupaten	Metode Penelitian sejarah, dengan tahap: a. Heuristik b. Kritik (Verifikasi) c. Interpretasi d. Historiografi Pendekatan

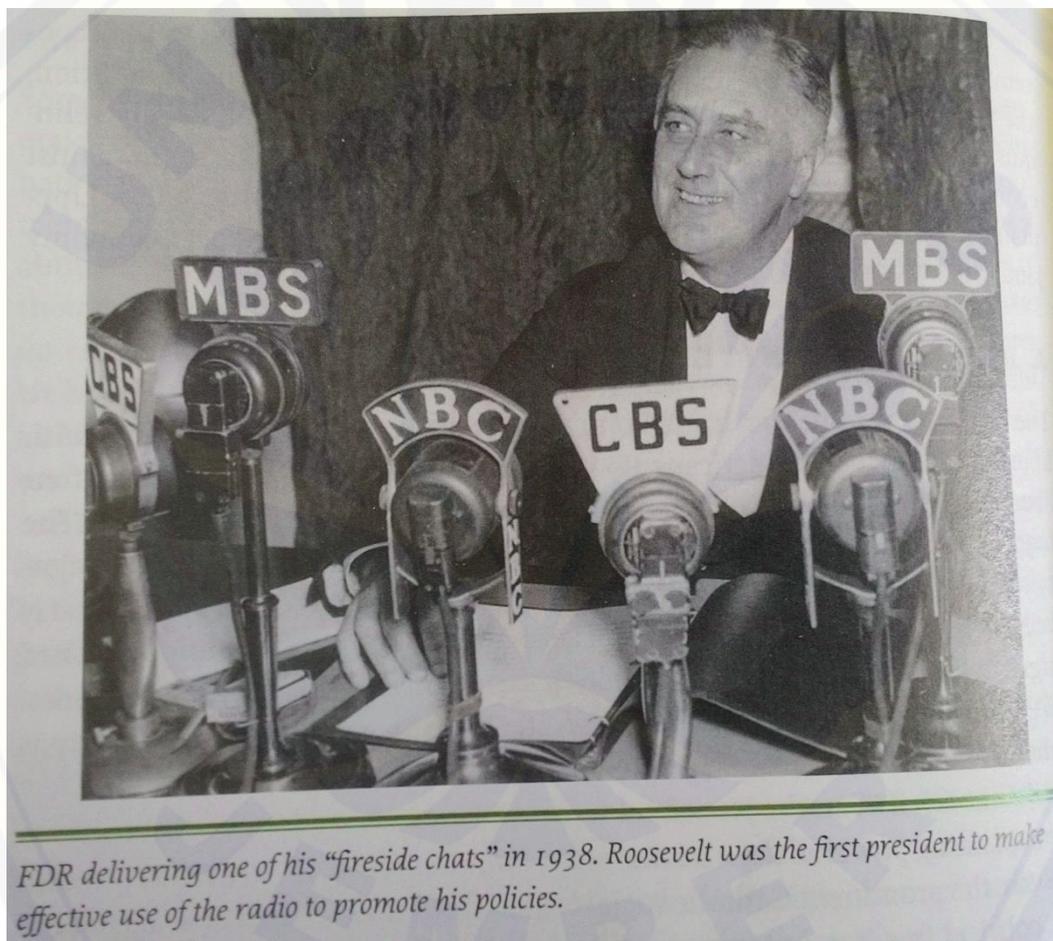
terhadap kondisi sosial, Jember
ekonomi, dan politik tahun f. Perpustakaan LP3Y
1933-1939? Yogyakarta

Penelitian:
Pendekatan
Sosiologi
politik
Teori: Teori
Kepemimpinan



LAMPIRAN B. GAMBAR FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, ELANOR ROOSEVELT, PROTES RAKYAT, DAMPAK KRISIS, PROGRAM NEW DEAL, PERLAWANAN TERHADAP NEW DEAL, PETA, DATA STATISTIK PROGRAM NEW DEAL, DAN KABINET FRANKLIN DELANO ROOSEVELT.

B. 1a Franklin Delano Roosevelt



Gambar 1. Foto Franklin Delano Roosevelt merupakan presiden pertama yang sangat efektif memanfaatkan radio sebagai alat komunikasinya pada rakyat.

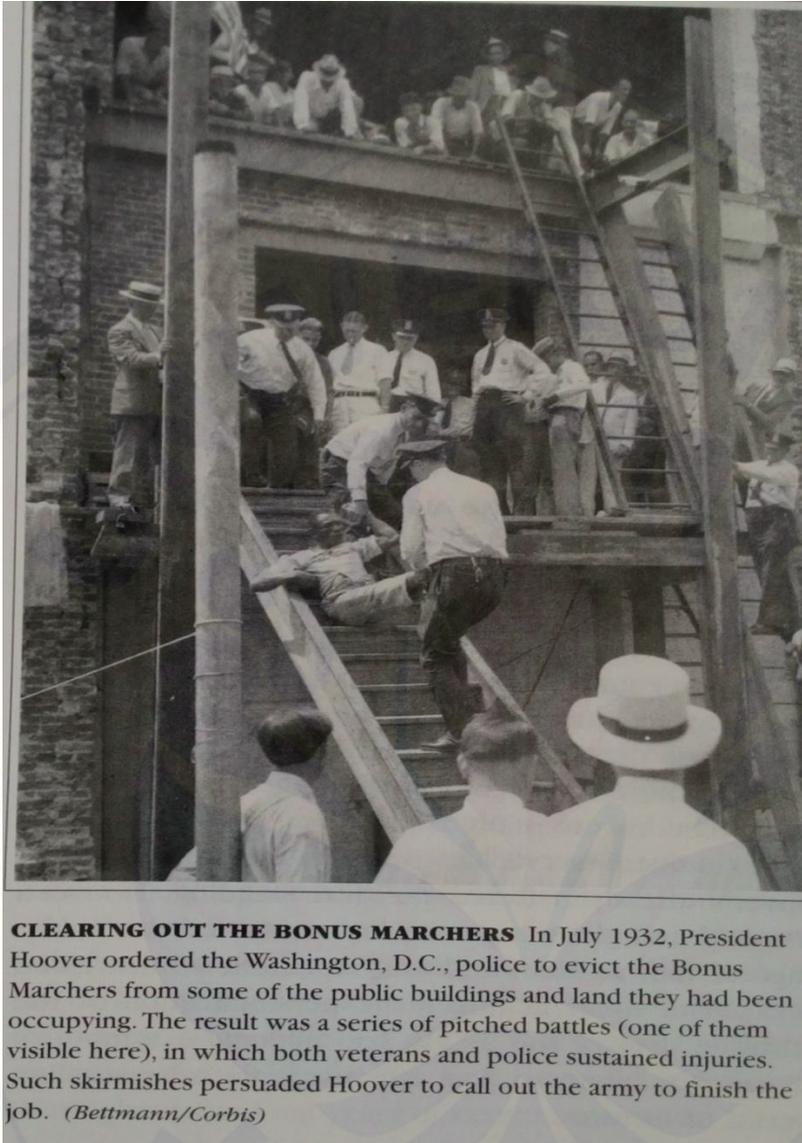
Sumber: Forner, (2005: 718)

B. 1b Elanor Roosevelt



First Lady Eleanor Roosevelt after visiting an Ohio coal mine. She was the first wife of a president to become a major public figure in her own right.

Gambar 2. Elanor Roosevelt setelah mengunjungi tambang batu bara di Ohio.
Sumber: Forner, (2005: 722)

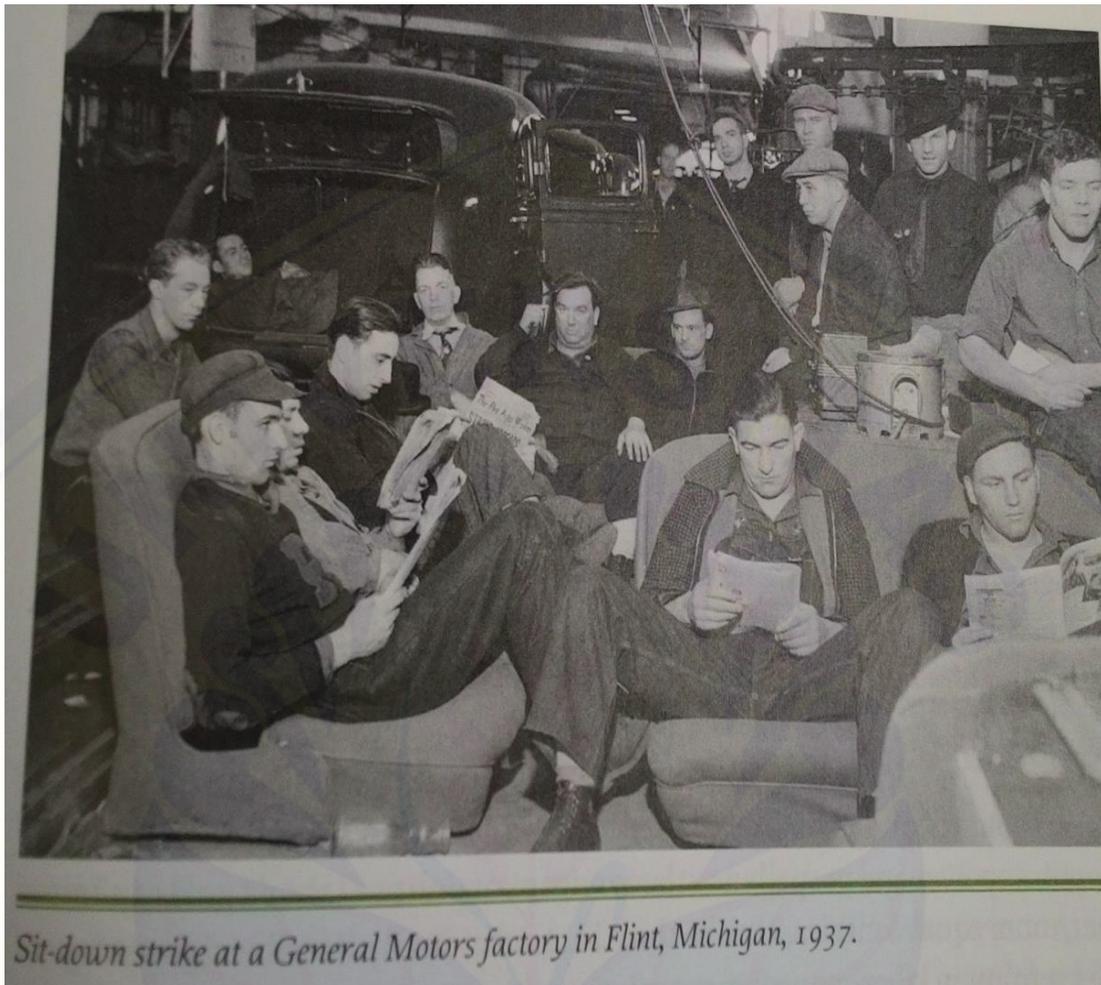
B. 2a Protes Rakyat

Gambar 3. Presiden Hoover memerintahkan polisi untuk mengusir para demonstran dari gedung-gedung pemerintahan.

Sumber: Brinkley, (2007, 687)



Gambar 4. Pembantaian para buruh yang mogok bekerja tahun 1930.
Sumber: Brinkley, (2007: 702)



Gambar 5. Pemogokan duduk oleh pekerja di Perusahaan General Motor.
Sumber: Forner, E (2005: 711)

B. 3a Dampak Krisis

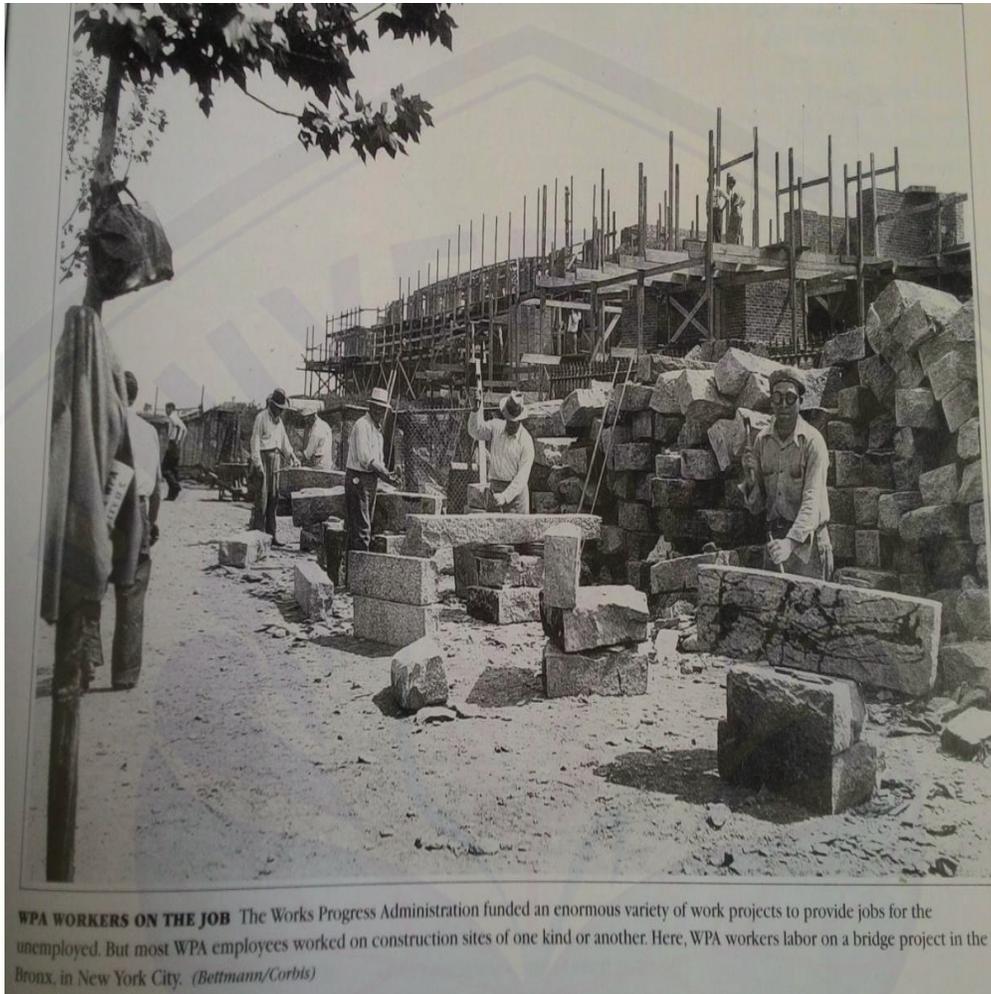


Gambar 6. Ribuan para penganggur pada 1930 mengantri untuk mendapatkan makanan.
Sumber: Brinkley, (2007: 669)



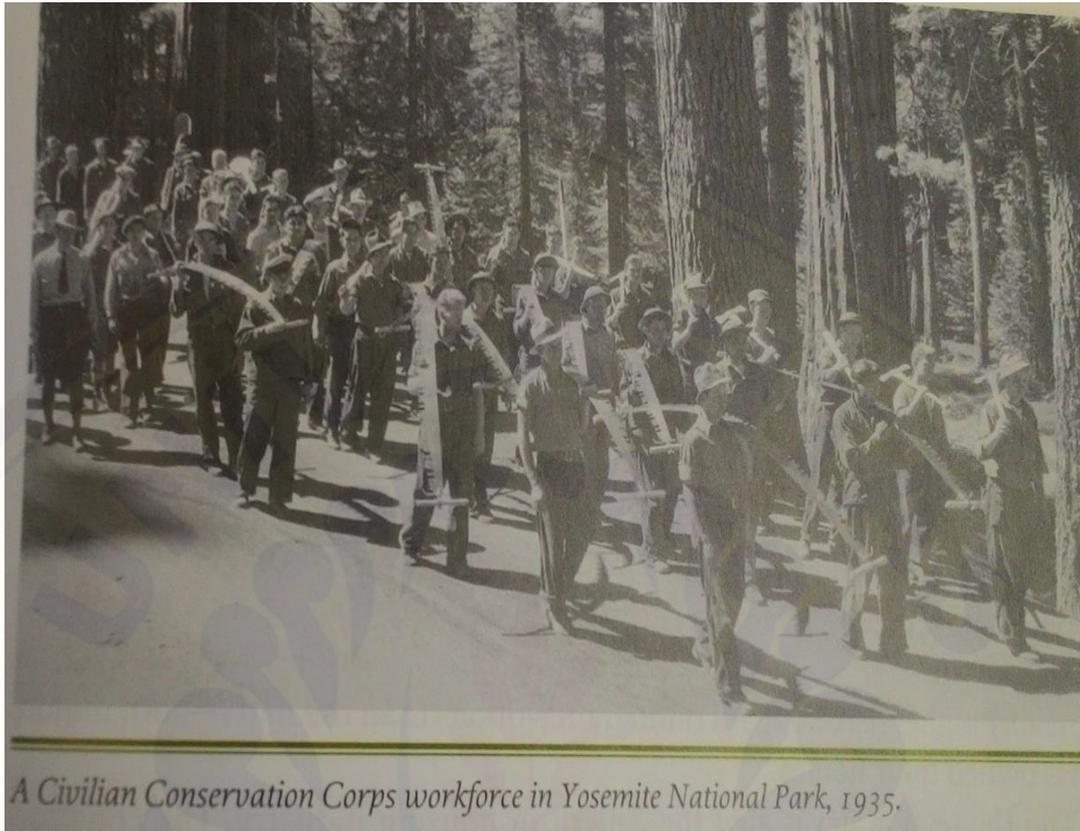
Gambar 7. Dapur umum di Chicago yang membagikan makanan dan kopi gratis pada 3.500 pengangguran.

Sumber: Brinkley, (2007: 672)

B. 4a Program New Deal

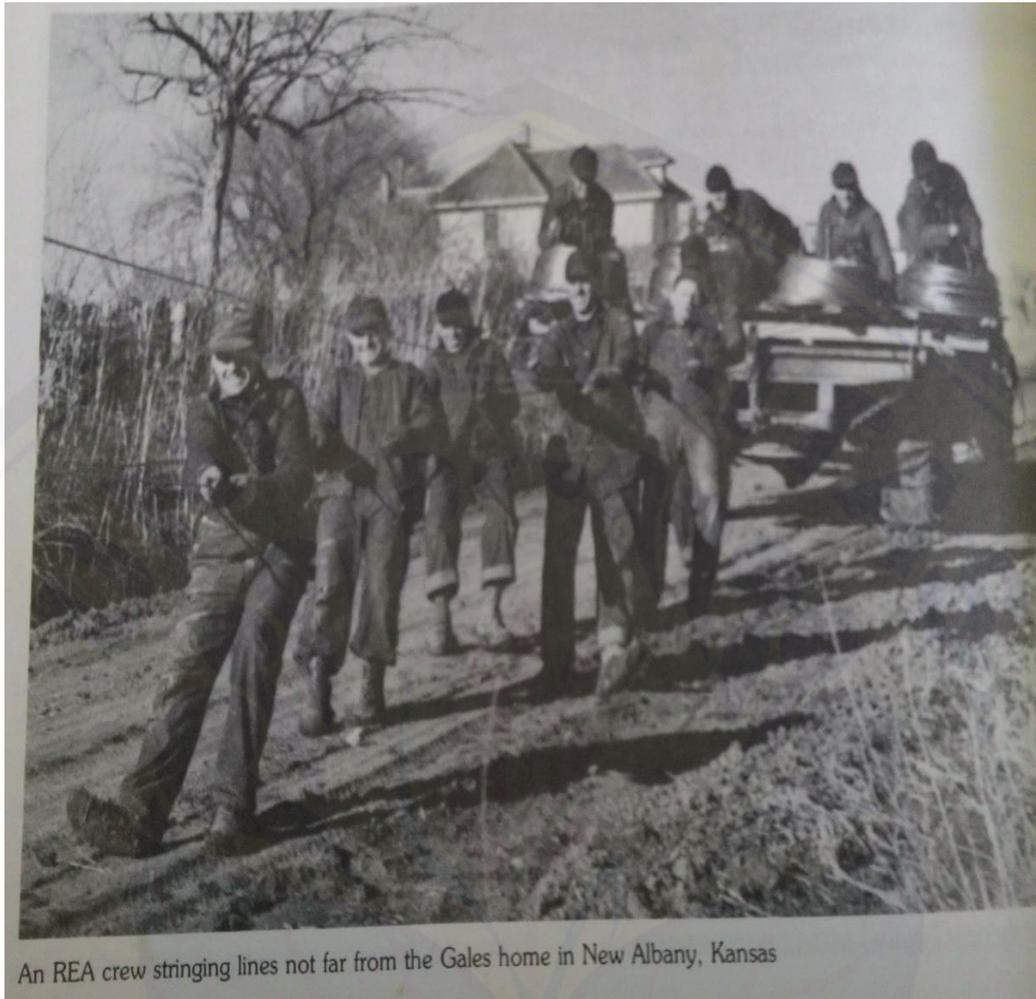
WPA WORKERS ON THE JOB The Works Progress Administration funded an enormous variety of work projects to provide jobs for the unemployed. But most WPA employees worked on construction sites of one kind or another. Here, WPA workers labor on a bridge project in the Bronx, in New York City. (Bettmann/Corbis)

Gambar 8. Pekerja WPA sedang bertugas melaksanakan pembangunan nasional.
Sumber: Brinkley, (2007: 705)



Gambar 9. Para pekerja dalam program CCC di kebun raya nasional.
Sumber: Forner, (2005: 705)

JEMBER



Gambar 10. Pelaksanaan program REA di wilayah New Albany, Kansas
Sumber: Clark, (1982: 244)

JEMBER

B. 5a Perlawanan Terhadap New Deal



Gambar 11. Herbert Hoover penentang *New Deal*
Sumber: Davidson *et al*, (2006: 725)



Gambar 12. Huey Long yang lebih dikenal sebagai *King Fish* yang menentang kebijakan F. D. Roosevelt.

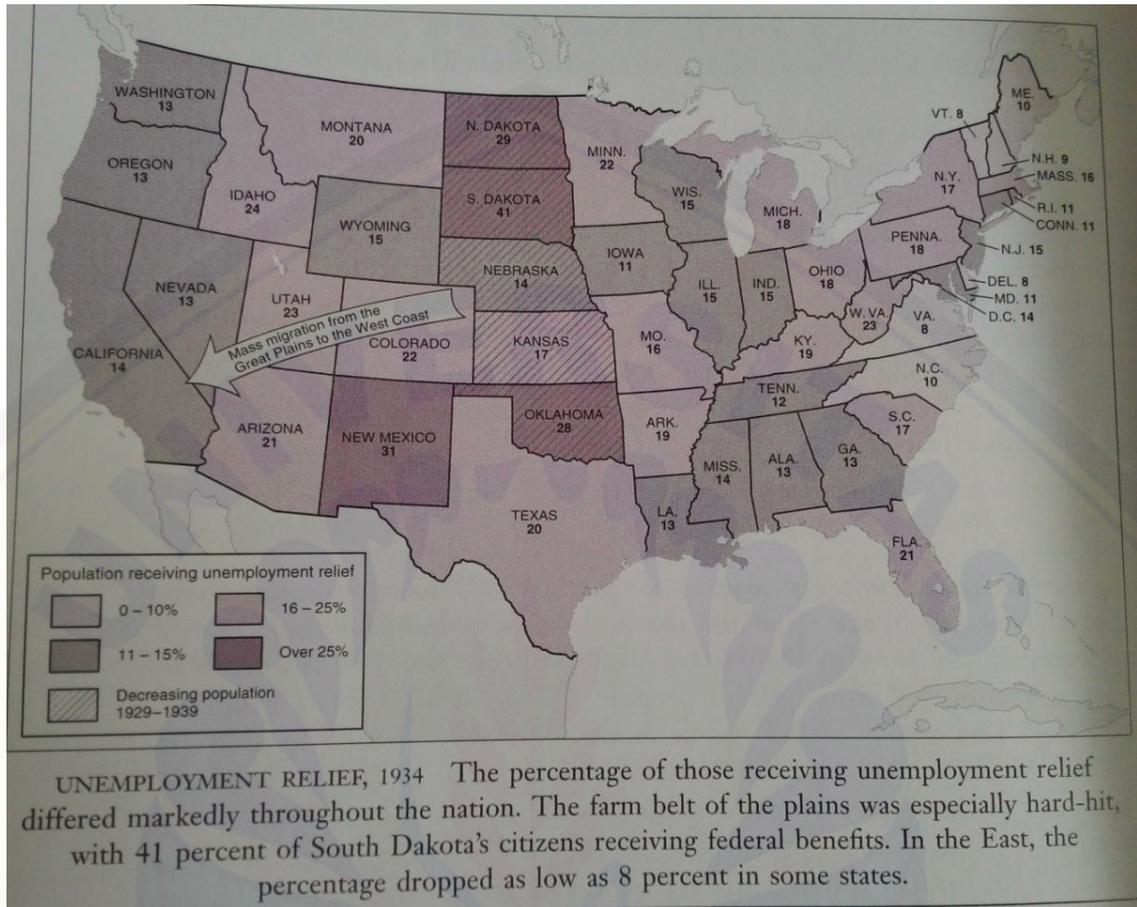
Sumber: Davidson *et al*, (2006: 736)

B. 6a Peta

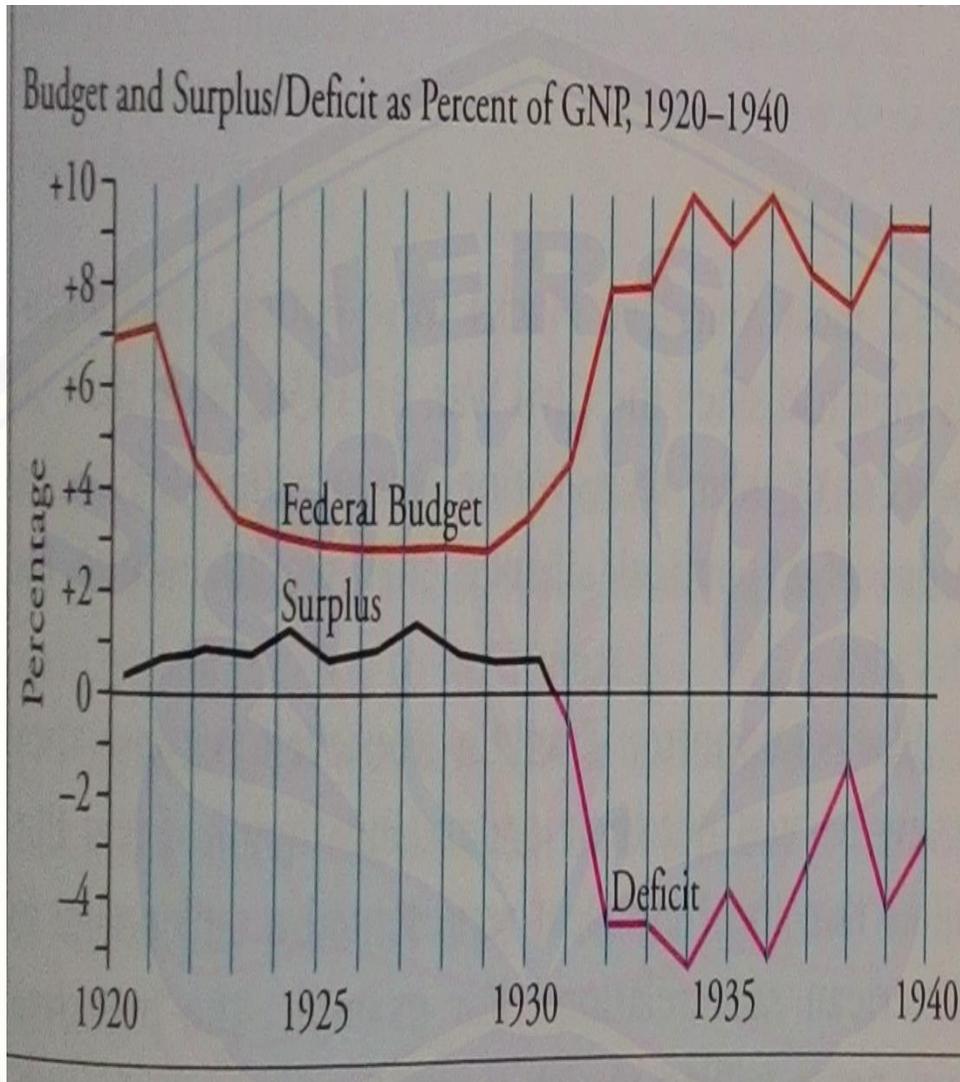


Gambar 13. Peta kemenangan F. D. Roosevelt dalam pemilu tahun 1932.

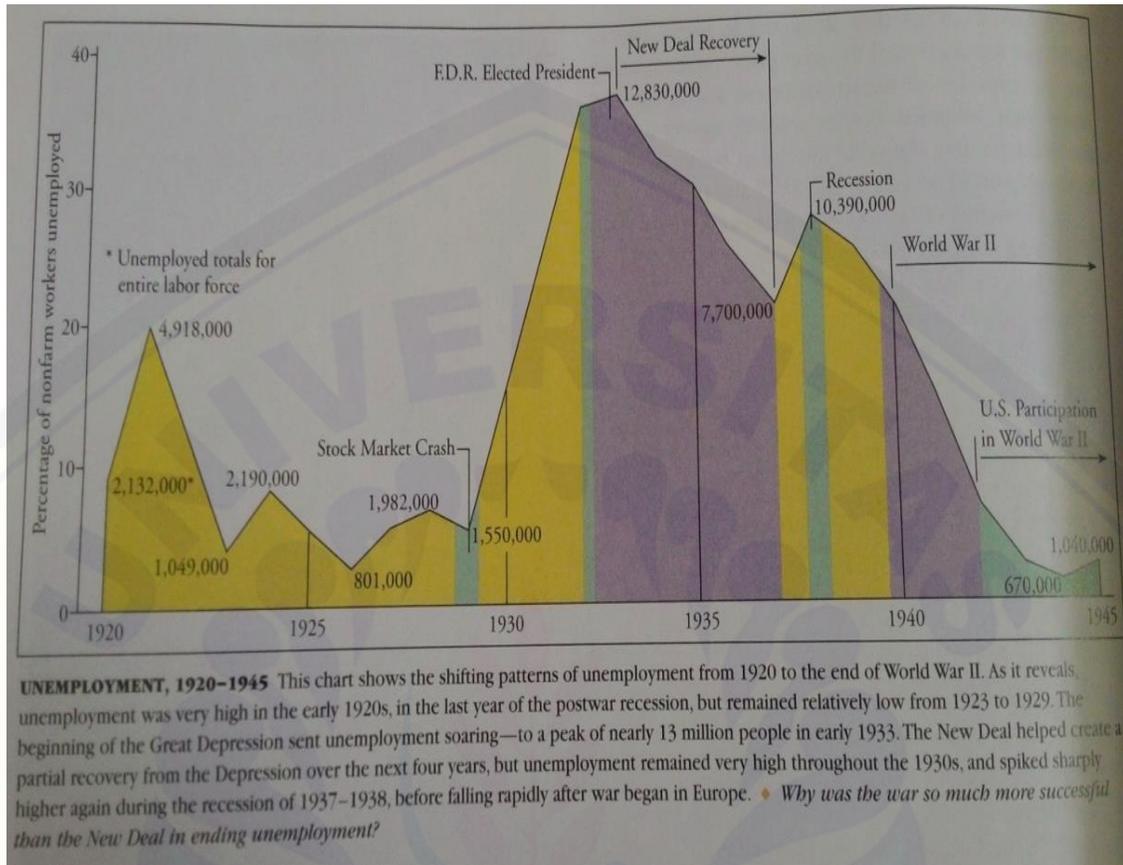
Sumber: Carman *et al*, (1967: 587)



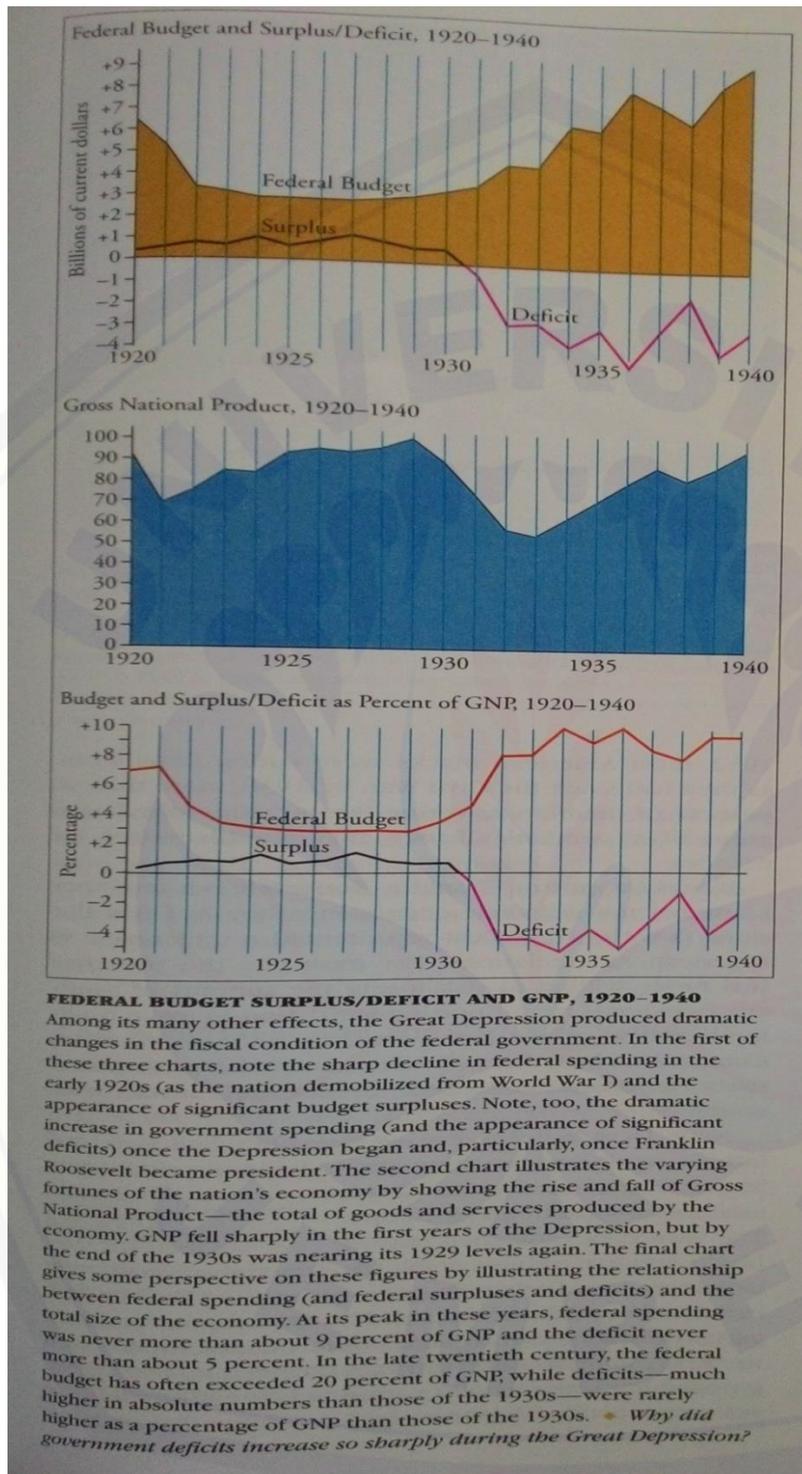
Gambar 14. Prosentase kenaikan penerimaan pengangguran pada tahun 1929-1939
 Sumber: Davidson *et al*, (2006:732)

B. 7a Data Statistik Program New Deal

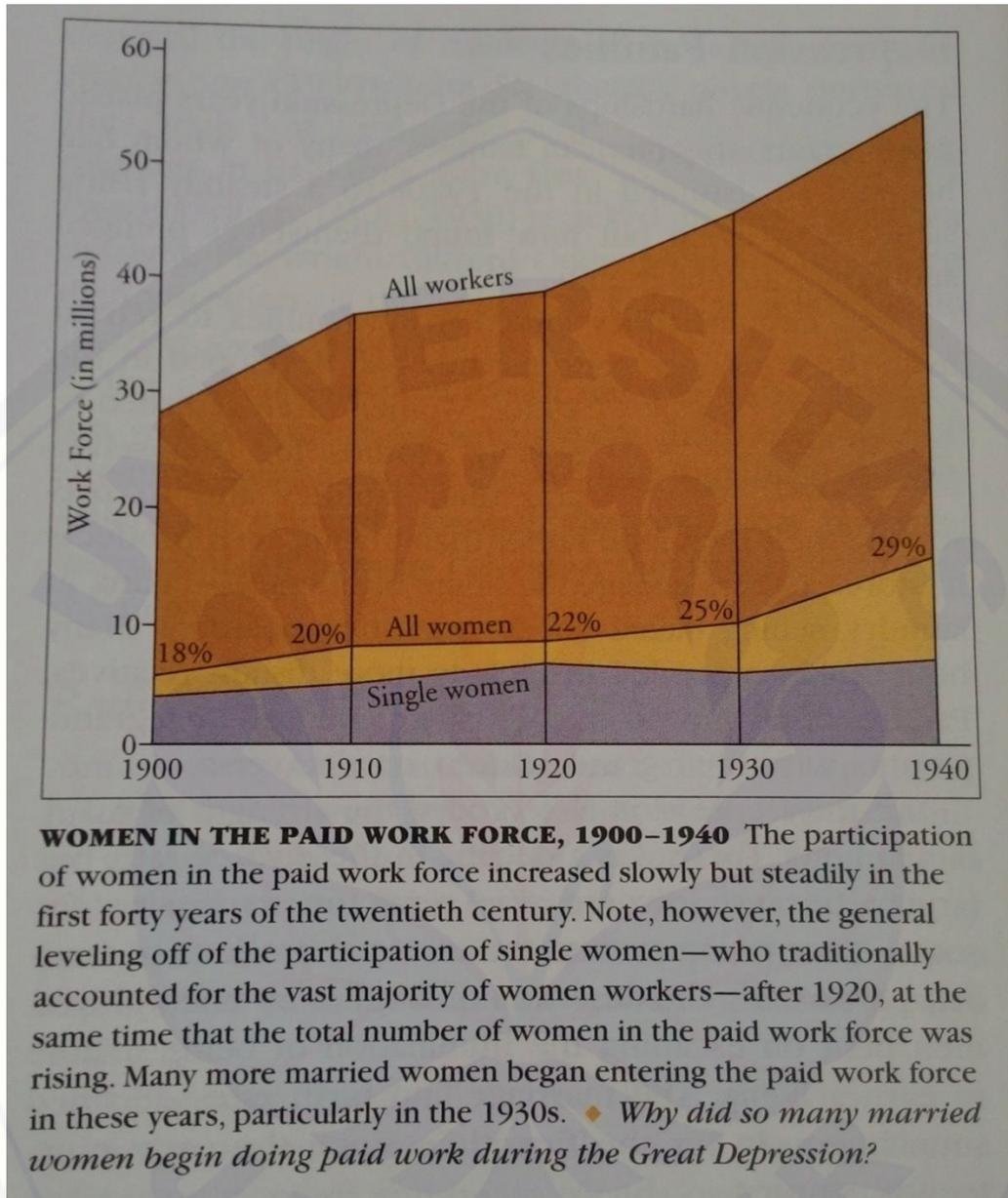
Gambar 24. Anggaran pemerintah kelebihan/ defisit dari tahun 1920-1940.
Sumber: Davidson *et al*, (2006:751)



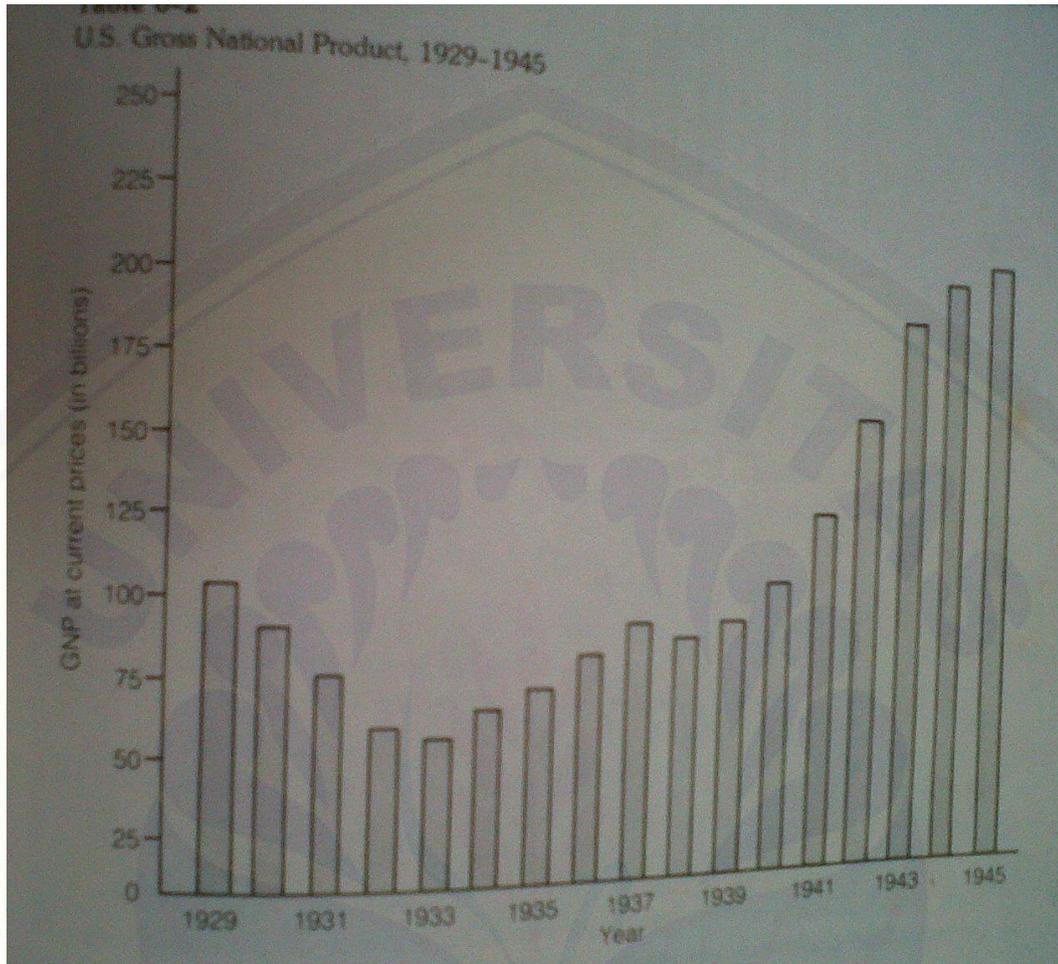
Gambar 25. Grafik pengangguran dari tahun 1920-1945.
Sumber: Brinkley, (2007: 704)



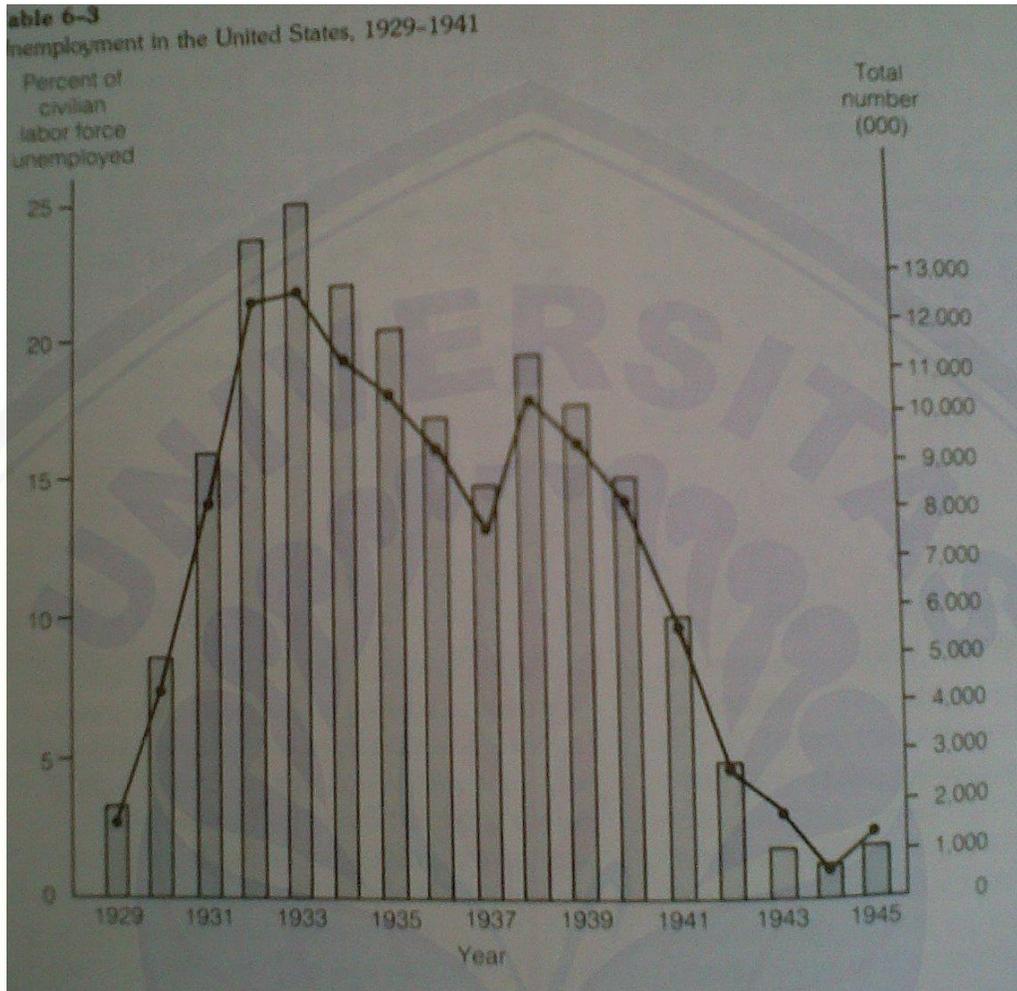
Gambar 26. Anggaran surplus/defisit pemerintah pusat dan GNP dari tahun 1920-1940.
 Sumber: Brinkley, (2007: 709)



Gambar 18. Partisipasi wanita dalam lapangan pekerjaan.
Sumber: Brinkley, (2007: 677)



Gambar 19. Data statistik produksi nasional di Amerika Serikat dari tahun 1929-1945
Sumber: Clark *et al*, (1982: 217)



Gambar 20. Data statistik pengangguran di Amerika Serikat dari tahun 1929-1945
Sumber: Clark *et al*, (1982: 218)

B. 8a Kabinet Franklin Delano Roosevelt

A-31

The Franklin D. Roosevelt Administration (1933-1945)

Vice President	John Nance Garner	1933-1941
	Henry A. Wallace	1941-1945
	Harry S. Truman	1945
Secretary of State	Cordell Hull	1933-1944
	Edward R. Stettinius, Jr.	1944-1945
Secretary of Treasury	William H. Woodin	1933-1934
	Henry Morgenthau, Jr.	1934-1945
Secretary of War	George H. Dern	1933-1936
	Henry A. Woodring	1936-1940
	Henry L. Stimson	1940-1945
Attorney General	Homer S. Cummings	1933-1939
	Frank Murphy	1939-1940
	Robert H. Jackson	1940-1941
	Francis Biddle	1941-1945
Postmaster General	James A. Farley	1933-1940
	Frank C. Walker	1940-1945
Secretary of Navy	Claude A. Swanson	1933-1940
	Charles Edison	1940
	Frank Knox	1940-1944
	James V. Forrestal	1944-1945
Secretary of Interior	Harold L. Ickes	1933-1945
Secretary of Agriculture	Henry A. Wallace	1933-1940
	Claude R. Wickard	1940-1945
Secretary of Commerce	Daniel C. Roper	1933-1939
	Harry L. Hopkins	1939-1940
	Jesse Jones	1940-1945
	Henry A. Wallace	1945
Secretary of Labor	Frances Perkins	1933-1945

Gambar 21. Kabinet Franklin Delano Roosevelt.
Sumber: Brinkley, (2007: A31)